

SINERGITAS *STAKEHOLDERS* MELALUI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) BERBASIS LINGKUNGAN

**(Studi pada Program Penanaman Trembesi Kudus-Semarang PT. Djarum
Foundation Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya

GILANG ADYAREZKY

NIM. 145030101111096



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

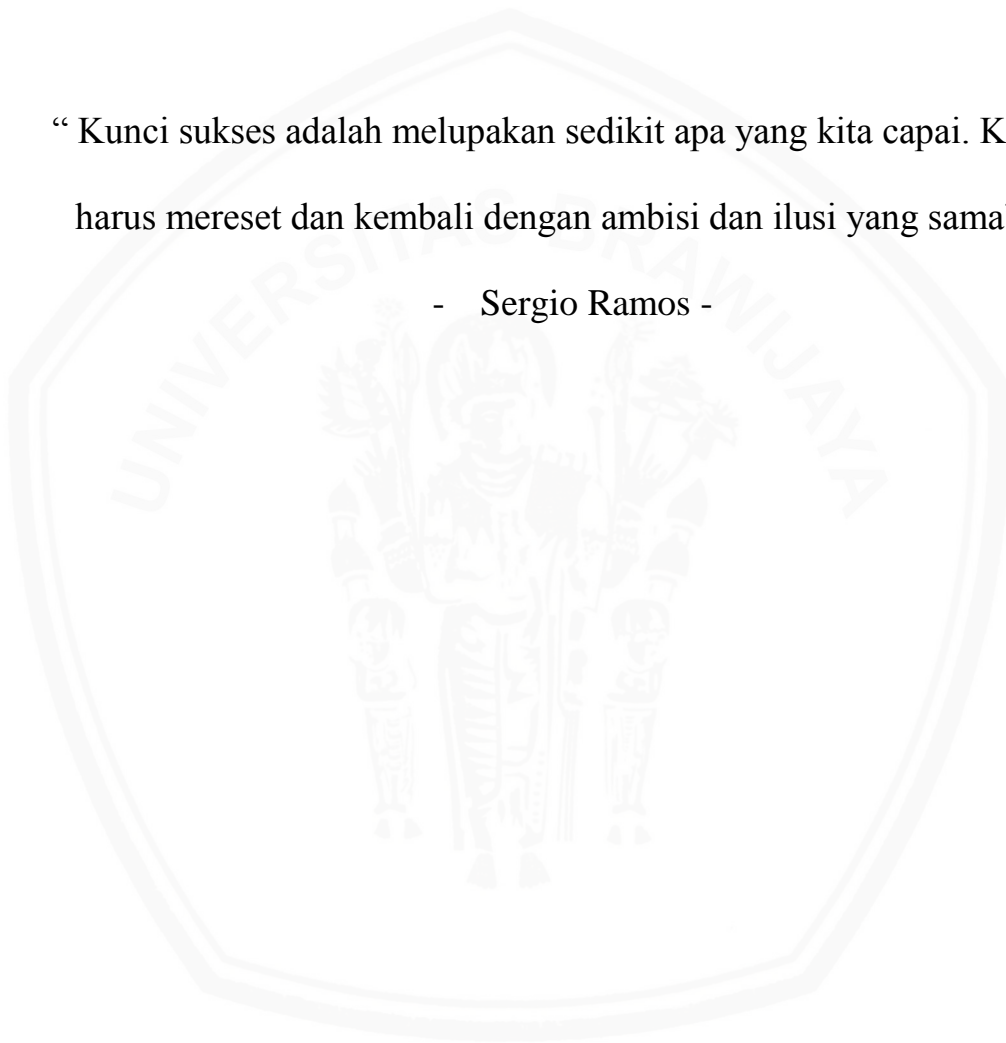
MOTTO

“Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan
pahala mereka tanpa batas”

- QS Az-Zumar : 10 -

“ Kunci sukses adalah melupakan sedikit apa yang kita capai. Kita
harus mereset dan kembali dengan ambisi dan ilusi yang sama”

- Sergio Ramos -



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergitas *Stakeholders* Melalui Program *Corporate Social Responsibility*
(CSR) Berbasis Lingkungan

Disusun oleh : Gilang Adyarezky

NIM : 145030101111096

Fakultas : Ilmu Administrasi

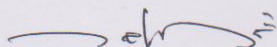
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 24 Mei 2018

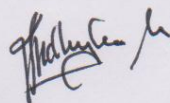
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA.
NIP. 19740614 200501 1 001



Andhyka Muttaqin S.AP, MPA.
NIP. 2011078504211001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

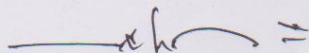
Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juli 2018
Waktu : 11.00 - 12.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Gilang Adyarezky
Judul : Sinergitas Stakeholders Melalui Program Corporate Social Responsibility Berbasis Lingkungan (Studi pada Program Penanaman Trembesi Kudus-Semarang PT. Djarum Foundation Kudus)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



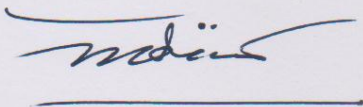
Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA
NIP. 197406142005010 1 001



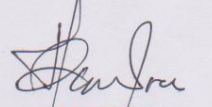
Andhyka Muttaqin S.A.P, M.PA
NIP. 201107850421 1 001

Anggota

Anggota



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001



Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP
NIP. 201107851214 1 001

RINGKASAN

Adyarezky, Gilang, 2018. **Sinergitas Stakeholders Melalui Program Corporate Social Responsibility Berbasis Lingkungan (Studi pada Program Penanaman Trembesi Kudus-Semarang PT. Djarum Foundation Kudus)**, Skripsi, 1) Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA, 2) Andhyka Muttaqin S.AP, MPA.

Program Bakti Lingkungan merupakan program yang memiliki tujuan menginginkan perawatan lingkungan dapat tetap terjaga agar dapat menjadi bekal untuk mewujudkan negeri yang nyaman dan tentram. Program Bakti Lingkungan memiliki program utama di dalamnya yakni penanaman trembesi di jalur pantai utara dari Merak hingga Banyuwangi. Penanaman trembesi tersebut terdapat tiga tahapan yang harus dilalui yaitu proses pembibitan, proses penanaman dan proses perawatan. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat tiga *stakeholders* yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup, PT Djarum Foundation dan masyarakat. Ketiga *stakeholders* tersebut menjadi tiga *stakeholders* yang menjadi komponen utama dari *Governance* yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga *stakeholders* tersebut menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terkait bidang keahliannya. Mengacu dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility*, tugas dari *stakeholders* yang terlibat yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Tetapi pelaksanaan program penanaman trembesi mengalami beberapa kendala yang membuat program tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Maka dari itu, penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran dari masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis lingkungan oleh PT. Djarum Foundation Kudus dengan pendekatan kualitatif fenomenologi dan menggunakan teknik analisis data Spradley yang terdiri dari Analisis Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Tema Kultural dan Analisis Komponensial.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sinergitas dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Berdasarkan lima proposisi *governance* yakni institusi dan aktor yang tidak hanya dari pemerintah, mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab atas tugas dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi, mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi yang kolektif, membahas tentang *self-governing* yang otonom dari setiap aktor dan menyadari untuk memperbaiki keadaan dan tidak bergantung terhadap kekuasaan pemerintah.

Pola sinergitas yang terdiri atas take and give, adanya kejujuran dan saling menghargai menyajikan bahwa pola tersebut sudah dijalankan dengan konsep yang dan undang-undang yang sesuai. Tetapi kinerja yang tidak maksimal membuat sinergitas kurang berjalan dengan baik. Unsur utama tidak berjalannya sinergitas adalah tentang komunikasi dan koordinasi. Sedangkan dalam mewujudkan sinergitas lewat dua komponen yakni komunikasi dan koordinasi belum berjalan dengan baik. Peran dari masyarakat dalam sinergitas masih belum berfungsi dari masyarakat karena masyarakat terlihat pasif dan belum terlalu paham dengan fungsinya. Setiap *stakeholders* menganggap bahwa koordinasi hanya berjalan ketika tahap perencanaan hingga seremonial, sehingga setelah tahap itu selesai maka program tersebut dianggap selesai. Dampak yang terjadi akibat dari buruknya komunikasi dan koordinasi sudah terlihat setelah beberapa tahun setelah program tersebut berjalan.

Melihat kesimpulan akan masalah yang terjadi pada penelitian tersebut, peneliti memberikan tiga saran sebagai jalan keluar dari masalah yang dialami. Saran tersebut adalah pembuatan Memorandum of Understanding (*MoU*) sebagai dasar perjanjian setiap *stakeholders*, pengaktifan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan perlunya peningkatan kapasitas dari setiap individu pada setiap *stakeholders*.

Kata Kunci : Sinergitas *Stakeholders*, Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi, Komunikasi dan Koordinasi



SUMMARY

Adyarezky, Gilang, 2018. **Stakeholders Sinergity Through Corporate Social Responsibility Program Based on Environment (Study on Trembesi Planting Programs Kudus-Semarang PT. Djarum Foundation Kudus)**, Minor Thesis, 1) Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA, 2) Andhyka Muttaqin S.AP, MPA.

Environment Service Program is programs that has a purpose to take care the environment that can be a supplies to create comfortable country. The main program of Environment Service Program is Trembesi Planting in North Beach Road from Merak to Banyuwangi. Trembesi Planting has three steps there are seeding process, planting process, and treatment process. There are three stakeholders who involved in that program, there are Environment Department, PT. Djarum Foundation, and society. That three stakeholders become the main component from Governance. That three stakeholders doing their job and function related on their competence. Depend on Region Regulation which organize about Corporate Social Responsibility, the job of the stakeholders who involved are planning, implementation, founding, controlling, and reporting. So, this research has a purpose to describe and analize about the character from each stakeholders in doing Corporate Social Responsibility (CSR) based on environment by PT. Djarum Foundation Kudus with cualitative fenomenology approach and using Spradley data analysis technique which consist of Domain Analysis, Tacsonomy Analysis, Cultural Theme Analysis, and Componensial Analysis.

The research which did before shows that sinergity from Environment Service Programs, Trembesi Planting didn't work as planned before. Based on five governance proposition such a institution and actor which is not just from government, identifying blurred borders and responsibility from the job on resolve social and economic issues, identifying the dependence in relations between institution who involve in the colective action, discuss about autonomy self-governing from each actors and realize to repair the situation and doesn't need depend on goverment power through order and authority. But its five proposition haven't on the target yet.

Patterns of synergy consisting of taking and giving, including honesty and mutual understanding of patterns that have been executed with the appropriate concept and law. Can not do anything to make sin not work well. While on the build sinergity through two components there are communication and coordination haven't went well. The character of the society on the sinergity hasn't work becasue the society look pasive and hasn't understood their function. Every stakeholders feel that coordination will be working when planning steps until ceremonial, so after that steps done, the programs is done. The effect from bad communication and coordination have seen after many years that programs work.

With seeing the conclusion from the problem that happening on that research, researcher gives three sugestions as the way out from that problems. That sugestions are making the Memorandum of Understanding (MoU) as the background of the deal from each stakeholders, activating Social Responsibility and Corporate Environment Forum, and needs increasing the capacity from each individuals on each stakeholders.

Keywords : Stakeholders Sinergity, Environment Service Program Trembesi Planting, Communication and coordination.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya dan tak lupa kita kirim salam dan shalawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah membawakan kita suatu ajaran yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh sarjana Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sinergitas *Stakeholders* Melalui Program *Corporate Social Responsibility* Berbasis Lingkungan”.

Dalam penulisan skripsi, penulis ingin menyampaikan tentang keterkaitan dari sinergitas antara pemerintah, swasta dan pemerintah dalam mengelola suatu program yang berbasis lingkungan. Penulis juga meneliti tentang komunikasi dan koordinasi yang dijalin dari setiap stakeholders demi menjaga kelangsungan dari program tersebut. Penulis menulis sesuai dengan cara pandang penulis dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Kendala yang ditemui dalam mengerjakan tugas skripsi, saya menganggap menjadi suatu hal yang wajar dan akan menjadi kendala tersebut menjadi pembelajaran untuk menjadikan penulis menjadi lebih bijak di kemudian hari. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa dan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Prof Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
5. Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA selaku ketua dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan, motivasi serta saran hingga skripsi saya telah terselesaikan.
6. Andhyka Muttaqin S.AP, MPA selaku anggota dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memberikan saran dan mengajarkan saya dalam menyelesaikan skripsi.

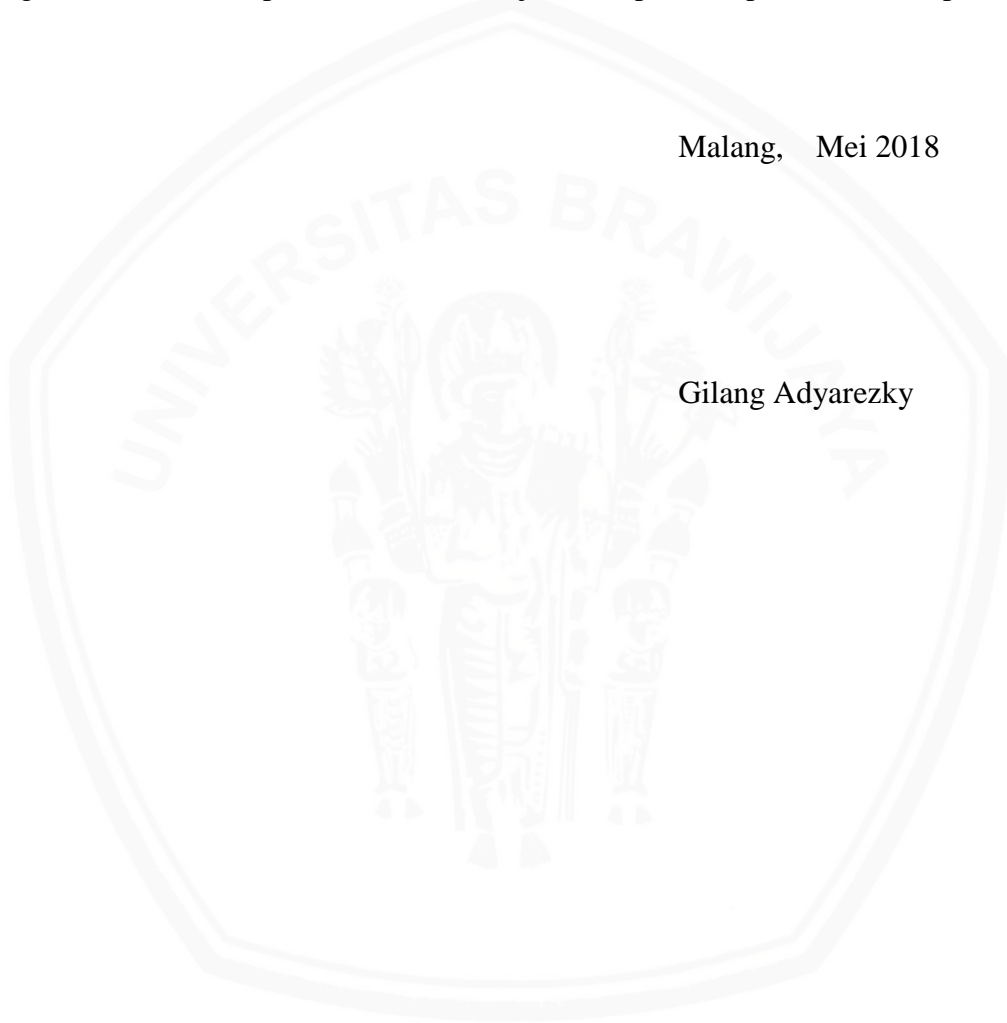
7. Bapak FX. Supanji selaku *Vice President* dari PT Djarum Foundation yang telah membantu dan memberikan izin terhadap saya sehingga dapat mengambil studi pada program Bakti Lingkungan.
8. Bapak Abdurrachaman Aldila selaku pembimbing saya di lapangan yang telah membantu membimbing dan memberikan saran terkait *detail* dari program penanaman trembesi yang sedang diteliti.
9. Bapak Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang telah memberikan informasi, bimbingan dan petunjuknya tentang perkembangan program di lingkungan sekitar Kabupaten Demak.
10. Masyarakat Jogoloyo Wonosalam Kabupaten Demak yang telah memberikan jawaban dan informasi terkait wawasan dampak lingkungan yang diberikan hingga selesai penelitian.
11. Terima kasih yang tiada tara saya haturkan kepada kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, Papa saya Arief Junaedy dan Mama saya Amanah Yuniati yang telah menjaga dan membesarkan saya hingga saya telah mencapai titik sekarang, yang telah memberikan segala dukungan dan mengajarkan arti dari ketulusan, nilai-nilai dan kesabaran yang tidak dapat saya balas dengan apapun.
12. Kakak saya Frida Adyasari, Galih Adyarangga, Hilda Nancy Aviana dan Kalandra Nareswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti sampai saya menyelesaikan skripsi.
13. Rekan-rekan satu angkatan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Program Studi Administrasi Publik 2014 yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, persahabatan dan arti dari perjuangan yang semoga akan berlanjut hingga seterusnya.
14. Vava, Adi, Andre, Afif, Agus, Kempot, Mbut, Bagas dan semua teman di Kudus lain yang telah menemani saya ketika proses pengerjaan skripsi serta memberikan semangat dan dukungannya dalam proses skripsi berlangsung.
15. Adit, Kamil, Inan, Rhega, Dendi, Fathan, Aji, Vando, Asyiq, Rei, Suryo, Faris, Yuda dan teman seperjuangan lain yang telah memberikan dorongan moral, kekuatan, bantuan dan kasihnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Dan untuk seluruh orang-orang yang berkontribusi hingga tahap yang sudah saya jalani, yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Semoga skripsi yang telah penulis selesaikan akan mampu memberikan ilmu yang berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam hal keterkaitan antar stakeholders. Diharapkan skripsi ini akan membantu dari setiap stakeholders dalam upaya pengembangan penanaman trembesi maupun program lanjutan lainnya.

Sekian, penulis berupaya untuk mengerjakan skripsi ini dengan sungguh-sungguh dan seluru kemampuan yang dimiliki. Penulis juga sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kesalahan yang telah diperbuat. Dengan kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun akan mebantu penulis dalam menuju kesempurnaan pembuatan skripsi.

Malang, Mei 2018

Gilang Adyarezky



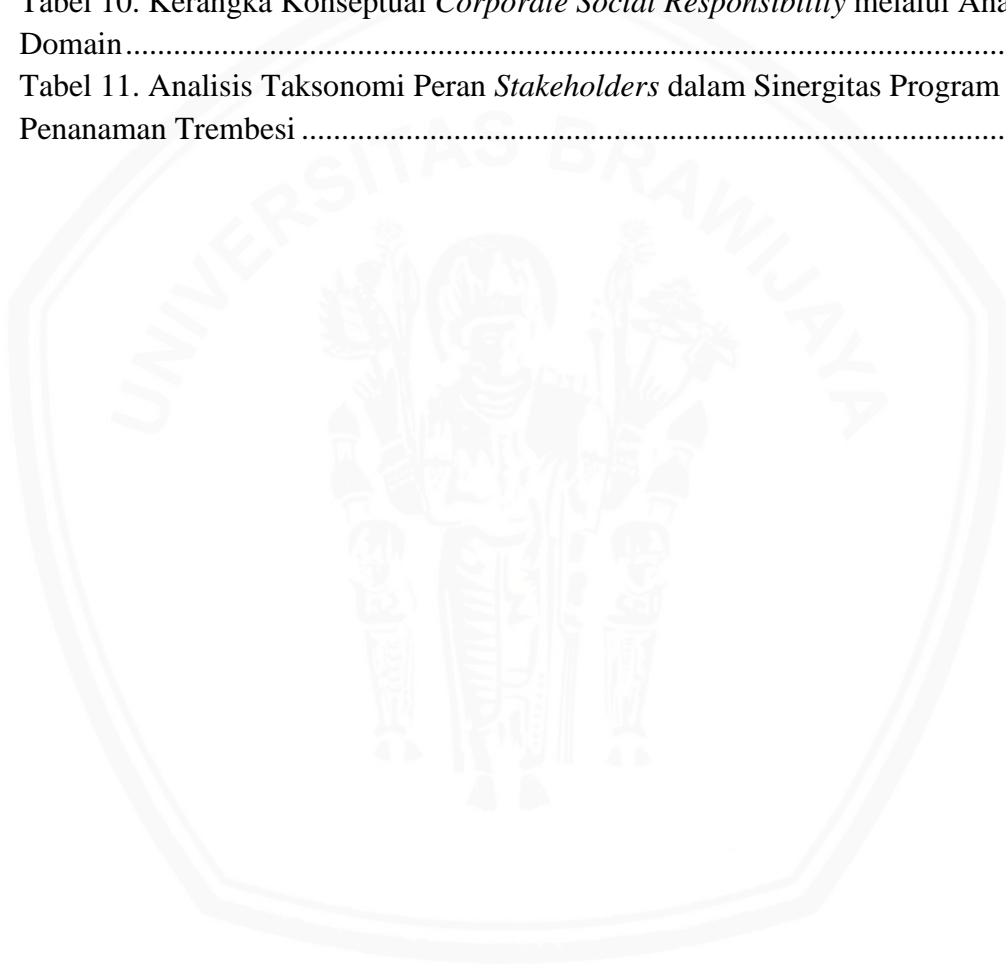
DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah :	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 15
A. Administrasi Publik.....	15
1. Konsep Administrasi Publik.....	15
2. <i>Good Governance</i>	16
3. Pembangunan Berkelanjutan	19
B. Sinergitas <i>Stakeholders</i>	23
1. Konsep Sinergitas	23
2. Konsep <i>Stakeholders</i>	26
3. <i>Stakeholder</i> dalam Teori <i>Governance</i>	28
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	33
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	33
2. Ruang lingkup dan prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	37
3. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	39
4. Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	41
D. Etika Lingkungan	43
 BAB III METODE PENELITIAN	 46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian	48
D. Sumber Data Penelitian.....	49
E. Teknik Pengambilan Data	50
F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Analisis Data	52
H. Keabsahan Data.....	57
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 60
A. Gambaran Umum	60
B. Penyajian Data	74

1. Wujud peran setiap <i>stakeholders</i> dalam program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Berbasis Lingkungan	74
a. Peran dari Pemerintah	74
b. Peran dari Swasta	84
c. Peran dari Masyarakat Madani	95
2. Sinergitas dari setiap Unsur <i>Stakeholders</i> dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Berbasis Lingkungan	103
a. Komunikasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation	103
b. Koordinasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation.	108
C. Analisis Data	119
1. Wujud peran setiap <i>Stakeholders</i> dalam program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Berbasis Lingkungan	119
a. Peran dari Pemerintah	128
b. Peran dari Swasta	130
c. Peran dari Masyarakat Madani	132
2. Sinergitas dari setiap Unsur <i>Stakeholders</i> dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Berbasis Lingkungan	139
a. Komunikasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation	147
b. Koordinasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation.	150
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aktor Perusak/Pencemar Lingkungan Hidup	3
Tabel 2. Kegiatan CSR yang Dilakukan di Indonesia.....	5
Tabel 3. Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i>	36
Tabel 4. Luas Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Demak	61
Tabel 5. Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Demak	62
Tabel 6. Target Penutupan Lahan Vegetasi	78
Tabel 7. Jumlah Belanja Bibit Tanaman 2017 Kabupaten Demak	80
Tabel 8. Data Jumlah Pohon Trembesi yang Tertanam	93
Tabel 9. Kendala Pelaksanaan Progam Penanaman Trembesi.....	113
Tabel 10. Kerangka Konseptual <i>Corporate Social Responsibility</i> melalui Analisis Domain.....	123
Tabel 11. Analisis Taksonomi Peran <i>Stakeholders</i> dalam Sinergitas Program Penanaman Trembesi	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Aspek Pembangunan Berkelanjutan	22
Gambar 2. Hubungan Tiga Domain dalam <i>Governance</i>	30
Gambar 3. Tahapan Penelitian Spradley	56
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak	68
Gambar 5. Struktur Organisasi Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation	73
Gambar 6. Proses Perumusan Perencanaan antara PT Djarum dan Pihak Pemerintah.....	82
Gambar 7. Proses Pelaksanaan Program Penanaman Trembesi	92
Gambar 8. Penanaman trembesi oleh Pemerintah Demak, pihak PT Djarum Foundation dan Masyarakat	101
Gambar 9. Tabel Seremonial Peresmian Program Penanaman Trembesi Jalur Pantura dari Kudus Hingga Semarang	101
Gambar 10. Penyiraman dalam Rangka Perawatan Pohon Trembesi.....	105
Gambar 11. Pemangkasan dalam Rangka Perawatan Pohon Trembesi	105
Gambar 12. Tiang Penyangga yang diambil oleh Masyarakat	112
Gambar 13. Bibit Trembesi yang Dimakan oleh Hewan Ternak.....	113
Gambar 14. Normalisasi Sungai dengan Alat Berat	117
Gambar 15. Galian yang Mengganggu Akar Trembesi	117
Gambar 16. Analisis Pikiran Peneliti	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan memiliki dua unsur penting yaitu unsur biotik dan abiotik. Dimana unsur biotik merupakan unsur yang bernyawa seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Sementara unsur abiotik merupakan unsur yang tak bernyawa seperti tanah, air, udara, cahaya dan lainnya. Di Indonesia, terdapat unsur biotik yang beraneka ragam terutama pada tumbuhan. Luasnya daerah di Indonesia tersebut juga membuat keaneka ragaman tersebut yang membuat Indonesia menjadi memiliki daya tarik dimata internasional. Tetapi daya tarik tersebut tidak diimbangi dengan perencanaan lingkungan yang berkelanjutan sehingga menyebabkan banyak lingkungan yang rusak karena disebabkan oleh berbagai macam masalah.

Persoalan-persoalan yang mengancam kelestarian lingkungan sangat luas dan beragam misalnya pemanasan bumi, penipisan lapisan *ozone*, penjarahan hujan tropik yang akan mencapai sangat kritis pada puluh tahun mendatang dan persoalan ini secara langsung dipengaruhi oleh populasi manusia yang terus bertambah besar. (Mulyanto, 2007:10). Karena tidak dipungkiri bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua hal yang sangat mendasar yaitu adanya bencana alam yang termasuk peristiwa alam dan adanya kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Dengan maraknya bencana alam yang disebabkan oleh manusia, maka terbukti bahwa belum terselenggarakannya etika lingkungan yang sesuai.

Menurut Ginting dalam Nuryana (2012:29) etika lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang menitik beratkan hubungan manusia dan lingkungannya, yang tak dapat dipisahkan dari status moral dari makhluk hidup dan tak hidup. Pendapat tersebut menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan bukan hanya terjadi dalam konteks dunia saja melainkan ikut menyertakan etika yang berkembang dalam lingkungan. Hubungan tersebut dalam sudut pandang ekologi sudah mulai tidak sesuai dengan hakikat yang ada. Pandangan *antroposentrisme* menyatakan bahwa manusia dianggap lebih penting keberadaannya dibandingkan oleh kehadiran lingkungan. Kejadian tersebut tercermin banyak manusia yang justru menghancurkan ekosistem lingkungan dan tidak dapat menjaga lingkungan dengan baik. Krisis lingkungan tersebut menumbuhkan suatu pemikiran etika lingkungan baru untuk menanggapi kejadian krisis lingkungan yang disebabkan oleh kesalahan pandangan fundamental dari manusia terhadap alam maupun adanya ketimpangan hubungan antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mampu membuat standarisasi dari pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang ini diwujudkan karena dirasakan kerusakan lingkungan makin menjadi, sehingga perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan

lingkungan akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan (Purnaweni, 2014). Dengan ini maka upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dianggap serius dan ingin membuat lingkungan yang ada di Indonesia menjadi berkelanjutan.

Dalam menciptakan suatu lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan dengan peraturan, maka dibutuhkan sinergitas dari aktor-aktor yang terkait dengan perwujudan tujuan tersebut. Jika memakai konsep dari Teori *Governance*, maka sinergitas yang dimaksud akan melibatkan pihak swasta, pemerintah dan masyarakat madani dengan mengkomparasikan dengan unsur lingkungan alam sebagai tema dari judul penelitian. Masing-masing *stakeholders* memiliki perannya masing-masing dalam melaksanakan kewajiban. Unsur lingkungan alam dimasukkan dengan tujuan untuk memberikan inovasi dan subsistem tambahan karena pusat penyeimbang antara *stakeholders* diatas.

Tetapi pada prakteknya, *stakeholder* justru memutar balikkan kewajiban mereka dengan memberikan efek negatif dengan menjadi aktor perusak lingkungan. Berikut merupakan data beberapa aktor yang menjadi penyumbang kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu :

Tabel 1. Aktor Perusak/Pencemar Lingkungan Hidup

	<i>Frequency</i>	<i>Precent</i>	<i>Valid Precent</i>	<i>Cumulative Precent</i>
Perusahaan	91	31.4	39.4	39.4
Pemerintah	26	9.0	11.3	50.6
Masyarakat	6	2.1	2.6	53.2
Perusahaan dan Pemerintah	66	22.8	28.6	81.8
Kombinasi	42	14,5	18.2	100.0
Total	231	79,7	100.0	

Sumber : Walhi, 2012

Dari data diatas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki presentase 39,4% dimana jumlah tersebut merupakan presentase yang tertinggi sebagai aktor perusak lingkungan hidup. Angka tersebut juga belum termasuk perusahaan yang memiliki sinergitas pemerintah atau perusahaan berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki presentase 28,6% atau memiliki peringkat kedua tertinggi sebagai aktor perusak lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga memiliki persentase yang tidak jauh banyak untuk aktor penyumbang kerusakan. Dalam pembahasan diatas artinya bahwa mayoritas kerusakan lingkungan alam disebabkan oleh perusahaan. Ini artinya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan telah memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam menyikapi hal tersebut maka munculah paham tentang bagaimana cara untuk membuktikan bahwa peran swasta bukan menjadi suatu badan yang hanya memikirkan tentang laba tetapi dapat bersinergi terhadap dua unsur lain untuk menciptakan suatu faham akan cita-cita yang sudah ada di negara. Peran swasta lebih kepada mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan penggunaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). CSR merupakan komitmen dari pelaku bisnis untuk menyiasati keberlangsungan perusahaannya dengan memikirkan semua komponen yang akan berdampak pada masa sekarang ataupun masa depan, salah satunya adalah dengan berkontribusi maupun bersinergi dengan masyarakat maupun pemerintah guna menciptakan hal yang bermanfaat bagi bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Perseroan Terbatas tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial. Anggaran yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut disesuaikan dengan angka kewajaran dan kepatutan. Anggaran tersebut bertujuan juga untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraannya.

Untuk mendapatkan kesejahteraannya, masyarakat memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan program CSR tersebut. Tetapi pada kenyataannya penyebaran anggaran dari program CSR tersebut belumlah merata. Di dalam riset yang ditulis mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan CSR juga diukur seberapa besar proses pengaktualisasian dari jumlah kegiatan dan jumlah dana yang dikeluarkan perusahaan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kegiatan CSR yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan tingkat aktualisasi jumlah kegiatan dan dana yang dikucurkan sebagai berikut :

Tabel 2. Kegiatan CSR yang Dilakukan di Indonesia

No.	Sektor Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pelayanan Sosial	95 (34,1%)	38 miliar (33,0%)
2.	Pendidikan dan Penelitian	71 (25,4%)	66,8 miliar (57,9)
3.	Kesehatan	46 (16,4%)	4,4 miliar (3,8%)
4.	Kedaruratan	30 (10,8%)	2,9 miliar (2,5%)
5.	Lingkungan	15 (5,4%)	395 juta (0,3%)
6.	Ekonomi Produktif	10 (3,6%)	640 juta (0,6%)
7.	Seni, Olahraga dan Pariwisata	7 (2,5%)	1 miliar (0,9%)
8.	Pembangunan Prasarana dan Perumahan	5 (1,8%)	1,3 miliar (1%)
9.	Hukum, Advokasi dan Politik	0	0
	Jumlah Total	279 kegiatan	115,3 miliar

Sumber : Tim Universitas Katolik Parahyangan dalam Rusdianto (2013:17)

Rincian diatas menunjukan bahwa belum meratanya perwujudan sektor-sektor kegiatan dari CSR di beberapa sektor. Memang tidak salah karena masing-

masing sektor mempunyai tingkat kolektivitas dan keperluan yang mendesak. Jumlah kegiatan mayoritas dikuasai oleh sektor pelayanan sosial dengan angka 34,1% karena memang permasalahan dari pemerintah memanglah pelayanan sosial yang buruk dan sektor swasta menawarkan pelayanan sosial yang lebih kompeten sehingga masyarakat lebih menghargai.

Salah satu yang belum mendapatkan perhatian dalam penggunaan CSR adalah dalam sektor lingkungan. Pengaplikasian anggaran untuk kegiatan melestarikan lingkungan menjadi peringkat terakhir dengan dana sekitar 395 juta rupiah atau hanya mendapatkan 0,3% dari jumlah total dana CSR yang dikeluarkan perusahaan di Indonesia. Walaupun tak sedikit kegiatan yang dilaksanakan tetapi data di atas juga memnberikan peringatan bahwa pemerataan sektor dalam penggunaan anggaran dalam bentuk pelaksanaan kegiatan sangatlah dibutuhkan.

Banyak unsur lingkungan yang membutuhkan penanganan yang lebih untuk memberikan efek keberlanjutan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam menghentikan praktek kerusakan lingkungan hidup ini adalah dengan penataan ruang agar apa yang direncanakan tentang tata ruang lingkungan terpola dengan baik. Menurut UU Nomor 26 tahun 2007 pasal 17 tentang penataan ruang mengatakan bahwa :

1. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
6. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Langkah dalam pelestarian lingkungan alam diatas mengatakan bahwa pentingnya menjaga dan mengelola jalur hijau sebagai modal bagi suatu daerah untuk menjaga stabilitas udara maupun menjaga persentase tumbuhan hijau yang tumbuh di daerah tersebut. Pembuatan ruang terbuka hijau tersebut tidak selalu diidentikkan dengan pembuatan taman saja, melainkan juga mencakup kegiatan lain seperti pembibitan tanaman, penanaman pohon di tepi jalan dan sebagainya.

PT Djarum Foundation Kudus dengan slogannya “Lahir dari Dalam dan Berkembang Bersama Lingkungan” memiliki cita-cita mulia dengan memanfaatkan sumber daya manusia semaksimal mungkin dan mempertahankan kelestarian dari sumber daya alam yang sangat kaya dari Indonesia. Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono awalnya hanya memberikan bantuan dengan mengadakan aktivitas sosial tanpa adanya kejelasan atas asas keberlanjutan, sehingga pada 30 April 1986 akhirnya beliau menggagas Djarum Foundation sebagai upaya menjadikan negara yang digdaya karena keanekaragamannya sekaligus menjadi negara yang disegani karena memiliki sumber daya yang melimpah. Hal tersebut diwujudkan secara nyata dengan keseriusan akan meretas keprihatian mereka akan sumber daya yang melimpah

tetapi tidak dimanfaatkan dengan sempurna tetapi dengan adanya sistem keberlanjutan sehingga bukan hanya menghasilkan *output* tetapi menghasilkan *outcome*.

Dengan dasar Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pasal 7 yang mengatakan :

- 1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- 2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Maka PT Djarum Foundation memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan masyarakat yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap mereka dengan menyatukan unsur-unsur diatas agar dikombinasikan menjadi suatu kesatuan yang saling bersinergi. Bagi mereka keberadaan masyarakat memiliki peran penting dalam jalannya bisnis yang dilakukan. Selain ingin mewujudkan tanggung jawab sosial yang bersifat berkelanjutan, PT Djarum Foundation juga ingin pengimplementasian dari program ini untuk menerapkan efek lingkaran emas dimana perusahaan berseinerji dengan komponen lain seperti masyarakat (ekonomi, sosial dan lingkungan) serta pemerintah dapat meningkatkan kualitas dari pembangunan sosial terutama di daerah. Dengan ketentuan pelaksanaan wajib bagi perusahaan untuk menggunakan anggaran CSR yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka kebebasan dalam berfikir akan

aktivitas sosial semakin layak untuk diwujudkan demi menunjang kegiatan yang telah menjadi konsep utama dari PT Djarum Foundation. Bahkan PT. Djarum Foundation membagi dana CSR mereka ke beberapa sektor seperti Bakti Sosial, Bakti Olahraga, Bakti Lingkungan, Bakti Pendidikan dan Bakti Budaya.

Kegiatan dalam bakti lingkungan tersebut lebih kepada dilatar belakangi oleh keprihatinan dari PT. Djarum Foundation terhadap lingkungan rusak yang disebabkan oleh ulah manusia, polusi, pemanasan global dan sebagainya. Padahal tanpa disadari lingkungan merupakan suatu elemen penting dalam dunia untuk menjaga keseimbangan kebutuhan di dunia akan penciptaan udara yang bersih serta menciptakan iklim yang baik bagi mahluknya. Titik awal inisiatif ini adalah ketika melihat kenyataan bahwa Kota Kudus menjadi kota gersang dengan kurangnya penghijauan (www.djarumtreesforlife.org). Oleh karena itu PT Djarum Foundation memiliki pikiran bahwa ingin mengaplikasikan aktivitas sosial tersebut dengan membuat Kudus menjadi lebih hijau dan ditumbuhi dengan bunga. Tidak berhenti sampai disana, tetapi sistem tetap bersifat keberlanjutan dan berkesinambungan sehingga pengembangan untuk aktivitas sosial ini dapat dirasakan oleh daerah lain yang sedang terus digalakkan. Beberapa program yang menjadi konsen dari PT Djarum Foundation adalah Pusat Pembibitan Tanaman, Penanaman Trembesi, Konservasi Lereng Muria, dan Konservasi Pantai. Salah satu yang yang dimuat dalam program Bakti Lingkungan Kudus adalah Penanaman Trembesi. Tujuan dari penanaman trembesi adalah untuk mengurangi karbondioksida yang dihasilkan dari polusi kendaraan terutama yang berada di Jalur Pantura (Pantai Utara) yang memiliki polusi udara yang memprihatinkan.

Namun pengimplementasian dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility PT Djarum Foundation ini memiliki hambatan dengan kurangnya koordinasi diantara *stakeholder* yang mendukung program tersebut. PT Djarum Foundation selaku penggerak dari peran swasta dalam teori *governance* seperti melakukan upaya yang mendominasi dengan mengelola dan mengembangkan program tersebut sendiri. Peran dari pemerintah tidak hanya lebih dari sekedar pemberi ijin dalam pelaksanaan program tersebut. Jika melihat Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mengatakan bahwa kapasitas dari pemerintah juga ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Kemudian dari sisi masyarakat hanya mengikuti acara tentang peluncuran program acara tersebut tanpa adanya keberlanjutan peran dari masyarakat sendiri.

Peneliti memilih lokasi di PT. Djarum Foundation Kudus karena pertimbangan latar belakang dan ingin mengetahui seberapa jauh peran dari masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan tugas yaitu program *Corporate Social Responsibility* yang salah satunya berbasis lingkungan. Sehingga membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam aspek indikator terhadap perencanaan dengan segi sinergitas yang baik. Dari sana pula akan tergambar jelas upaya yang dilakukan guna untuk membentuk lingkungan yang lebih baik sebagai upaya membuat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik kembali. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Sinergitas Stakeholders Melalui Program Corporate Social Responsibility Berbasis Lingkungan** (Studi pada Program Penanaman Trembesi Kudus-Semarang PT. Djarum Foundation Kudus)”

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran setiap *stakeholders* dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis lingkungan oleh PT. Djarum Foundation Kudus?
2. Apakah wujud sinergitas dari setiap unsur *stakeholders* dalam melakukan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Djarum Foundation Kudus berbasis lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Secara rinci akan dijabarkan tentang tujuan dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dari masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis lingkungan oleh PT. Djarum Foundation Kudus; dan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis wujud sinergitas dari setiap unsur *stakeholders* dalam melakukan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Djarum Foundation Kudus berbasis lingkungan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengetahuan dalam mengetahui peran dari masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berbasis lingkungan dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada.
- b. Sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang prespektif *Corporate Social Responsibility* dalam sinergitas antar *stakeholders*.
- c. Menambah pengalaman sebagai generasi muda untuk dapat mengetahui kenyataan yang terjadi dengan terjun langsung ke lapangan.

Bagi Fakultas

- d. Sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan terkait untuk evaluasi program yang berjalan tentang kesesuaian dengan yang kebutuhan dari masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan mengenai perbaikan dalam pelaksanaan sinergitas antar *stakeholders* yang terkait dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berbasis lingkungan oleh PT. Djarum Foundation.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam skripsi ini masing-masing terdiri dari 5 bab dimana antara lima bab tersebut memiliki keterkaitan antar bab. Penulisan sistematika ini telah dibagi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang dimana meliputi penjelasan tentang sebab penulis memilih judul “Sinergitas *Stakeholders* Melalui Program *Corporate Social Responsibility* Berbasis Lingkungan (Studi pada Program Penanaman Trembesi Kudus-Semarang PT. Djarum Foundation Kudus)” disertai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan disajikan tentang menghubungkan antara teori yang diambil dengan masalah pembahasan yang diambil oleh peneliti yang bertujuan untuk pemecahan suatu masalah dengan mensinkronkan antara teori dan masalah. Teori-teori yang disajikan dalam bab ini akan terdiri dari Administrasi Publik, Sinergitas *Stakeholder*, Teori *Corporate Social Responsibility* dan Etika Lingkungan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab yang menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, instrumen penelitian dan analisis

data. Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif yang berfungsi untuk menjelaskan secara nyata keadaan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan kalimat dan kata-kata. Peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam mengerjakan metode penelitian yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan tentang hasil penelitian lapangan dari peneliti yang disajikan sesuai dengan yang terjadi lapangan tanpa adanya rekayasa. Bab hasil dan pembahasan akan berisi tentang gambaran umum dari masing-masing *stakeholders*, penyajian data tentang data wawancara serta dokumentasi dan analisis data tentang perbandingan antara teori dan kejadian yang terjadi di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menyajikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain kesimpulan juga disertakan saran dari peneliti melihat penelitian yang terjadi dan merekomendasikan beberapa saran untuk menjadi masukan bagi masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan program terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai kegiatan yang bersifat rasional dan sistematis yang berguna untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan. Administrasi publik juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan yang tercipta antara pemerintah dan masyarakat yang mencakup berbagai bagian dalam memberi tanggapan akan kebutuhan yang dibutuhkan untuk dapat diwujudkan dengan sistem yang teratur agar tercipta keefektifan dan keefisienan. Menurut Henry (1988:31) terdapat tiga pilar penting dalam perwujudan administrasi publik yaitu :

- a. perilaku organisasi dan perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi;
- b. teknologi manajemen dan institusi-institusi implementasi kebijakan;
- c. kepentingan publik yang terkait dengan pilihan etis setiap individu dan masalah-masalah publik.

Pandangan serupa mengatakan bahwa administrasi publik juga dapat diartikan sebagai proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Keban, 2004:3) dapat dikatakan bahwa peran dari *stakeholders* menjadi penting karena

memiliki kewenangan dan keahlian dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. *Stakeholders* juga memiliki bagian masing-masing dalam menanggapi suatu permasalahan publik.

Pengertian administrasi publik memiliki arti luas jika dipandang dengan perspektif berbeda. Menurut Felix A. Nigro dalam Pasolong (2007:21) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki definisi yaitu:

- a. Usaha kerjasama yang dilakukan suatu kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
- b. Meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan serta hubungan diantara mereka;
- c. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
- d. Sangat erat berkaitan dalam berbagai macam kelompok swasta dan peorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi privat.

Perwujudan peran dari administrasi publik perlu dibutuhkan penciptaan situasi demokrasi yang teratur. Menurut Frederick A. Cleceland dalam Keban (2004:15), penting perannya dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan situasi demokrasi dimana administrasi menjalankan tugasnya yakni memberikan pelayanan publik dengan memberikan dan menciptakan demokrasi atau biasa disebut *organized democracy*. Pemberian layanan publik diatas dapat dikaitkan membangun situasi ekonomi yang meningkat, adanya pembangunan keberlanjutan dalam membentuk sumber daya manusia maupun alam, membangun sistem sosial, politik dan budaya.

2. Good Governance

Good Governance diartikan sebagai sebuah sistem yang transparan, akuntabel, adil, demokratis, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, dalam hal ini terdapat lima prinsip yang mendukung *good governance* dan perubahan yang diusulkan di dalam *Paper Putih Eropa* yaitu keterbukaan partisipasi, akuntabilitas, efektifitas, dan jaringan atau kemitraan. *Good Governance* berbicara mengenai sebuah proses penyelenggaraan pembangunan yang solid yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemerintah sebagai peran sentralnya.

Dari hal diatas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya *Good Governance* berbicara mengenai sebuah konsepsi mengelola sumberdaya yang ada dengan pembangunan masyarakat guna menciptakan sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini semata-mata dilakukan tidak lain untuk sebuah kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.

Menurut Adisasmita (2015:46) *Good Governance* memiliki beberapa karakteristik yang menggambarkan tentang perwujudan dari pemerintah yang baik, karakteristik tersebut adalah :

- a. Partisipasi, setiap masyarakat haruslah memiliki hak untuk bersuara dalam sebuah pengambilan keputusan, baik itu secara langsung dengan dialog dengan para pemangku kepentingan.
- b. Peraturan Hukum, bahwasanya setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum
- c. Transparansi, ketika berbicara menengai transparansi maka dalam hal ini, pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi, artinya di sini informasi dapat dipahami dan dimonitor.
- d. *Responsiveness*, pemerintah harus sigap dalam melayani masyarakat ataupun *stakeholder* lainnya
- e. *Consensus orientation*, menjadi sebuah perantara kepentingan untuk menghasikan pilhan terbaik bagi kepentingan masyarakat.
- f. *Equity*, semua warga negara berhak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka
- g. Efektifitas dan Efisiensi. Bahwasanya pemerintah haruslah mampu mengelola sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.

- h. Akuntabilitas, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, *private sector*, ataupun *civil society* harus dapat mempertanggung jawabkan keputusannya.
- i. Visi Strategis, para *stakeholder* haruslah memandang ke depan untuk melihat apa yang diperlukan dalam sebuah pembangunan.

Peneliti ingin memfokuskan pada poin ke sembilan, dimana para *stakeholder* haruslah memandang ke depan untuk melihat yang diperlukan dalam suatu pembangunan. Dapat diartikan di sini bahwa para *stakeholder* haruslah mampu bekerjasama dengan baik antar satu dengan yang lainnya dan merencanakan sebuah program pembangunan. Kunci pembangunan ini berada pada pengaplikasian program *Corporate Social Responsibility*. Swasta tidak bekerja sendiri melainkan mereka mempunyai domain lain sebagai pendukung program *Corporate Social Responsibility* tersebut yaitu sektor pemerintah dan masyarakat serta akademika. Perlu adanya persamaan persepsi di antara domain tersebut agar mempunyai satu tujuan yang rasional untuk dilaksanakan. Menurut peneliti, masalah utama berada pada kurangnya sinergitas dari para *stakeholder* karena mempunyai kepentingan sendiri di dalam kebijakan yang dibuat. Oleh karenanya para *stakeholder* harus mengembangkan visi strategis untuk pembangunan ke depannya.

Upaya dalam penerapan *Governance* terdapat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menciptakan *Good Governance* yaitu :

- a. Interaksi, dalam hal ini perlu adanya interaksi yang baik antar *stakeholders* atau kelompok kepentingan dalam *good governance* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- b. Komunikasi, setiap *stakeholder* harus berkomunikasi dengan baik antar satu dengan yang lainnya dalam proses pengelolaan sumber daya yang ada
- c. Dinamis, hubungan antara aktor-aktor yang ada haruslah dinamis sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik untuk sebuah pembangunan baik dalam hal ekonomi, sosial ataupun politik

- d. Saling ketergantungan, antar *stakeholders* saling bergantung satu sama lainnya karena memiliki perannya masing-masing

Ketika berbicara mengenai prinsip dalam *Good Governance*, Peneliti mencoba untuk lebih memfokuskan penelitian terhadap empat prinsip di atas. Arti dari pernyataan tersebut adalah untuk mencapai sebuah pembangunan yang diinginkan, maka masing-masing *stakeholder* harus menjalin sinergi, maka dari itu interaksi perlu dilakukan antar *stakeholder* untuk menjalin komunikasi yang intens dan dinamis, sehingga dapat menciptakan program yang saling bersinergi satu sama lain dalam pembangunan berkelanjutan. *Stakeholder* ini juga saling ketergantungan satu sama lainnya, dikarenakan setiap *stakeholder* memiliki peranannya masing-masing. Ketika para *stakeholder* tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tidak mungkin program lingkungan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya penting sekali interaksi karena merupakan cara awal untuk melakukan sinergitas *stakeholder* untuk membuat program terpadu dalam program CSR berbasis lingkungan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Upaya dalam mengelola tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa menjadi misi dari suatu negara untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik. Dalam melaksanakan usaha tersebut maka perlu adanya peran serta dari beberapa pihak dalam proses pembangunan. Intinya bahwa pembangunan dalam suatu negara diperlukan suatu sinergitas dari berbagai pihak seperti masyarakat, swasta maupun pemerintah dan bukan hanya bergantung terhadap proses politik dalam memberikan kebijakan. Nantinya jika

sinergitas ini terjalin, maka pembangunan tersebut akan memiliki prospek berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan suatu negara dengan prospek berkelanjutan dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk diolah dan sumber daya manusia untuk diberdayakan yang dampaknya akan memberi manfaat terhadap generasi selanjutnya. Lebih lanjut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pada pernyataan tersebut, tersirat bahwa pemerintah menginginkan adanya perubahan konsep baru dimana konsep tersebut merubah aspek yang dipakai sebelumnya, yang hanya terpaku pada ekonomi dan sosial. Pemerintah ingin menambahkan aspek lingkungan sebagai aspek lanjutan. Alasan dari penggunaan lingkungan hidup masuk akal karena mengingat lingkungan hidup dapat menentukan pembangunan berkelanjutan dari suatu program yang dijalankan. Pernyataan tersebut didukung dengan pemikiran Sugandhy (2007) yang mengatakan bahwa pola pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana. Artinya bahwa kapasitas lingkungan hidup memang besar dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, tetapi pemanfaatan dari sumber daya tersebut harus digunakan

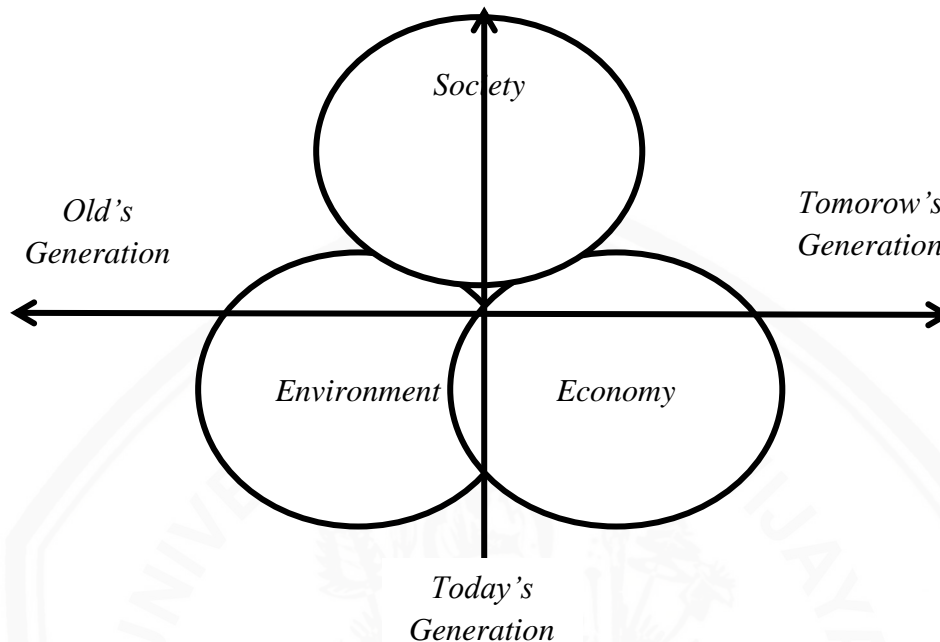
secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

Jika pembangunan berhasil dilakukan memang pekerjaan rumah selanjutnya adalah membuat pembangunan tersebut memiliki program tahapan-tahapan perkembangan yang pasti sehingga nantinya pembangunan tersebut akan bersifat berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diperlukan komitmen dasar dari elemen-elemen *stakeholder* yang ada di dalamnya sehingga memunculkan sistem yang terpadu dan dapat diteruskan oleh penerus generasi kita. Diperlukan juga strategi-strategi baku yang memiliki kekuatan jangka panjang sebagai aset dari pembangunan tersebut. Menurut Hegley dalam Sugandhy (2007:21) mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki kandungan pengertian dari strategi imperatif sebagai berikut :

- a) Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan lingkungan, sosial dan ekonomi;
- b) Memperhatikan batas-batas lingkungan dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
- c) Perlunya campur tangan dari pemerintah, dukungan dan kerjasam dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
- d) Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat antara yuridis politik terkait pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup; dan
- e) Bergantung pada pendidikan, perencanaan dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.

Menurut Sugandhy (2007:22-23) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar penting yang dituangkan dalam Deklarasi Stockholm 1972 sampai Rio de Janeiro 1992, menekankan bahwa perlunya koordinasi dan integrasi dalam setiap pembangunan nasional, pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek

sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut. Tiga pilar tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Von Stokar et. al dalam Sugandhy (2007:22)

Model aspek pembangunan berkelanjutan diatas memiliki kesamaan dengan pemikiran dari Elkington, dimana beliau menerapkan model *triple bottom line*. Model tersebut menyebutkan bahwa skema yang dirancang tersebut tetap merujuk terhadap tiga lingkup yang sama yaitu lingkup sosial, lingkup ekonomi dan lingkup lingkungan. Model tersebut atau model aspek pembangunan yang terdapat pada gambar di atas menjadi dasar dari sinergitas yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Dimana ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan.

B. Sinergitas *Stakeholders*

1. Konsep Sinergitas

Sinergi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gabungan, dengan kata lain istilah sinergi di sini bisa diartikan sebagai suatu proses kerjasama. Menurut Podungge (2009) bersinergi diartikan segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan memerlukan koordinasi yang baik, perasaan saling memberi, saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang telah disepakati bersama. Sinergi dilakukan oleh beberapa kelompok yang terlibat untuk dapat menciptakan suatu suasana yang kondusif dalam melaksanakan program yang sedang dijalankan. Dibutuhkan suatu standart tertentu sebagai syarat bagaimana suatu pelaksanaan perjanjian atau kerjasama dikatakan bersinergi. Menurut Susanto dalam Hamsa (2015:36) menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat untuk sebuah kerjasama yang terjalin dari masing-masing *stakeholders* dapat dikatakan sinergi adalah :

- a. *Take and give*, syarat ini berlandaskan kesadaran dari masing-masing *stakeholders* memiliki kedudukan yang sama. Setiap *stakeholders* dituntut untuk dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada *stakeholders* untuk menjaga stabilitas dari kegiatan yang dijalankan.
- b. Adanya kejujuran, syarat ini menjadi syarat dasar dari sinergi yang terjalin karena dari suatu pihak ada yang berperilaku jujur maka akan menimbulkan kecurigaan dan ketidak seimbangan dalam sinergitas tersebut.
- c. Adanya sikap saling menghargai, sikap yang harus dimiliki dari setiap *stakeholders* agar mengandung kesamarataan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan menyelesaikan masalah dengan menghargai setiap sudut pandang yang diberikan dari setiap *stakeholders*.

Selain syarat yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang sangat penting dalam sinergi yaitu terdapat dua pihak atau lebih, kemudian yang kedua saling berinteraksi satu sama lainnya dan yang terakhir adanya kesatuan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Unsur tersebut menyatakan bahwa terdapat banyak unsur yang dapat membuat kesinergian tersebut dapat terbentuk. Unsur tersebut menjelaskan bahwa sinergi dapat dibentuk karena adanya satu pemikiran yang ditimbulkan oleh aktor-aktor di dalam suatu instansi untuk membentuk suatu sistem yang terintegrasi sehingga membentuk suatu kesepakatan dalam menentukan suatu keputusan. Konsep sinergi menjelaskan bahwa masing-masing aktor tidak dapat memaksakan kehendak ataupun bertindak tak sesuai dengan kesepakatan tersebut karena dapat mengganggu kestabilan dari aktor-aktor yang lain. Perlu adanya cara untuk membuat sinergi tersebut menjadi lebih terbangun dengan baik yaitu komunikasi dan koordinasi.

a. Komunikasi

Pengertian dari komunikasi sebagai alat penghubung dari beberapa orang untuk dapat berinteraksi langsung maupun tak langsung, maka Seiler (dalam Muhammad, 2014:19-22) menyatakan bahwa ada empat prinsip dasar dari komunikasi, yaitu:

- 1) Komunikasi adalah Suatu Proses
Dapat diartikan sebagai sesuatu proses karena merupakan suatu seri kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi juga melibatkan suatu variasi saling berhubungan yang kompleks yang tidak pernah ada duplikat dalam cara yang persis yaitu saling berhubungan diantara orang, lingkungan, keterampilan, sikap, status, pengalaman dan perasaan, semua menentukan komunikasi yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Jadi komunikasi tersebut selain dapat berubah-ubah juga dapat menimbulkan perubahan.
- 2) Komunikasi adalah Sistem

Komunikasi terdapat dari beberapa komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugas masing-masing. Tugas dari masing komponen berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa antara satu komponen dengan komponen lain saling berkaitan dan bila terdapat gangguan pada satu komponen akan berpengaruh pada proses komunikasi secara keseluruhan.

3) Komunikasi Bersifat Interaksi dan Transaksi

Komunikasi yang dimaksud dengan istilah interaksi adalah saling bertukar komunikasi. Seorang yang melemparkan dan yang lainnya menangkap kemudian yang menangkap melemparkan kembali kepada si pelempar pertama. Sementara dalam komunikasi transaksi dapat dicontohkan dengan banyak dalam percakapan tatap muka kita terlibat dalam proses pengiriman pesan secara stimulan tidak terpisah.

4) Komunikasi Dapat Terjadi Disengaja maupun Tidak Disengaja

Komunikasi yang disengaja terjadi apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu di kirimkan kepada penerima yang dimaksud. Tetapi apabila pesan yang tidak sengaja dikirimkan atau tidak dimaksudkan untuk orang tertentu untuk menerimanya maka itu dinamakan komunikasi tidak sengaja.

b. Koordinasi

Upaya penyelarasan keberhasilan komunikasi dalam kegiatan sinergitas *stakeholder*, maka harus bersamaan dengan adanya koordinasi. Koordinasi mempunyai peran penting dalam menyatupadankan kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan untuk mencapai keinginan masing-masing aktor. Menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39) menjelaskan bahwa ada sembilan syarat agar dapat tercipta suatu koordinasi yang efektif, syarat tersebut adalah :

1) Hubungan Langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan saling paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang metode apapun lainnya.

2) Kesempatan Awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan melaksanakan fungsinya.

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain, koordinasi itu jangan kaku

5) Tujuan yang Jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik di antara kepala-kepala bagian.

7) Perumusan Wewenang dan tanggung jawab jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat untuk koordinasi yang baik. Melalui komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan dapat dihindarkan dan kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju pelaksanaan tujuan perusahaan yang telah diacantumkan.

9) Kepemimpinan dan supervisi yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

2. Konsep Stakeholders

Jika kita mengenal *Good Governance*, maka akan terdapat tiga pilar utama *stakeholders* yang dapat berinteraksi dalam menjalankan tugasnya masing-masing yakni pemerintah (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Menurut Biset dalam Nawawi (1998) mengartikan bahwa *stakeholder* sebagai orang atau sekelompok orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada suatu

masalah. Intitusi pemerintah memiliki fungsi sebagai sektor yang memiliki tanggung jawab penciptaan lingkungan politik dan hukum yang bersifat kondusif, kemudian sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam membentuk interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk di dalamnya mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Hetifah, 2009:29)

Berdasarkan posisi sentral dan kekuatan dari masing-masing *stakeholders* untuk menanggapi suatu isu, maka *stakeholders* akan dibagikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. *Stakeholder* Utama
Diartikan sebagai *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dalam suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti tokoh masyarakat yang akan bertanggung jawab langsung dalam pengambila dan implementasi program, ataupun perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam mendalanai implementasi program;
- b. *Stakeholder* Pendukung
Stakeholder yang tidak memiliki kaitan penting secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program, namun memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap suatu masalah tertentu sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Contoh dari *stakeholder* pendukung antara lain: lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab secara langsung; Lembaga Swadaya Masyarakat; dan Perguruan Tinggi.
- c. *Stakeholder* Kunci
Stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif, dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program. Misalkan *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan program dalam level kabupaten yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten, dan Dinas yang membawahu langsung proyek yang bersangkutan (hmp_humas_USAHID, 2008)

3. *Stakeholder dalam Teori Governance*

Seperti beberapa konsep dalam ilmu sosial, *governance* memang bukan bahasan yang baru untuk dapat dibahas. Istilah ini menjadi lebih populer ketika Bank Dunia “menemukan kembali” *Governance* di dalam laporan Bank Dunia Tahun 1989. Perbedaan yang mendasar tentang perbedaan dari *Government* (pemerintahan) dan *Governance* (pemerintah) adalah jika pemerintahan lebih condong terhadap keberhasilan dalam menerapkan fungsi yang ditugaskan dalam mengelola administrasi pemerintahan, sementara pemerintah lebih kepada unsur-unsur penggerak dari pemerintahan tersebut menjadi suatu pola yang terpadu sehingga hubungan yang teratur terhadap elemen-elemen yang terkait. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sedarmayanti (2004:2) bahwa :

“*Government* dapat diartikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian kota dan sebagainya. Sementara *Governance* adalah serangkaian proses interaksi sosial politik yang dilakukan antara pemerintahan dan masyarakat dalam bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”

Penggunaan istilah *governance* memberi sinyal pendekatan baru untuk pertumbuhan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kemakmuran ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa aturan hukum dan demokrasi. Menurut Kooiman (Bovaird, 2003: 165) *governance* diartikan sebuah pola atau struktur yang muncul didalam sistem sosial politik sebagai sebuah hasil dari usaha intervensi dari semua aktor yang terlibat. Pola ini tidak dapat diturunkan kepada (hasil yang dibuat oleh) satu aktor atau kelompok dari aktor yang lain. Sedangkan, menurut *Canadaian Institute on Governance* (dalam Bovaird, 2003:165) *Governance* terdiri dari budaya, institusi, dan proses yang menentukan bagaimana kekuasaan

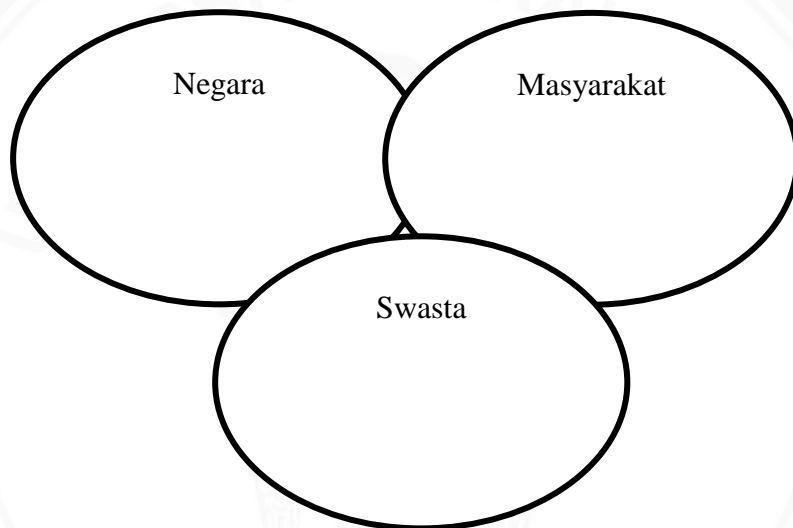
dilaksanakan, bagaimana masyarakat diberi hak suara, dan bagaimana keputusan dibuat dalam isu-isu dari usuran publik.

Menurut Stoker dalam Kurniawan (2007) menyatakan bahwa terdapat lima proposisi mengenai *governance* yaitu:

- a. *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya dari pemerintah.
- b. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab atas tugas dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi;
- c. *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi yang kolektif;
- d. *Governance* adalah membahas tentang self-governing yang otonom dari masing-masing aktor; dan
- e. *Governance* menyadari untuk memperbaiki keadaan dan tidak perlu bergantung terhadap kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

Masalah klasik untuk membangun suatu pemerintah yang baik yaitu tentang kondisi dari institusi pemerintah bukan menjadi satu-satunya masalah yang terjadi. Tetapi unsur lain seperti unsur masyarakat menjadi salah satu kondisi yang diperhatikan karena masyarakat memiliki berbagai kelompok dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Cara yang diambil dalam menciptakan suatu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah dengan memaksimalkan hubungan daari sektor publik, sektor masyarakat dan sektor swasta sebagai salah satu bagian dari masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2009:280) mengemukakan bahwa unsur-unsur *stakeholders* dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Unsur Pemerintah
Konsepsi dari unsur pemerintah ini merupakan keseimbangan antara lembaga negara dalam mengatur pemerintahan. Permbagian kekuasaan lembaga negara juga berlaku hingga daerah. Lebih dari itu unsur pemerintah juga tidak dapat dipisahkan oleh unsur lainnya dalam pemerinrah. Unsur lain yang dimaksud adalah sektor swasta dan masyarakat madani.
- b. Sektor Swasta
Mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interkasi dalam sistem pasar seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani
Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.



Gambar 2. Hubungan Tiga Domain dalam Governance

Sumber : Sedarmayanti (2009:280)

Hubungan ketiga domain dalam *Governance* memiliki peran vital di masing-masing sektor. Seperti pengertian di atas bahwa ketiga domain tersebut saling bersinergi untuk mendapatkan suatu gambaran atau hasil dari suatu bahasan yang diambil. Masalahnya adalah ketika masyarakat awam menyamakan persepsi

antara *governance* dan *government*. Perihal menanggapi hal tersebut, menurut Maryam (2016:4) mengatakan bahwa :

“Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.”

Sesuai dengan pandangan di atas, peneliti dapat mengatakan bahwa teori *governance* dalam artian sinergitas dapat dijadikan sebagai alat bagi setiap *stakeholder* untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menghasilkan suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Apabila dikaitkan dengan judul, maka peneliti ingin mengetahui apakah tugas pokok dari setiap *stakeholder* sudah terlaksana dengan ketentuan akan pelaksanaan program CSR sendiri. Bagaimana kemudian swasta yang memiliki peran dominan di program ini dituntut untuk membuat dampak signifikan dengan tujuan membuat program tersebut dapat bersifat berkelanjutan.

Hubungan antara *stakeholders* terkait program yang dijalankan tidak jarang setiap *stakeholders* ingin menunjukkan perannya masing-masing. Menurut Steiner (2002:8) menyimpulkan bahwa hubungan antara swasta, pemerintah dan masyarakat memiliki peran masing-masing yakni :

1. *Society is hierarchial, and a small number of influential people and/or institutions dominate it. The business institutions is one of these, and bussiness leaders manipulate society from a fulcrum od great power in association with government.* Masyarakat secara hierarki adalah sejumlah kecil orang dan institusi yang memiliki pengaruh dan domiasi. Lembaga-lembaga bisnis adalah salah satunya, dan para pemimpin bisnis mengambil peran masyarakat dari sebuah kekuatan besar dalam hubungan dengan pemerintah.

2. *Power mainly moves down from the top levels of society. Unlike democratic theory, which postulates that leaders serve the will of the people, the social hierarchy implicit in this model implies dominance by a small group of business managers, politicians and the wealthy.* Kekuasaan bergerak turun dari tingkat atas hingga masyarakat. Tidak seperti teori demokrasi, yang mendalilkan bahwa pemimpin melayani kehendak rakyat, hierarki sosial yang tersirat dalam model ini menyiratkan dominasi oleh sekelompok kecil manajer bisnis politik dan orang terpadang.
3. *The policy-making process is dominated by the interests of business and the wealthy and is used as a tool to aggrandize the needs of these groups. Decisions are not widely consultative.* Proses pembuatan kebijakan didominasi oleh kepentingan bisnis dan orang terpadang serta digunakan sebagai alat untuk memperluas kebutuhan kelompok-kelompok ini. Keputusan tidak banyak berpengaruh.
4. *The role of business in solving and ministering to societal problems, such as housing, unemployment, pollution, income inequality, urban decay, traffic congestion, and women's rights, is paternalistic the best and exploitative at worst.* Peran bisnis dalam memecahkan dan melayani masalah-masalah kemasyarakatan, seperti perumahan, pengangguran, polusi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah kota, kemacetan lalu lintas, dan hak-hak perempuan adalah yang paling paternalistik dan paling eksploitatif.
5. *The political machinery is meshed with economic institutions, rendering any adversary relationship between business and government a fiction. A primary goal of government is to help business.* Para elit politik disatukan dengan institusional ekonomi, menjadikan setiap hubungan antara bisnis dan pemerintah menjadi fiksi. Tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk membantu bisnis.
6. *Human nature being what it is, those who dominate this societal hierarchy work to preserve the status quo because existing arrangements are to their benefit. They have little concern for reforming institutional arrangements to make them more participatory or for changing policies that benefit the rich, such as the tax system.* Sifat manusia yang apa adanya membuat dominasi hirarki masyarakat ini bekerja untuk mempertahankan status quo karena pengaturan yang ada adalah untuk menguntungkan mereka. Mereka memiliki sedikit kepedulian untuk mereformasi pengaturan kelembagaan untuk membuat mereka lebih partisipatif atau untuk mengubah kebijakan yang menguntungkan tertentu.

Dalam pandangan ini menyatakan bahwa masing-masing *stakeholders* memiliki peran tersendiri dalam mempengaruhi sinergitas yang sedang dibangun. Masyarakat menjadi peran penting karena kegiatan yang dilaksanakan akan berdampak langsung terhadap mereka. Namun, pandang tersebut bergeser ke arah

didominasi oleh swasta dan pemerintah. Kedua *stakeholders* tersebut memiliki keterakitan karena terdapat perjanjian-perjanjian yang lebih mengarahkan sinergitas tergantung di tangan mereka.

C. *Corporate Social Responsibility*

1. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Pada awal dari teori *Corporate Social Responsibility* ini berkembang dan dikenal dengan konsep “*responsibility and responsiveness*”, maka selalu diidentikkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh perusahaan *profit* sebagai upaya timbal balik dari kegiatan yang dilakukan dalam melakukan roda perusahaan tersebut. Setelah beberapa dekade berkembang maka banyak ahli bersilang pendapat tentang makna dari *Corporate Social Responsibility* sendiri dengan berbagai pandangan perspektif. *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. (Suhandri dalam Untung, 2008:1)

Pada pernyataan di atas memandang bahwa teori tersebut muncul karena erat hubungannya dengan kesadaran dari perusahaan akan keberlanjutan perusahaannya terutama dalam segi ekonomi dengan mengambil tanggung jawab sosial sebagai solusinya. Tanggung jawab sosial sudah pasti berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat tersebut dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut Hadi (2011:25) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan pergerakan industrialisasi yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan karena

membutuhkan sumberdaya sehingga kecil atau besar, cepat atau lambat maka akan mengganggu keseimbangan sumberdaya dan disitulah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat terjadi.

Penjabaran pernyataan kurang lebih sama dengan pernyataan ahli pertama bahwa tanggung jawab sosial dilakukan sebagai upaya dari perusahaan sendiri untuk menjaga kelangsungan dari perusahaan yang tidak akan berhasil tanpa adanya masyarakat dan hal tersebut diharapkan dapat menjaga hubungan baik antar keduanya dengan mewujudkan tanggung jawab sosial. Perbedaannya adalah karena sadar bahwa sumberdaya yang dipakai akan berdampak langsung kepada masyarakat maka mereka memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut dengan bersinergi dengan masyarakat tentang yang dilakukan untuk menjaga kestabilan hubungan mereka dan membantu masalah yang timbul dari masyarakat terhadap lingkungan.

Pernyataan berbeda coba untuk dihadirkan guna untuk membandingkan sekaligus melihat dari segi lain dari pengertian teori. Pendapat tersebut disampaikan oleh Rusdianto (2013:7), yang menyatakan bahwa :

“Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen dari perusahaan atau organisasi dalam bertindak terus menerus secara etis, beroperasi legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan dari kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.”

Pengertian di atas mengemukakan bahwa perusahaan secara etis menjalankan kegiatan yang memang dilakukan seperti menjalankan roda perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku maupun berusaha untuk mengambil profit sebanyak banyaknya. Tetapi dibalik itu yang membedakan dengan dua pendapat diawal adalah perusahaan memiliki komitmen secara moral

untuk meningkatkan kualitas dari beberapa komponen yang memiliki peran penting dibalik keberhasilan perusahaan terkait. Selain meningkatkan kehidupan dari karyawan perusahaan yang memiliki kapasitas sebagai penggerak perusahaan, perusahaan juga meningkatkan kualitas masyarakat dengan memperkuat pada konteks eksternal mereka. Pada konsep ini juga tidak mengharapkan keuntungan yang lebih selain memang unsur komitmen terhadap masyarakat, akan tetapi disadari atau tidak maka perusahaan penyelenggara CSR akan menaikkan pamor maupun nilai ekonomis dari perusahaan terkait dan hal tersebut digunakan sebagai bonus bukan sebagai tujuan utama.

Corporate Social Responsibility menjadi salah satu contoh berupa pengertian yang masih kabur dan belum adanya kepastian akan pengertian yang absolute di dalamnya. Beberapa pandangan ahli diatas memiliki beberapa dasar tentang pendapat mereka tentang *Corporate Social Responsibility*. Persilangan pendapat tersebut seakan memunculkan kembali dikotomi wacana dimana perusahaan akan menggunakan profit dengan memprioritaskan masyarakat yang terkan dampak dengan pertimbangan landasan moral, tetapi hal tersebut masih belum memiliki pemecahan konseptualnya. Pendapat tersebut juga diperparah dengan kedatangan kelompok tertentu dengan membawa argumen bahwa perusahaan tidak perlu mempertanggung jawabkan kegiatan sosial yang diberikan sebagai wujud moral terhadap yang sudah mereka lakukan.

Asumsi senada dikemukakan oleh Milton. Menurut Milton dalam Wahyudi (2008:22) mengatakan bahwa “... *There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engage in*

open and free competition, withput deception or fraud". Pembahasan ini jelas bahwa Milton memiliki pandangan bahwa tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai ketentuan yang sudah ditentukan pada pasar bebas karena bagi beliau tanggung jawab sudah terlaksana dikarenakan perusahaan sudah membayar sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah. Pembayaran pajak tersebut sudah dianggap sebagai wujud kepedulian untuk menyejahterakan masyarakat. Bagi Milton pergeseran pemikiran dari tanggung jawab sudah bergeser dari kepemilikan perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial menjadi kepemilikan pemerintah dan secara tidak langsung telah menyalah undang-undang yang berlaku di saat itu.

Elkington berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah mayoritas dari pendapat berkiblat terhadap pemikiran yang menerapkan model *triple bottom line*. Model tersebut menyebutkan bahwa meskipun mempunyai arti yang berbeda tetapi skema yang dirancang tersebut tetap merujuk terhadap tiga lingkup yang sama yaitu lingkup sosial, lingkup ekonomi dan lingkup lingkungan. Adapun muatan atau cakupan dari model *Corporate Social Responsibility* jika diwujudkan dalam kegiatan maka akan dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3. Kegiatan *Corporate Social Responsibility*

No.	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja,

		infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber : Hadi, 2011

Perusahaan dapat menjadikan *triple bottom line* sebagai rujukan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Penjabaran di atas, *Corporate Social Responsibility* lebih dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan atas dasar moral dari perusahaan untuk memberdayakan beberapa komponen yang sudah menerima dampak dari kegiatan mereka dengan merujuk pada tiga lingkup utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

2. Ruang lingkup dan prinsip *Corporate Social Responsibility*

Perkembangan kehidupan sekarang maka sulit rasanya untuk memisahkan perusahaan dengan unsur *Corporate Social Responsibility* karena selain unsur tersebut sudah berbadan hukum, namun juga karena manfaatnya yang mulai terasa dirasakan oleh pihak perusahaan maupun publik. Walaupun terdapat banyak dampak positif dalam pelaksanaannya seperti meningkatkan kualitas dari masyarakat maupun lingkungan yang berubah menuju lingkungan yang kondusif, tetapi bukan berarti tanpa adanya dampak negatif. Dampak negatif yang paling disoroti adalah *Corporate Social Responsibility* hanyalah digunakan untuk menekan reaksi dari *stakeholder* sehingga perusahaan melaksanakan kegiatan tersebut hanyalah untuk strategi legitimasi atau sebagai formalitas agar terjadi keseimbangan dari perilaku tanggung jawab sosial perusahaan dengan kegiatan yang merugikan lingkungan.

Banyaknya perspektif yang memandang *Corporate Social Responsibility* termasuk beberapa usaha-usaha yang dilakukan perusahaan dengan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Brodshaw dan Vogel dalam Wahyudi dan Bsyra (2008:46) berpendapat bahwa terdapat 3 dimensi garis besar ruang lingkup yang terdapat dalam *Corporate Social Responsibility* yaitu :

a. *Corporate Philantrophy*

Merupakan usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal.

b. *Corporate Responsibility*

Merupakan usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.

c. *Corporate Policy*

Merupakan berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Ruang lingkup yang dibahas di atas mengatakan bahwa banyak cara untuk mewujudkan CSR dalam perusahaan. Menyadari akan cakupan dari CSR yang begitu luas maka akan berpengaruh langsung terhadap pengimplementasian dari CSR dari setiap perusahaan. Menurut Susanto dalam Wahyudi (2008:52) jika dilihat dalam implementasi CSR maka akan ada 3 tahapan maupun kategori yaitu:

a. *Social Obligation*

Kategori ini implementasinya sekedar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa.

b. *Social Reaction*

Tahap ini sudah muncul kesadaran oleh perusahaan akan pentingnya CSR, namun tetap saja memiliki ketidakbaikan karena dilakukan setelah masyarakat mengalami eksternalitas yang cukup lama tanpa ada kebijakan dari perusahaan.

c. *Social Response*

Kategori ini masyarakat dan perusahaan mencari peluang timbulnya kebaikan di tengah masyarakat. Kategori ini lebih dari sekadar pendekatan *ad hoc*, *charity* atau tekanan pihak luar. Ia lebih merupakan sebuah dorongan internal (*internally driven*) dan jalinan kemitraan (*partnership*).

Pada tahapan-tahapan tersebut dijelaskan bahwa sinergitas mempunyai peran yang penting karena sinergitas dapat membuat tujuan yang diinginkan akan berjalan dengan baik. Tahapan ini akan mempermudah bagi perusahaan untuk mengenalisa tentang kebutuhan yang diinginkan masyarakat sehingga dapat menentukan langkah yang diambil untuk dapat diterapkan. Setelah sinergitas antar kedua aktor tersebut tercapai, maka akan disesuaikan dengan kebijakan dan perizinan dari aktor lain yaitu pemerintah.

3. *Manfaat Corporate Social Responsibility*

Perusahaan yang telah menyadari akan pentingnya tanggungjawab sosial dan menerapkan CSR dalam prioritas utama dalam menjalankan perusahaan, maka cepat atau lambat akan mendapatkan *reward* yang sesuai dengan kegiatan yang mereka berikan. Konsep dari CSR sendiri bukanlah untuk merugikan satu pihak saja melainkan lebih memberikan simbiosis mutualisme diantara pihak perusahaan maupun pihak masyarakat (ekonomi, sosial dan lingkungan). Berikut

merupakan manfaat yang diberikan terhadap perusahaan yang telah menerapkan CSR di dalam perusahaannya, adalah :

- a. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
- b. Meningkatkan citra perusahaan.
- c. Mengurangi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
- e. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
- f. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
- g. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
- h. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
- i. Mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*)

Pada dasarnya CSR diciptakan untuk menciptakan suatu perubahan dimana perubahan tersebut berarti adanya inisiatif dari perusahaan untuk memberikan efek positif terhadap masyarakat maupun perusahaan sendiri. Keseimbangan antara pengeluaran dari perusahaan dan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan pertanggung jawaban sosial juga menjadi suatu gambaran akan keluaran dari program yang dirancang akan berdampak positif ataupun tidak. Jika suatu perusahaan telah melakukan kegiatan CSR di dalamnya, maka kegiatan CSR ditempatkan di dalam inti bisnis, sehingga keterpihakan dan program yang mencakup pertanggung jawab sosial akan secara otomatis terintegrasi sehingga membuat sistem yang berjalan dalam CSR akan otomatis berjalan. Inilah yang diharapkan oleh beberapa pihak karena perusahaan memang melakukan pertanggung jawaban sosial dengan moral maka secara otomatis akan terkonsep dengan baik, akan menimbulkan manfaat yang signifikan ke perusahaan dan yang terpenting adalah membuat publik lebih menikmati akan sumbangsih dari perusahaan yang bagi mereka hanya muncul stigma bahwa perusahaan hanya menimbulkan efek negatif terhadap publik.

4. Program *Corporate Social Responsibility*

Program adalah rencana yang komprehensif yang mencakup penggunaan sumberdaya secara terpadu dan membangun urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan untuk masing-masing dalam rangka mencapai tujuan (Terry dalam Tachjan, 2006). Rencana program yang matang dan ditambah keinginan dari berbagai pihak yang menaungi juga akan mempengaruhi seberapa efektif dan efisien berjalan program tersebut.

Jika dikaitkan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*, maka jelas bahwa program tersebut lahir karena kesadaran dari perusahaan atas dampak yang mereka timbulkan. Ada pula yang menjalankan *Corporate Social Responsibility* atas dasar pelaksanaan dari undang-undang yang terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas mengatakan bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan di atas jelas bahwa program tanggung jawab tersebut bersifat legal dan mengikat. Perusahaan dituntut untuk cermat dalam mengalokasikan anggaran agar penyebaran anggaran tersebut tepat sasaran. Perusahaan juga diharap untuk melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang

dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak bersifat percuma apabila kegiatan tersebut terlalu dipaksakan untuk dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas tentang program *Corporate Social Responsibility* berbasis lingkungan. Dimana program yang dilakukan oleh PT. Djarum Foundation tersebut merupakan salah satu pelopor dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia. Salah satu yang dimuat dalam program Bakti Lingkungan Kudus adalah Penanaman Trembesi. Trembesi merupakan jenis pohon yang memiliki kemampuan menyerap karbondioksida dari udara yang sangat besar. Pohon ini mampu menyerap 28.488,39 kg CO₂/pohon setiap tahunnya (Munir dan Swasono, 2013:5). Tujuan dari penanaman trembesi adalah untuk mengurangi karbondioksida yang dihasilkan dari polusi kendaraan terutama yang berada di Jalur Pantura (Pantai Utara) yang memiliki polusi udara yang memprihatinkan. Pohon trembesi yang digunakan untuk program penanaman trembesi tersebut juga merupakan hasil budidaya pembibitan tanaman yang dilakukan oleh PT Djarum Foundation Kudus.

Program penanaman trembesi dipilih karena program merupakan program berbasis lingkungan unggulan di PT Djarum Foundation karena telah berjalan hampir 10 tahun dan dimulai dari jalur provinsi dari Kudus-Semarang. Program penanaman pohon trembesi ini tersebar di beberapa jalan protokol di sepanjang seperti : 1350 km pada Merak-Banyuwangi, 116 km pada Tol Cipali, 263 km pada Tol Joglo Semar dan 296 km pada Lingkar Madura. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi polusi atau karbon dioksida yang berlebihan yang sebagian besar ditumbulkan dari asap dari kendaraan bermotor.

D. Etika Lingkungan

Etika Lingkungan memiliki pandangan sebagai disiplin filsafat tentang manusia dan lingkungan atau alam. Tidak sampai membahas tentang peran individu dari manusia dan lingkungan, tetapi etika lingkungan juga membahas tentang keterakitan antara manusia dan lingkungan. Keterkaitan tersebut bermakna etika perilaku sebagai sesama makhluk hidup yang saling menghargai dan memperlakukan sesama makhluk hidup sebagaimana mestinya. Pembahasan ini juga menelisik tentang hubungan relasi antar manusia yang saling berhubungan tetapi memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya seperti adanya keterpihakan dari hasil kebijakan politik sehingga merugikan alam. Untuk memperdalam penjelasan akan etika lingkungan hidup, maka Keraf (2002) mengatakan bahwa terdapat beberapa teori etika lingkungan yang dapat membedakan beberapa artian dari lingkungan, yaitu :

- a. Antroposentrisme, cara pandang ini terpengaruh oleh cara pandang *antroposentris*. Dimana pada teori ini berpandangan bahwa manusia dengan kepentingannya memiliki pengaruh yang dominan di dalam alam ini. Lingkungan dan alam hanya dipandang sebagai objek untuk memuaskan dari kepentingan manusia semata.
- b. Biosentrisme, berlawanan dengan dengan antroposentrisme, biosentrisme lebih memandang lingkungan memiliki kepentingan tersendiri yang tak dipunyai oleh manusia. Teori ini meyakini bahwa setiap makhluk hidup mempunyai kepentingan masing-masing dan tak selayaknya untuk memandang kepentingannya lebih daripada makhluk hidup lain. Lingkungan harus diperlakukan sebagaimana mestinya, karena tanpa adanya lingkungan atau alam maka manusia tidak ada berarti.
- c. Ekosentrisme, dalam teori ini memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan biosentrisme. Jika biosentrisme konsen terhadap kepentingan dari lingkungan memiliki manfaat yang sama pentingnya dengan manusia, disini ekosentrisme lebih memandang sebenarnya semua makhluk hidup memiliki kepentingan yang sama pentingnya di dalam roda kehidupan. Karena teori ini meyakini kehidupan akan berjalan jika kepentingan dari tiap makhluk hidup digunakan sebagai alat untuk membuat makhluk hidup lain menjadi berharga.

- d. Ekofeminisme, teori ini berangkat dari krisis lingkungan yang disebabkan oleh cara pandang manusia sebagai makhluk hidup dalam memperlakukan makhluk hidup lain. Ekofeminisme mencoba untuk membuat alternatif-alternatif pilihan sebagai upaya merefleksi semua teori sebelumnya dengan pemahaman cara pandang yang baru dan disesuaikan dengan masyarakat modern. Perubahan ini dilakukan dengan cara mengubah secara dasar kerangka-kerangka pikiran dari manusia bahwa mereka akan berguna apabila menghargai kepentingan dari makhluk hidup yang lain.

Teori-teori tersebut merupakan penjabaran dari beberapa perspektif pandangan seseorang dalam menyikapi peranan relasi antara hubungan manusia dan lingkungan. Untuk menyikapi pandangan akan etika lingkungan maka diperlukan suatu dasar pemikiran akan mengapa perlu etika lingkungan dalam kehidupan ini. Menurut Dalduni dan Sujitno dalam Moesa (2002: 185) mengatakan bahwa terdapat beberapa dasar diperlukannya etika lingkungan hidup yaitu:

- a. Keberadaan sumberdaya di bumi terbatas;
- b. Adanya keterikatan antara manusia dengan lingkungannya, baik secara religius maupun nalar;
- c. Manusia memiliki dan mencintai rasa keindahan;
- d. Adanya kesatuan secara alami yang tidak terpisahkan antara manusia dengan lingkungan hidupnya;
- e. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan hidupnya;
- f. Kemanfaatan lingkungan hidup sebagai sumber kebutuhan material bagi manusia; dan
- g. Pemanfaatan lingkungan hidup sebagai media kegiatan manusia seperti pendidikan, pengajaran dan rekreasi.

Menyadarkan manusia terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya diperlukan etika lingkungan hidup membuat manusia semakin cerdas dalam menentukan perilaku yang bersentuhan langsung kepada makhluk hidup lainnya. Setelah muncul kesadaran dari manusia, munculah suatu problema bahwa kesadaran tersebut harus diarahkan kepada cara-cara yang tepat agar manusia secara dewasa dapat menyikapi rasa tersebut dengan bijaksana. Dibutuhkanlah

prinsip-prinsip baku untuk membentuk kerangka dari diri manusia atas pentingnya lingkungan hidup. Menurut Keraf (2000) terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam mewujudkan etika lingkungan yaitu :

- a. Sikap Hormat terhadap Alam
- b. Prinsip Tanggung Jawab
- c. Solidaritas Kosmis (Kesamaan derajat)
- d. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam
- e. Prinsip “No Harm” (karena manusia bermoral jadi tidak akan merugikan makhluk hidup yang lain)
- f. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam
- g. Prinsip Keadilan
- h. Prinsip Demokrasi
- i. Prinsip Integritas Moral

Prinsip di atas dapat menjadi panduan bagi aktor dalam kehidupan terutama manusia untuk bertindak lebih arif dalam memperlakukan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Jika dikaitkan dengan judul yang ada, maka lingkungan menjadi tujuan yang ingin disasar dalam perwujudan program CSR. Etika lingkungan digunakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari manusia (swasta atau pemerintah) dalam menyikapi dampak yang disebabkan oleh kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana *stakeholder* yang bersinergi tersebut untuk dapat mewujudkan etika lingkungan dengan memperlakukan lingkungan sebagaimana mestinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan metode kualitatif dinilai sesuai dengan bahasan yang akan diberikan sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian. Penelitian kualitatif yang digunakan menggunakan pendekatan fenomenologi. Alasan pendekatan fenomenologi dipilih karena dinilai lebih dapat menjabarkan dan menggambarkan fenomena yang terdapat di lapangan dengan lebih mendalam lewat kalimat. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) menjelaskan tentang penjabaran penelitian kualitatif dilakukan dengan pengolahan kata-kata dan kalimat, beliau mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Penelitian fenomenologi menjelaskan bahwa peneliti dapat mengetahui gambaran secara pasti tentang penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran tentang pola sinergitas yang dilakukan oleh *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif lingkungan. Peneliti akan menguak tentang apa yang terjadi secara langsung dan menggabungkannya dengan fenomena serta data yang tersedia dalam perjanjian dari masing-masing *stakeholder* dalam menjalankan kewajibannya yang tertuang dalam undang-

undang maupun nota kesepahaman antar *stakeholder* yang berguna untuk pembangunan berkelanjutan lewat rangkaian kalimat dan kata-kata.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif ini diperlukan fokus penelitian yang merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam kasus tersebut. Lebih dari itu fokus penelitian berguna dalam membatasi peneliti agar tidak keluar konteks dari apa yang akan dibicarakan. Menurut Moleong (2011:237), fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk :

1. Membatasi studi dengan kata lain lebih membatasi tentang bidang yang dibahas, seperti lebih memfokuskan pada teori-teori yang ada sehingga tidak melebar untuk membahas teori-teori yang lain.
2. Memenuhi kriteria dalam adanya masukan dan pengeluaran sebuah informasi yang didapatkan di lapangan. Dengan fokus yang demikian maka peneliti akan fokus dalam pengambilan data-data yang lebih spesifik.

Sesuai dengan tujuan yang ingin diterapkan peneliti, diharapkan dapat menetapkan fokus dan batasan dalam konteks faktor-faktor yang mendukung. Berdasarkan teori tentang sinergitas *stakeholders* yaitu Teori *Governance*, maka fokus penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wujud peran setiap *stakeholders* dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis lingkungan oleh PT. Djarum Foundation Kudus, meliputi :
 - a. Peran dari Pemerintah
 - b. Peran dari Swasta
 - c. Peran dari Masyarakat Madani

2. Sinergitas dari setiap unsur *stakeholders* dalam melakukan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Djarum Foundation Kudus berbasis lingkungan :

- a. Komunikasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation
- b. Koordinasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalur Pantai Utara (Pantura) dari Kudus-Semarang. Lokasi ini merupakan salah satu kawasan dengan lalu lintas terpadat di Jalur Pantura. Pemilihan lokasi juga dilatar belakangi karena lokasi tersebut merupakan bagian dari program PT Djarum Foundation dimana tujuan utamanya merupakan penanaman trembesi Merak-Banyuwangi. Sementara situs penelitiannya dilakukan pada:

1. Area program pembibitan tanaman trembesi dalam kawasan pemberdayaan lingkungan PT Djarum Foundation Kudus.
2. Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
3. Masyarakat Desa Jogoloyo, Wonosalam Kabupaten Demak.

Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut dikarenakan PT Djarum merupakan salah satu perusahaan dengan memiliki persentase pendapatan yang masuk dalam jajaran atas perusahaan dengan keuntungan terbesar di Indonesia dan bahkan menjadi penyumbang cukai terbesar di Indonesia. Dengan nama besar PT Djarum tersebut, maka penulis ingin menggali lebih dalam tentang hal yang dilakukan PT Djarum sebagai bentuk kompensasi dari dampak negatif yang telah diberikan kepada masyarakat. Bersamaan dengan itu pula, perusahaan mendirikan anak perusahaan yang khusus dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia dengan

memanfaatkan sumber daya manusia semaksimal mungkin dan mempertahankan kelestarian dari sumber daya alam yang sangat kaya dari Indonesia yang memiliki nama PT Djarum Foundation. Karena PT Djarum Foundation ini pada awalnya terbentuk akibat dari kondisi lingkungan dan jumlah tanaman hijau yang memprihatinkan, maka dari itu penulis ingin mengambil program bakti lingkungan sebagai pengagas penggunaan anggaran *Corporate Social Responsibility* dengan tujuan mewujudkan pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan orang atau dokumen yang dapat memberikan data penelitian berupa informasi mengenai bahan-bahan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011:157). Sumber data juga dapat menunjukkan asal dari peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer dapat diartikan sebagai data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan menggunakan pengembangan kata-kata dan tindakan atas orang-orang yang diwawancarai dan diamati. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang perwujudan dari program *Corporate Social Responsibility* dalam pandangan lingkungan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Bapak Fx. Supanji selaku Vice President dari *Corporate Affair* PT Djarum Foundation dalam program bakti lingkungan.

- b. Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation selaku penanggung jawab lapangan.
- c. Bapak Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Masyarakat Jogoloyo Wonosalam Kabupaten Demak yang ikut dalam mengikuti program pelaksanaan penanaman trembesi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, arsip-arsip, dokumen yang belum terpublikasikan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, hasil survei, *histories study* dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data guna untuk menunjang peningkatan dari pemberdayaan masyarakat dalam basis lingkungan dengan penggunaan anggaran *Corporate Social Responsibility* oleh PT Djarum Foundation Kudus.

E. Teknik Pengambilan Data

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data di lapangan. Maka dari itu, terdapat teknik khusus dalam memperoleh data tersebut. Adapaun teknik yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan membahas masalah secara tatap muka menggunakan daftar wawancara. Tujuan dari diadakannya wawancara ini adalah memperdalam masalah melalui orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perwujudan serta bentuk kepedulian. Model wawancara yang digunakan menggunakan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan format tertentu sehingga nantinya wawancara akan mengacu kepada sesuatu bahasan yang diinginkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang dialami. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terus menerus kepada beberapa informan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dari PT Djarum Foundation yang menaungi bagian bakti lingkungan untuk menjelaskan tentang alur dan kapasitas perusahaan atau lebih dijelaskan secara teknis untuk memberdayakan masyarakat.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengutip atau menyalin dokumen yang relevan untuk digunakan dalam sebagai data dalam penelitian. Teknik ini juga dapat dilakukan dengan mencari data berupa transkrip, notulen, agenda, buku, surat kabar dan sebagainya.

3. Observasi

Teknik ini menunjukkan bahwa peneliti harus langsung turun ke lapangan yang berguna untuk mengetahui situasi yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data dalam menyempurnakan data penelitian yang didapat dari wawancara. Teknik ini juga dapat membuat peneliti memahami lingkungan yang

terdapat di lapangan sehingga dapat mempelajari internal dari perusahaan tersebut.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2008) terdapat dua hal utama yang dapat mempengaruhi kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, dimana dalam hal ini peneliti menjadi instrumen utama dalam melakukan penelitian tersebut. Peneliti dituntut untuk dapat menguasai dari bahan yang dibutuhkan serta kondisi lapangan.
2. Pedoman Wawancara, menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan wawancara kepada narasumber, agar dapat diajukan pertanyaan secara terstruktur dan sistematis.
3. Perangkat Penunjang, adalah peralatan yang bersifat membantu peneliti dalam kelancaran dalam pengambilan data yang dibutuhkan seperti kamera dan alat-alat tulis.

G. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk mempengaruhi gambaran tentang karakteristik data untuk menentukan tahapan-tahapan dan alur dari penelitian ini dilaksanakan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2011:248) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Karena peneliti memutuskan untuk menggunakan metode

penelitian kualitatif maka analisis data ini dapat membantu memperoleh gambaran secara luas dan akan menghasilkan data secara terstruktur dengan uraian-uraian yang sudah terkonsep sesuai dengan keinginan peneliti.

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2008: 255) menyatakan terdapat empat macam analisis data kualitatif yaitu :

1. Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh dengan pernyataan *grand* dan *minitour*. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Analisis ini ingin menjelaskan tentang alasan memilih Jalur Kudus-Semarang. Jalur Kudus-Semarang merupakan jalur yang memiliki intensitas lalu lintas yang padat terutama pada jam tertentu. Padatnya lalu lintas tersebut membuat unsur perencanaan lingkungan menjadi perhatian karena banyak atau tidak pasti akan berimbas pada lingkungan. Perencanaan lingkungan yang baik di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kota Semarang adalah diberikannya gelar Adipura Kencana dengan inovasi yang dilakukan serta Kabupaten Kudus menjadi satu-satunya kota/kabupaten yang meraihnya di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pemerintah dan swasta maupun *stakeholder* lainnya bersinergi untuk membuat isu lingkungan kota menjadi berkelanjutan. Peran swasta diharapkan menjadi kekuatan sendiri karena di Kabupaten Kudus yang

menjadi salah satu dari ketiga kota pendukung, memiliki perusahaan kretek yang tersohor di Indonesia yaitu PT Djarum Kudus.

2. Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*)

Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus. Dengan mengetahui struktur internal memiliki arti bahwa peneliti harus mengerti tentang tempat penelitian yang dituju yaitu PT Djarum Foundation. Alasan dipilihnya PT Djarum Foundation menjadi pilihan tempat penelitian adalah karena menjadi pelopor dari perwujudan program *Corporate Social Responsibility* sebagai wujud keprihatinan perusahaan terhadap situasi yang sulit dengan membiarkan sumber daya Indonesia tidak memiliki fungsi yang berkelanjutan. Dengan memiliki keuntungan yang besar tiap semesternya, maka anggaran yang diberikan terhadap program *Corporate Social Responsibility* menjadi lebih besar. Sehingga memudahkan perusahaan untuk dapat mengembangkan program sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (*contras question*). Dengan mengkontraskan antar elemen yang ada, menandakan bahwa perlu adanya fokus riset yang dibutuhkan agar tidak membuat kabur setiap elemen yang dikaitkan. Fokus riset membahas tentang

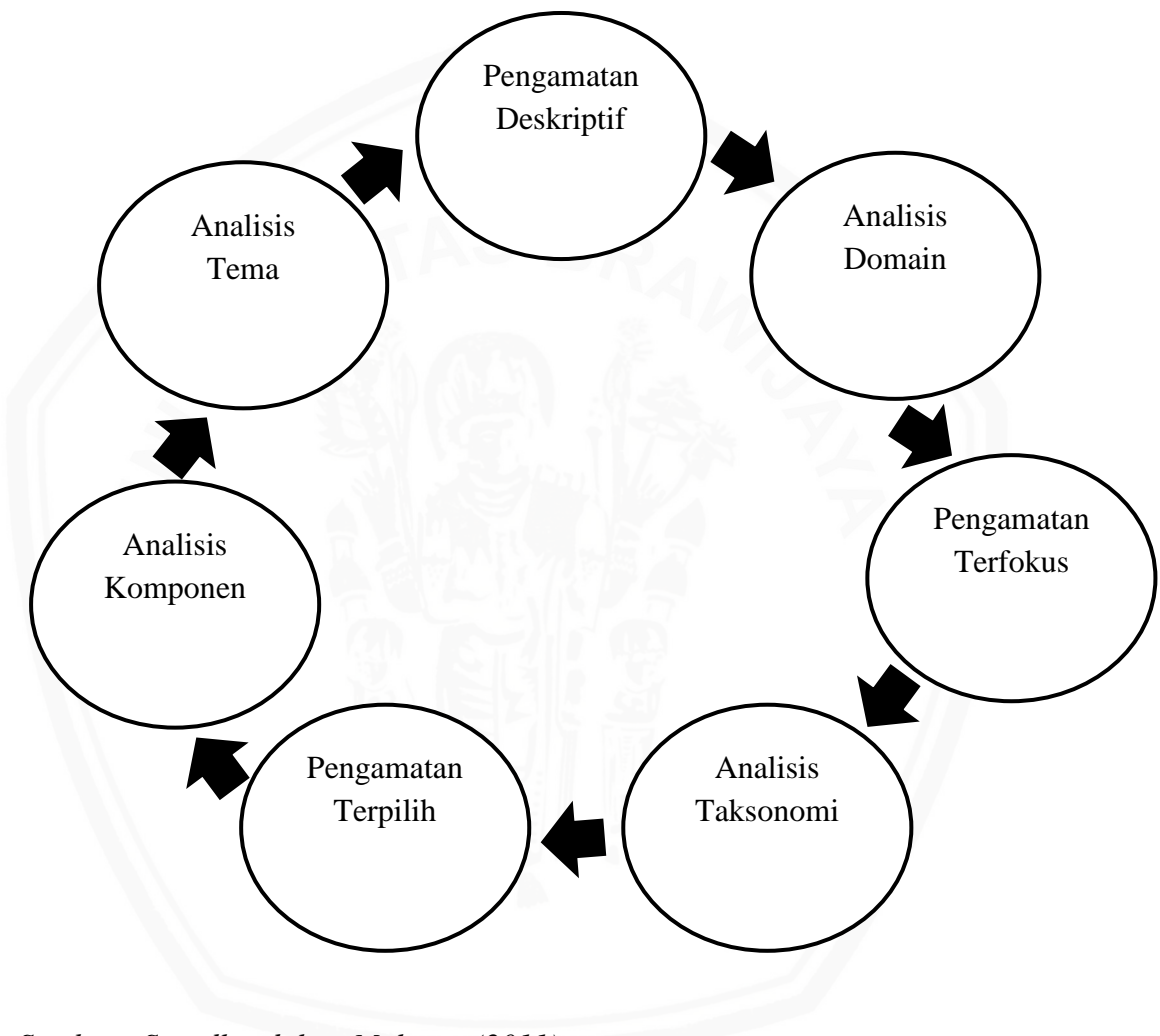
penggunaan program *Corporate Social Responsibility* yang diberikan oleh perusahaan. Dalam menjalankan program tersebut, swasta tidak dapat melakukannya sendiri karena menjalankan program juga menyangkut unsur-unsur lain. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kesinergian dari masing-masing *stakeholder* dalam menanggapi program *Corporate Social Responsibility*. Sehingga jika sudah terfokus maka akan memudahkan peneliti untuk dapat membuat wawancara terseleksi.

4. Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*)

Mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian. Singkronisasi antara domain yang dibuat dengan judul menjadi penting. Dalam domain dinyatakan bahwa tujuan utamanya adalah perwujudan sinergitas dari masing-masing *stakeholder* dalam mengelola *Corporate Social Responsibility* dari PT Djarum Foundation dengan konsen bakti lingkungan dalam program Penanaman Trembesi. Program ini dilakukan untuk meneliti seberapa besar pengaruh dari masing-masing *stakeholder* serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena masalahnya terkadang masing-masing *stakeholder* tidak mengetahui tugas dalam melaksanakan program tersebut karena memang tidak ada ketentuan tertentu yang membahas tentang pertauran yang baku. Sehingga perlu bagi *stakeholder* kunci

untuk dapat menunjukkan bahwa program yang dibawa membawa dampak yang signifikan untuk perubahan untuk masyarakat yang lebih baik.

Gambar 3. Tahapan Penelitian Spradley



Sumber : Spardley dalam Moleong (2011)

Analisis data Spradley yang digunakan selaras dengan pendekatan fenomenologi dimana peneliti ingin menjabarkan dan menggambarkan fenomena yang terdapat di lapangan. Sehingga hasil dari penelitian yang di dalamnya

terdapat data-data yang tersedia dapat di analisis sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada analisis data Spradley

H. Keabsahan Data

Usaha dalam melakukan uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan standar-standar yang telah ditetapkan agar kebenaran dari penelitian diatas dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti akan menggunakan standar kredibilitas dan transferabilitas. Standar transferabilitas yang peneliti gunakan adalah memperkaya deskripsi tentang latar atau konteks dari yang menjadi fokus penelitian. Jadi, disini peneliti akan menjelaskan atau menceritakan secara jelas.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 tahap yang dilakukan yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan metode pembelajaran sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti harus melakukan obesrvasi ke lokasi penelitian dengan terus menerus dan bertahap dengan informan dalam waktu yang panjang dengan memastikan apakah informasi yang didapat oleh informan sesuai dengan yang dicatat ataupun direkam oleh peneliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut. Dalam hal ini peneliti diharap lebih memperkaya informasi yang diperoleh dari PT Djarum Foundation, B2PJN, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan Masyarakat sekitar agar peneliti mengetahui tentang sinergitas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* di atas dalam pelaksanaan program CSR tersebut.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan berpengaruh. Hal ini merupakan salah atau benarnya suatu penelitian dapat ditutupi dengan konsistensi seorang peneliti dalam menggambarkan penelitian tersebut secara detail dimana peneliti diharap dapat menjelaskan tentang sinergitas *stakeholders* melalui program *corporate social responsibility* berbasis lingkungan dengan baik.

4. Kepastian (*confirmability*)

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang. Dalam hal ini peneliti harus meninjau kembali penelitiannya apakah penelitian di lapangan sudah selesai dengan apa yang sudah direncanakan lebih awal, jika dirasa sudah sesuai dengan apa yang dimaksud maka sudah hampir dipastikan bahwa penelitian tersebut akan disetujui.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

b. Gambaran Umum Kabupaten Demak

1) Kondisi Geografis

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak termasuk wilayah administratif yang ada di dalam Karesidenan Semarang (Semarang, Kendal, Salatiga, Demak, Grobogan) yang memiliki titik sentral karesidenan di Kota Semarang. Kabupaten Demak sendiri memiliki jarak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi dari Jawa Tengah. Letak geografis sendiri terletak pada posisi $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43''$ LS dan $110^{\circ}48'47''$ BT.

Dengan letak geografis tersebut, maka wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam kategori dataran rendah dengan kondisi tanah yang baik. Oleh karena itu, masyarakat sekitar memanfaatkannya dengan menanam pohon-pohon produktif seperti Jambu Air, Belimbing dan Kelengkeng. Ditambah dengan Kabupaten Demak dilalui jalan negara yaitu pantai utara yang menghubungkan dari Jakarta sampai Banyuwangi. Hal tersebut dapat menambah nilai tambah dari Kabupaten Demak yang terkenal dengan wisata religi Sunan Kalijaga.

2) Kondisi Administratif

Kabupaten Demak termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.149,07 km². Luas tersebut terdiri dari daratan seluas 897,43 km² dan lautan seluas 252,34 km² dengan memiliki presentase 2,7% luas wilayah di Jawa Tengah. Adapun wilayah Kabupaten Demak memiliki batasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah timur Kabupaten Demak berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- b) Sebelah selatan Kabupaten Demak berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan;
- c) Sebelah barat Kabupaten Demak berbatasan dengan Kotamadya Semarang; dan
- d) Sebelah Utara Kabupaten Demak adalah Laut Jawa dan berbatasan dengan Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan ketentuan jumlah kecamatan yang berada dalam Kabupaten Demak secara administratif, maka berikut merupakan 14 kecamatan di Kabupaten Demak beserta luas tiap kecamatan :

Tabel 4. Luas Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Mranggen	7222	8.05
2	Karangawen	6695	7.46
3	Guntur	5753	6.41
4	Sayung	7869	8.77
5	Karangtengah	5155	5.74
6	Bonang	8324	9.28
7	Demak	6113	6.81

8	Wonosalam	5788	6.45
9	Dempet	6161	6.87
10	Kebonagung	4199	4.68
11	Gajah	4783	5.33
12	Karanganyar	6776	7.55
13	Mijen	5029	5.60
14	Wedung	9876	11.00
	Jumlah/Total	89743	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2015

3) Kondisi Demografi

Tahun 2016 menunjukkan bahwa angka jumlah penduduk Kabupaten Demak mencapai angka 1.117.901 jiwa. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki ukuran jumlah penduduk di daerah Jawa Tengah yang lumayan padat. Jumlah diatas juga menunjukkan bahwa penduduk terpadat berada pada Kecamatan Mranggen yaitu 180.152 jiwa sementara untuk penduduk dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain adalah kecamatan Kebonagung dengan 39.767. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kabupaten Demak :

Tabel 5. Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Mranggen	89296	90856	180152	98,28
2	Karangawen	43663	44469	88132	98.19
3	Guntur	38342	37821	76163	101.38
4	Sayung	52097	51835	103932	100.51
5	Karantengah	31061	31049	62110	100.04
6	Bonang	50605	50122	100727	100.96
7	Demak	48780	52051	100831	93.72

8	Wonosalam	37266	37974	75240	98.14
9	Dempet	26337	26672	53009	98.74
10	Kebonagung	19719	20048	39767	98.36
11	Gajah	21341	22317	43658	95.63
12	Karanganyar	34603	35606	70209	97.18
13	Mijen	24814	26293	51107	94.37
14	Wedung	35952	36912	72864	97.40
	Jumlah/Total	553876	564025	1117901	98.20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2015

c. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

1) Visi, Misi, Tujuan Pokok dan Fungsi

a) Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagai salah satu komponen perangkat daerah Kabupaten Demak yang mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam mengimplementasikan visi pembangunan Kabupaten Demak masa bakti 2016-2021, yang telah dicantumkan serta ditetapkan ke dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis. Visi tersebut secara tidak langsung adanya suatu harapan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung program tersebut mengingat nantinya jika misi tersebut berhasil akan berdampak positif untuk masyarakat sendiri.

Untuk misi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki prinsip dasar yaitu misi ke-9 dari Bupati Demak yang

berkaitan dengan lingkungan yang berbunyi : “Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan”. Dengan dasar prinsip misi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak akan melaksanakan program pembangunan berbasis lingkungan yang mendukung pencapaian misi dari Bupati Demak tahun 2016 – 2021 yaitu :

- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- iii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- iv. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- vi. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- vii. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Sumberdaya Alam; dan
- viii. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Tujuan Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup serta tugas perbantuan yang ditugaskan terhadap Pemerintah Daerah. Maka dari itu, melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

(1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;
- Pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kegiatan Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;
- Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup ;
- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
- Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), Kepala Dinas mempunyai tugas :

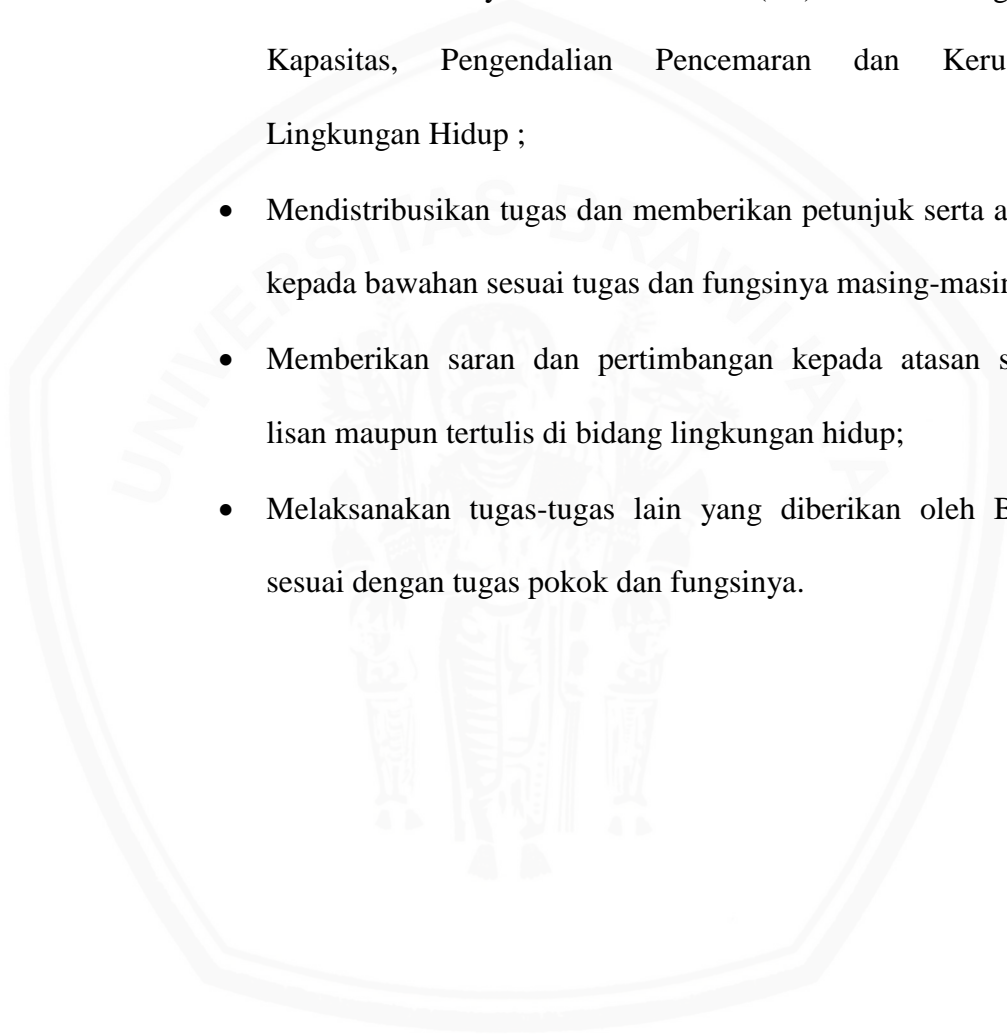
- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;

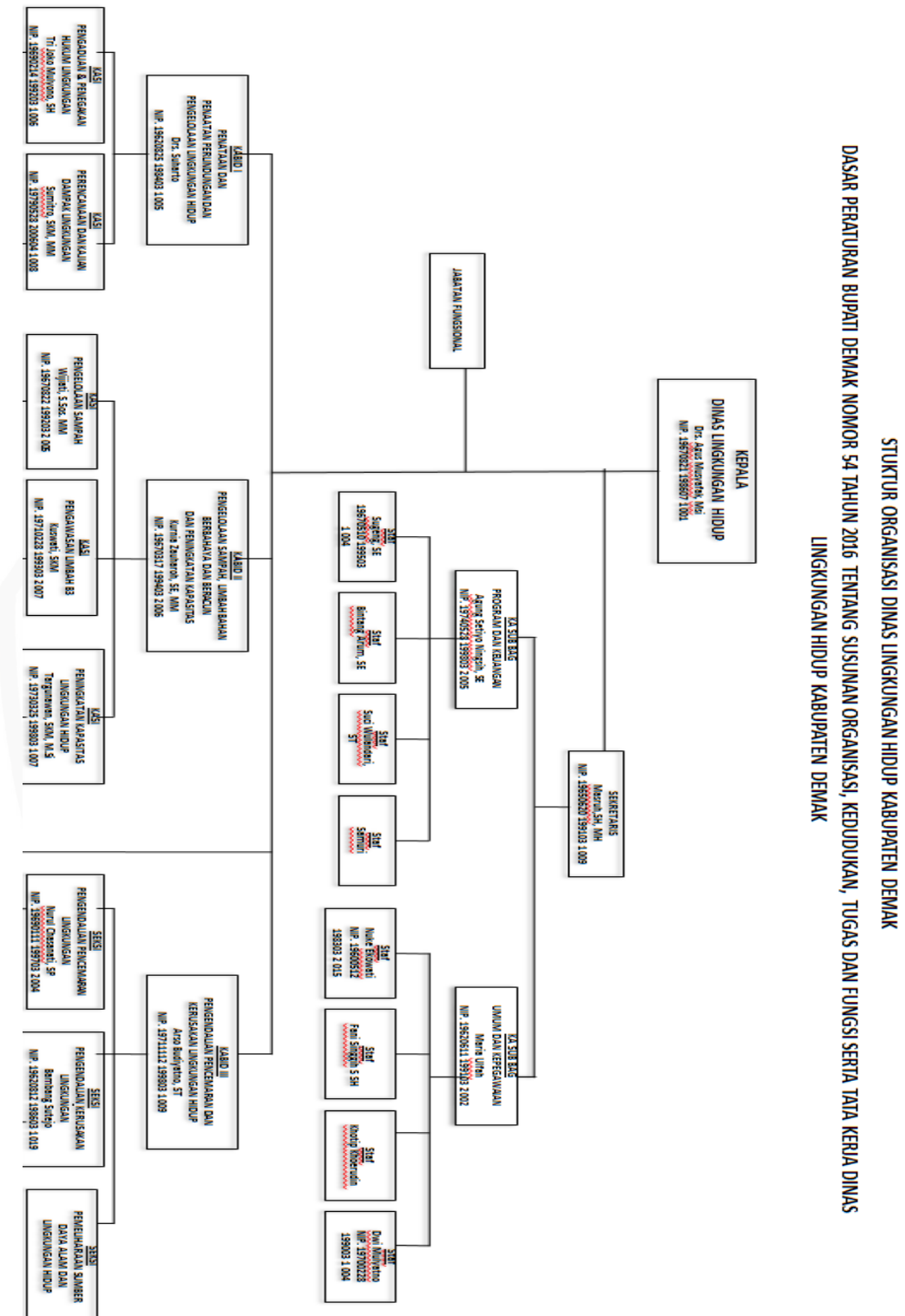
- Menyusun dan merencanakan program kerja di Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;
- Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;
- Mengkoordinasikan di Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;
- Melaksanakan pengawasan melekat tindak lanjut hasil evaluasi dalam pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan

Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;

- Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan unit kerja terkait dalam Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ;
- Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta arahan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis di bidang lingkungan hidup;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



2) Struktur Organisasi



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

d. PT. Djarum Foundation Kudus

1) Sejarah dan Visi Misi

Berdirinya PT. Djarum Foundation Kudus ini berawal dari pendiri Djarum pertama kali yakni Oei Wie Gwan. Beliau mempunyai prinsip dikala pertama kali membangun PT. Djarum pada tahun 1951 bahwa PT. Djarum akan lahir dan berdiri serta akan berkembang bersama masyarakat. Seiring dengan berkembangnya PT. Djarum sebagai industri rokok yang hampir menguasai pasaran di Indonesia, maka mulailah beliau mengembangkan prinsipnya dengan cara membangun atau membantu pembangunan sekolah tingkat dasar ataupun menengah agar dapat menghasilkan bibit potensial di daerah sekitar PT. Djarum berdiri. Akhirnya kasus tersebut menjadi cikal bakal PT. Djarum berikrar lebih untuk lebih mendekatkan diri terhadap masyarakat dengan membangun Bakti Sosial dan dimana Bakti Sosial ini merupakan bentuk perwujudan PT. Djarum dalam menanggapi kemauan dari pendiri untuk terus berkembang terhadap masyarakat. Dengan dibuatnya bakti sosial tersebut maka beliau juga mencetuskan PT. Djarum Foundation sebagai suatu anak perusahaan dari PT. Djarum yang memang dibuat untuk melaksanakan prinsip yang sudah dibuat oleh pendiri dan sekaligus sebagai pelaksana pertanggung jawaban sosial, meskipun memang pada awalnya pertanggung jawaban baru muncul ketika PT. Djarum Foundation sudah ada.

PT Djarum Foundation secara resmi lahir pada 30 April 1986 dengan mengemban visi yaitu “lahir dari dalam dan berkembang bersama lingkungan” yang dicanangkan oleh Michael Bambang Hartono dan

Robert Budi Hartono. Mereka berdua memiliki misi memajukan Indonesia menjadi negara digdaya yang seutuhnya. Semenjak itu lahirlah program-program yang lain diantaranya Bakti Olahraga (1969), Bakti Lingkungan (1979), Bakti Pendidikan (1984) dan Bakti Budaya (1992).

Salah satu konsen yang ingin ditonjolkan dalam program dari PT Djarum Foundation ialah bakti lingkungan. Dimana sejak tahun 1979 PT Djarum Foundation memulai inisiatifnya dalam melestarikan lingkungan dengan memulainya dengan penghijauan kawasan Kabupaten Kudus. Alasan dipilihnya Kudus adalah karena pada saat itu Kabupaten Kudus masih gersang dan membuat suhunya menjadi panas. Mulai dari hal tersebut maka PT Djarum Foundation secara serius memulai mengembangbiakan serta menanam pohon berbunga dan pohon berdaun rindang sehingga membuat Kudus menjadi lebih hijau dan sejuk. Ternyata hal tersebut mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat.

Sejak saat itulah, PT Djarum Foundation bertekad untuk melanjutkan program tersebut dengan menyasar seluruh kota di Indonesia. Untuk menjaga kesinambungan tersebut, maka PT Djarum Foundation mendirikan pusat pembibitan aneka tanaman penghijauan dan aneka pembibitan tanaman langka. Diharapkan bahwa pusat pembibitan ini dapat menyuplai beberapa area di kota-kota lain untuk dapat penghijaukan kota-kota tersebut. Adapun program yang menjadi andalan dari Bakti Lingkungan ini adalah program penanaman trembesi, program konservasi Lereng Gunung Muria dan Konservasi Lepas Pantai.

2) Program PT Djarum Foundation

a) Bakti Sosial

Bakti Sosial telah dilaksanakan sejak 1951, dilandasi oleh semangat persaudaraan dan gotong royong. Peduli dan memberdayakan masyarakat adalah filosofi dari setiap kegiatan-kegiatan Bakti Sosial. Bakti Sosial merupakan cikal bakal dari berdirinya PT Djarum Foundation.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bakti Sosial Djarum Foundation meliputi berbagai bentuk kegiatan sosial, mitigasi (pencegahan) dan kemanusiaan. Kegiatan ini lebih mengoptimalkan kegiatan yang dibuat oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat berdampak positif yang bersifat sosial.

b) Bakti Olahraga

Olahraga mempunyai peran dalam membangun karakter manusia. Lewat bulutangkis sebagai salah satu olahraga yang menjadi andalan dan sebagai kebanggaan bangsa, Bakti Olahraga Djarum Foundation terus berupaya mencetak bibit-bibit atlet mempunyai kompetitif yang dapat bersaing secara baik. Dengan PB Djarum yang sudah menjadi tempat pencetak pemain badminton berkelas dunia. Maka PT Djarum Foundation akan terus bertekad untuk terus berkomitmen dengan menggelar audisi tiap tahunnya secara ketat dan tersebar di beberapa kota di Indonesia.

c) Bakti Lingkungan

Merawat lingkungan untuk tetap terjaga menjadi bekal untuk mewujudkan negeri yang nyaman dan tentram. Oleh karena itu, maka kesungguhan dan kecintaan dalam menjaga diperlukan untuk terciptanya lingkungan yang mempunyai kualitas dan berguna bagi makhluk hidup di sekitarnya. Hal tersebut yang menjadi fokus utama Bakti Lingkungan Djarum Foundation dalam menjalankan program-programnya. Usaha dalam menjalankan misi menghidupkan Indonesia menjadi tekad dari PT Djarum Foundation yang terus digalakkan untuk masyarakat Indonesia.

d) Bakti Pendidikan

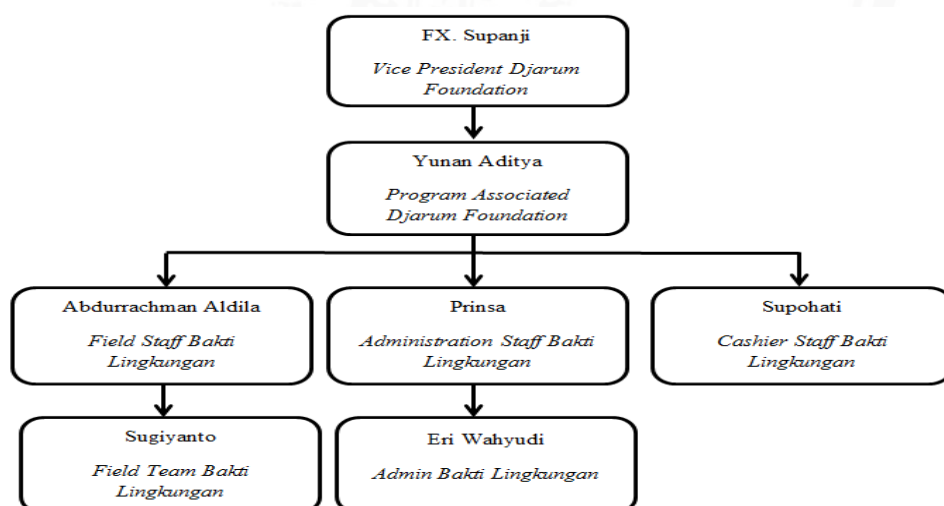
Djarum Foundation terus secara berkelanjutan dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia dari tahun 1984. Langkah ini diawali kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. PT Djarum Foundation ingin mencetak anak-anak di Indonesia mempunyai keahlian agar kelak keahlian tersebut dapat membawa mereka untuk berkembang. Konsep yang matang dan dibarengi dengan infrastruktur dan pemberian beasiswa menjadikan konsep Bakti Pendidikan tersebut menjadi berkelanjutan.

e) Bakti Budaya

Bakti budaya merupakan bakti yang tergolong baru dibandingkan dengan program yang lain. Djarum Foundation melalui program

Djarum Apresiasi Budaya mulai tertarik dengan budaya lokal di Indonesia yang akhirnya berusaha mengembangkan rasa kepedulian terhadap hasil budaya bangsa sebagai bukti konsistensi dalam usaha untuk turut memberi peran serta membangun Indonesia yang dimulai sejak tahun 1992. Dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, maka bukan perekonomian yang harus dibenahi agar semakin kuat, tetapi kelestarian dan kekayaan budaya bangsa Indonesia harus senantiasa diangkat. Kiat dalam meningkatkan misi meningkatkan kepedulian dan bentuk apresiasi masyarakat kepada kekayaan budaya di Indonesia, berbagai program kembali disuguhkan yang diharapkan dapat mendukung industri kreatif untuk berkarya dan menggali potensi untuk mengembangkan dan melestarikan keindahan, serta keragaman budaya Indonesia diselenggarakan.

3) Struktur Organisasi Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation



Gambar 5. Struktur Organisasi Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation

Sumber : Diolah oleh peneliti

B. Penyajian Data

1. Wujud peran setiap *stakeholders* dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Lingkungan

a. Peran dari Pemerintah

Pemerintah menjadi salah unsur dari Teori *Governance*. Pemerintah atau *Government* dapat dipandang sebagai *stakeholders* yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang diatur oleh negara. Pemerintah menjalankan peraturan tersebut sebagai unsur penggerak dan juga sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Unsur pemerintah dalam program CSR berbasis lingkungan dari PT Djarum Foundation ini adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dimana program tersebut dilaksanakan yakni di jalan pantai utara dari Kudus hingga Semarang. Dipilihnya jalan pantai utara dari Kudus hingga Semarang adalah jalur ini yang menjadi *pioneer* dari program penanaman trembesi dan ketika penanaman trembesi tersebut dianggap berhasil maka menjadi rekomendasi untuk mengembangkannya di seluruh Pulau Jawa.

Alasan dipilihnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagai pihak pemerintah dalam kasus ini adalah karena dinas tersebut menjadi koordinator dari dinas-dinas lain di Kabupaten Demak dalam menangani program Bakti Lingkungan dari PT Djarum Foundation. Dinas-dinas yang terkait dari program tersebut diantaranya adalah Dinas Perencanaan Umum, Dinas Perhubungan serta kelurahan yang menjadi perwakilan dari setiap desa yang lokasinya terdapat dalam program tersebut. Dinas Lingkungan Hidup

menjadi jembatan dari pihak pemerintahan jika ada upaya koordinasi dengan masyarakat maupun swasta dalam penanganan program Bakti Lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dimana dinas bertugas untuk mengurus semua hal terkait lingkungan hidup dan alam di daerah Kabupaten Demak. Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk dapat mensinkronkan antara amanat dan peraturan dari pemerintah pusat dengan visi dan misi dari Bupati Demak, agar nantinya tidak terjadi kesalahan komunikasi maupun tumpang tindih perintah dari dua pihak. Untuk dapat menjalankan tugas pokok yang sudah diberikan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup membagi ke dalam beberapa bidang penanganan sesuai dengan pokok permasalahan, yakni: 1) Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas 3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsinya untuk menjalankan program Bakti Lingkungan dari PT Djarum Foundation tidak melibatkan seluruh bidang dalam mengurus tentang program tersebut, tetapi hanya bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup saja yang berperan aktif. Bidang ini memiliki tugas dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian dan pengelolaan kegiatan mengenai semua hal yang terkait dengan pencemaran dan kerusakan yang terjadi di Kabupaten Demak.

Adapun usaha mewujudkan visi dan misi dari Bupati, maka dalam Peraturan Bupati Demak nomor 54 tahun 2016 pasal 24 yang mengatur tentang fungsi dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi diatas mengindikasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup teruntuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang ada di kawasan Kabupaten Demak. Indikasi tersebut terlihat karena tiap rinci dari proses perencanaan hingga pengendalian dibahas dalam Peraturan Bupati diatas. Tetapi pada prakteknya memang peraturan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sumberdaya yang tidak tersedia dengan baik maupun keterbatasan bibit tanaman dan keterbatasan anggaran menjadi halangan dalam penerapan peraturan tersebut secara maksimal.

Oleh karena itu sesuai dengan konsep Teori *Governance*, dikatakan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menjalankan amanat dari peraturan, tetapi ada peran dari *stakeholder* yang lain yakni pihak swasta dan pihak masyarakat. Pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki tugas masing-masing sesuai kapasitas yang ada dan nantinya ketiga *stakeholder* tersebut bersinergi untuk menghasilkan harapan yang diinginkan. Dalam kasus penggunaan *Corporate Social Responsibility* dari PT Djarum Foundation dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi, dari pihak pemerintah mengakui bahwa sinergitas dengan kedua *stakeholder* tersebut memang mutlak diperlukan terutama dengan pihak swasta. Pihak swasta sedikit banyak membantu upaya dari pemerintah dalam mencapai target jumlah penghijauan terutama tentang penanaman pohon yang diberikan dari Bupati Demak maupun pemerintah pusat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pemaparan dari hasil wawancara dengan Pak Arso selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bahwa :

“Terhusus kerjasama tentang penanaman pohon trembesi yang berkaitan dengan PT Djarum Foundation, maka ada dua fokus utama dalam sinergitas dengan swasta ini. Pertama adalah dalam rangka mencapai target penutupan lahan atau vegetasi yang diamanahkan oleh undang-undang RTH sebanyak 30% dari keseluruhan lahan Kabupaten Demak, karena memang mengakui bahwa masih kurangnya pengaplikasian ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak. Kedua adalah taman yang dikelola oleh PT Djarum Foundation membantu memperindah tampilan Kabupaten Demak tetapi hanya berjalan sekitar satu sampai dua tahun saja (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa peran dari swasta dalam hal ini PT Djarum Foundation dirasa membantu bagi pihak pemerintah. Menurut Undang-Undang tahun nomor 26 tahun 2007 pasal 29 huruf ayat 2

menjelaskan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Seperti peraturan yang sudah disebutkan, penutupan angka ruang terbuka hijau menjadi salah satu komponen yang penting untuk dikerjakan oleh Dinas Lingkungan dan dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dengan kehadiran pihak swasta maka akan membantu kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran tersebut terus dikejar guna untuk melengkapi target yang diberikan dan membuat ekspektasi dari pemerintah dapat terpenuhi. Berikut merupakan target penutupan vegetasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat dalam rencana strategis:

Tabel 6. Target Penutupan Lahan Vegetasi

Indikator	Program	Indikator Program	Target Capaian Sasaran					
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
Presentase tutupan lahan terhadap luas wilayah Kabupaten Demak, serta persentase penanganan kerusakan tanah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Presentase tutupan lahan terhadap luas wilayah Kabupaten Demak, serta presentase penanganan kerusakan tanah	5	1.316.500	5	2.405.280	5	3.767.059

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Tetapi karena target yang diinginkan oleh pemerintah daerah mengharapkan lebih tinggi daripada target yang diinginkan oleh pemerintah pusat, maka Dinas Lingkungan Hidup dirasa terus tertekan dengan hal tersebut. Maka dari itu sasaran tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui

seberapa jauh prospek itu berjalan. Untuk mengukur keberhasilan sejauh mana sasaran program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut dapat membantu kinerja pemerintah, maka Pak Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mencoba menjelaskan yakni :

“Sasarannya tentang penanaman trembesi memang sudah tercapai tapi belum memenuhi target tentang apa yang diinginkan pemerintah. Maka dari itu, memang tadi saya bilang jika boleh maka PT Djarum dapat menambah jumlah penanaman pohon trembesi untuk dapat di tanam di jalan kabupaten. Dan untuk tolak ukur keberhasilan sendiri memang dari pemenuhan penutupan vegetasi sebesar 30% tersebut. Dari awalnya memang kita pantau dengan kita potret, sehingga dapat diketahui perkembangan pohon trembesi yang dilakukan telah tumbuh secara sempurna selama berapa tahun. Dari situ kita bisa menilai program tersebut berhasil menutupnya ataukah tidak (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa sasaran penanaman pohon trembesi sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial PT Djarum sudahlah tercapai dengan baik. Usaha penutupan ruang terbuka hijau tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah juga secara intens melakukan kegiatan demi memantau program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut sekaligus memantau sampai mana program dari pemerintah tersebut dilaksanakan. Tetapi memang sasaran penutupan ruang terbuka hijau dianggap belum melampaui target dan target tersebut dianggap membebani Dinas Lingkungan Hidup, mengingat bahwa dana APBD yang dialokasikan untuk menuntaskan masalah ini sangatlah terbatas. Namun jika dilihat belanja bibit pohon tahun 2017 yang diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka peneliti mengatakan bahwa jumlah tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak dapat menutup target angka ruang

terbuka hijau yang diberikan. Berikut merupakan data belanja bibit pohon tahun 2017 :

Tabel 7. Jumlah Belanja Bibit Tanaman 2017 Kabupaten Demak

NO	KEGIATAN	JUMLAH BIBIT TANAMAN
1	17.09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	1.400 Batang
2	17.09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA (Pengusulan penghargaan kalpataru)	1.160 Batang
3	17.01 KSDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air	1.500 Batang
4	17.05 Perubahan Iklim	4.270 Batang
5	17.10 Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Tanaman Langka)	3.538 Batang
6	17.10 Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Mendahului Perubahan)	5.000 Batang
JUMLAH		16.868 Batang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Pernyataan diatas secara tidak sadar, pemerintah telah menjalankan fungsi lainnya sebagai komponen pemerintah dari Teori *Governance* dengan bersinergi dengan masyarakat dan swasta yang membahas tentang pertanggung jawaban sosial. Sesuai dengan arahan Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 2 tahun 2017 pasal 5 yang mengatakan bahwa :

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perusahaan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.

Peraturan daerah diatas dapat digambarkan bahwa dalam konteks sinergitas pertanggung jawaban sosial, pihak pemerintah mempunyai tiga peran yaitu perencanaan, pembinaan dan pengawasan. Perencanaan dilakukan oleh pihak pemerintah bersama pihak swasta untuk didiskusikan secara bersama dalam pembuatan rancangan pelaksanaan program terkait. Sementara dari peran pembinaan dan pengawasan menjadi tugas tunggal dari pihak pemerintah karena pemerintah harus memastikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan sesuai rancangan yang sudah direncanakan. Lebih lanjut Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa peran dari pemerintah dalam sinergitas ini adalah :

“Kalau pembinaan lebih dilakukan kepada masyarakat, jika Djarum saya kira mereka tidak perlu dibina karena mereka sudah menjadi bagian dari kamu. Jika pengawasan sendiri, sampai saat ini kita belum melakukan pengawasan karena kami anggap bahwa PT Djarum Foundation sudah dalam melakukan pengawasan secara berkala sehingga kami anggap cukup dengan penebangan yang dilakukan oleh pihak swasta. Kalau perencanaan sendiri memang kami membahas secara bersama-sama bagaimana perencanaanya dan Dinas Lingkungan Hidup membantu proses izin kepada pihak pemerintah terkait. Sementara untuk nota kesepahaman arsipnya sudah tidak ada mengingat disaat perencanaan dulu Dinas Lingkungan Hidup masih berupa kantor (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pihak pemerintah sudah melakukan upaya dalam melaksanakan upaya dalam memenuhi peraturan daerah tersebut. Upaya yang dilakukan memang terkadang belum maksimal mengingat masih ada unsur ketergantungan terhadap PT Djarum Foundation, yang membuat terkadang karena unsur tersebut yang membuat peran swasta lebih menonjol. Kemudian hilangan dokumen dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memang membuat batasan dari tugas yang diemban dari setiap pihak tidaklah jelas adanya. Dari segi perencanaan, rapat perencanaan memang dilaksanakan oleh kedua pihak dan hal tersebut dibuktikan dengan gambar berikut:



Gambar 6. Proses Perumusan Perencanaan antara PT Djarum dan Pihak Pemerintah

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Dalam perencanaan diatas disebutkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Demak mendapatkan penjelasan apa yang diinginkan oleh PT Djarum Foundation dan mencoba untuk menyatukan pemikiran dengan pihak

pemerintah agar nantinya kerjasama diantara kedua belah pihak tidaklah berhenti sampai program Bakti Lingkungan penanaman trembesi ini.

Selain itu, perencanaan tersebut mengakomodir tentang perjanjian dimana PT Djarum Foundation akan memberikan pohon trembesi kepada pihak pemerintah Kabupaten Demak ketika sudah dianggap layak atau bisa dikatakan bahwa pohon trembesi tersebut dikatakan layak sekitar 5 tahun setelah proses penanaman. Pada prosesnya, justru sampai 8 tahun kerjasama yang dijalin tentang program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup lewat Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang sebab mengapa hal tersebut tidak terjadi, yakni :

“Kalau buat kami proses serah terima tersebut tidak menjadi masalah, karena selagi dapat dikelola oleh PT Djarum Foundation sendiri kami tidak masalah. Kembali lagi ini tentang keterbatasan, bilamana ini program tersebut memang bisa diurus pihak Djarum maka kami tidak masalah dan justru berterima kasih. Dengan begitu, kami bisa mengurus untuk yang lain karena masih banyak kasus penghijauan yang belum terselesaikan seperti contoh di daerah Karangawe (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak) “

Hal tersebut mencerminkan bahwa keberadaan PT Djarum Foundation untuk mengakomodir seluruh kegiatan justru berdampak bahwa pemerintah hanya bersifat pasif. Masalah tersebut seakan membutuhkan bahwa pihak pemerintah tidak mampu dalam mengidentifikasi adanya ketergantungan yang ada pada dirinya dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder* yang terlibat dalam program yang kolektif tersebut. Dalam penanganan Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan dukungan yang lebih dari swasta mengingat masih butuh

banyak lagi lahan yang masih belum dianggap hijau. Lebih lanjut Arso Budiayatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa :

“Harapan kami bekerjasama dengan PT Djarum adalah mereka mengaplikasikan CSRnya di Kabupaten Demak serta mengharapkan kontribusi lebih mengingat kurangnya anggaran dan sumberdaya yang didapat. Harapan kami selanjutnya dari penanaman trembesi ini adalah pohon tersebut ditanam bukan hanya Jalur Pantura saja, sebisa mungkin nambah ke jalan kabupaten. Untuk pengelolaan tamannya bisa difungsikan kembali pengelolaan taman yang ada di sekitar Kabupaten Demak. Karena jika mengandalkan dari dana APBD saja, maka taman tersebut akan bersifat minimalis (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”.

Dalam pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sinergitas yang dilakukan dirasa berdampak positif jika terlihat dari ungkapan dari narasumber. Tetapi perlu diingat bahwa program ini memang dilaksanakan bukanlah berasal dari inisiatif dari pemerintah melainkan memang murni ide dari PT Djarum Foundation yang menginginkan lingkungan hidup di Indonesia memiliki klasifikasi yang terawat dan dapat membantu upaya penghijauan. Upaya tersebut juga sebagai upaya pertanggung jawaban sosial sebagai swasta sehingga mereka mengikutsertakan peran pemerintah untuk mengimplementasikan program tersebut. Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya bersedia mengapresiasi langkah yang diambil oleh PT Djarum Foundation karena sedikit atau banyak juga akan membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

b. Peran dari Swasta

Pilar selanjutnya dari Teori *Governance* menjadi ialah pihak swasta. Pihak swasta dalam teori ini ialah pihak perusahaan swasta yang aktif dalam

interaksi dalam sistem pasar seperti industri termasuk kegiatan sektor informal. Pada dasarnya pihak swasta dalam konsep tersebut memiliki fungsi dan tugas seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, menjadi pendukung finansial dalam program yang dilaksanakan dan penyumbang pikiran guna membantu proses pembuatan kerangka program. Berdasarkan program Bakti Lingkungan dengan kegiatan penanaman trembesi, pihak swasta yang berperan adalah PT Djarum Foundation.

PT Djarum Foundation adalah anak perusahaan dari PT. Djarum yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan perusahaan tersebut mengkhususkan diri untuk mengurus *Corporate Social Responsibility* maupun *Public Affair*. Bakti Lingkungan merupakan salah satu dari lima kegiatan yang diinisiatifkan dari PT Djarum Foundation sebagai upaya mewujudkan keinginan untuk mewujudkan visi dari perusahaan sendiri yakni lahir dari dalam dan berkembang bersama lingkungan. Seperti namanya, bakti lingkungan merupakan kegiatan yang dispesifikasikan untuk merawat lingkungan untuk tetap terjaga menjadi bekal untuk mewujudkan negeri yang nyaman dan tentram. Diantara kegiatan yang dinaungi bakti lingkungan terdapat penanaman trembesi, dimana program *Trees for Life* ini dimulai dari tahun 2010 dengan sasaran awal jalan pantura Kudus hingga Semarang. Munculnya ide tersebut dijabarkan oleh Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan yang menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Bakti Lingkungan tersebut yakni :

“Pertamanya adalah *owner* dari PT Djarum suka dengan lingkungan dan bermula dari melihat Kabupaten Kudus yang perkembangan

indsutrinnya sangat berkembang dengan pesat tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan lingkungan dan banyak pohon yang ditebang yang membuat Kudus menjadi panas. Dari situlah kami membuat program Bakti Lingkungan yang dimulai dari tahun 1979, dimulai dengan membagi bibit buah kepada masyarakat dan melakukan penghijauan di jalan raya. Sampai akhirnya hal itu berhasil dengan Kudus pernah menjadi penghasil mangga di Pulau Jawa. Dari situ kami memulai dengan pembuatan pusat pembibitan. Melihat hasilnya berdampak baik maka sampai akhirnya kami memutuskan untuk memulai ke luar kota dan semuanya *start* dari Kudus (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Hasrat yang muncul dari owner PT Djarum memang menjadi latar belakang diadakannya program Bakti Lingkungan tersebut dan pada tahun 2010, program penanaman trembesi sendiri baru digagas. Hasil wawancara dengan Pak FX. Supanji selaku *Vice President* dari PT Djarum Foundation mengatakan bahwa awal dari program penanaman trembesi tersebut berawal dari :

“*Triger* dari penanaman trembesi berawal dari ide Presiden dan sudah diuji oleh Prof Endes dari IPB yang menyatakan bahwa trembesi tersebut memang dapat menyerap karbon dioksida secara maksimal. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, maka turunan ketiga dari Djarum memutuskan untuk menanam trembesi dari Merak sampai Banyuwangi. Semuanya dimulai dari Kudus melalui berapa tahapan dari tahun per tahun. Setiap lokasi mengalami penanaman dan perawatan selama 3 tahun, tetapi untuk jalur Kudus hingga Semarang tidak bisa dilakukan dalam 3 tahun karena memang banyak hambatan dan aduan yang terus dilaporkan (Hasil tanggal 5 Maret 2018 pukul 12.30 di Ruang Meeting Cora PT Djarum Foundation Kudus.)”

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya fungsi akademis secara langsung dalam program penanaman trembesi tersebut. Akademis merupakan elemen dari universitas atau akademika yang memiliki tugas untuk membuktikan secara ilmiah dari program yang akan direalisasikan. Pihak PT Djarum Foundation menghubungi langsung pihak IPB untuk

berdisukusi tentang program dan jenis tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida yang maksimal.

Secara tidak langsung, program penanaman trembesi yang diinisiasi oleh PT Djarum Foundation merupakan pengaplikasian dari apa yang menjadi ide dari Presiden. Oleh karena itu, program ini menjadi perhatian serius dari PT Djarum Foundation sebagai upaya perbaikan dalam banyaknya polusi yang beredar di jalan utama daerah, terutama jalan provinsi yang menjadi sumber polusi terbanyak.

Target-target yang telah dicanangkan oleh PT Djarum lama kelamaan berbuah baik dengan melihat pertumbuhan pohon trembesi sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi tak dipungkiri bahwa terdapat beberapa pohon yang gagal dalam proses penanaman. Setelah program tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 8 tahun, maka sudah seharusnya PT Djarum Foundation sudah dapat mengukur bagaimana tingkat keberhasilan dari usaha yang telah dilakukan . Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan menjelaskan tentang ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dan hasil apa yang diinginkan sebagai berikut :

“Ukuran keberhasilannya kita tidak mengukur secara kuantitas tetapi kita memakai ukuran kilometer karena kita lebih mementingkan kualitasnya. Keberhasilannya sih Cuma 60%-70% yang berhasil tetapi lebih kepada dampak dari penanaman trembesi tersebut. Kita juga pernah tanya dengan beberapa pengendara jalan dan mereka puas dengan kinerja mereka (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Pemaparan diatas memiliki pendapat bahwa kualitas dari pohon trembesi lebih diutamakan agar nantinya trembesi tersebut dengan dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan maksimal. Hal tersebut terbukti

dengan puas nya pengendara yang lewat di jalur tersebut. Tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa masyarakat sekitar juga setuju dengan penadapat dari masyarakat pengguna jalan. Namun dari wawancara diatas juga menunjukkan bahwa PT Djarum Foundation juga tetap mempertimbangkan unsur dari masyarakat sesuai dengan konsep Teori *Governance*. Kesinergitasan dari masing-masing *stakeholder* yang saling berpengaruh membuat PT Djarum Foundation sebagai pihak swasta sadar. Maka dari itu, mereka selalu mendiskusikan tentang langkah yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan menjelaskan tentang peran yang diberikan oleh pihak swasta untuk masyarakat sekitar dalam program penanaman tersebut yakni :

“Kalau dilibatkan sejauh mana masyarakat dalam penanaman trembesi, pada awal penanaman kita ijin kepada mereka setelah mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain ijin juga, kita memberdayakan masyarakat lokal untuk proses penanaman untuk membantu menanam yang mempunyai tujuan untuk memunculkan rasa memiliki dari masyarakat sekitaar. Langkahnya adalah dengan melakukan pelatihan terhadap masyarakat sekitar untuk bekerja merawat pohon-pohon trembesi yang ditanam (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Lebih lanjut Pak Aldi menjelaskan tentang pemberian pelatihan terhadap masyarakat sekitar adalah: “Untuk pelatihan terhadap masyarakat sendiri dilakukan dengan mengirim tenaga-tenaga tersebut untuk melakukan pelatihan yang dilakukan oleh PT Djarum Foundation, tetapi untuk bagian penanaman trembesi daerah sekitar Kudus. Alasan utamanya karena daerah penanaman yang masih dalam jangkauan jadi masih dapat ditangani sendiri oleh pihak kami. (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Selain alasan utama tentang masih ditanganinya pohon trembesi di daerah Kudus termasuk jalan dari Kudus hingga Semarang, alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah apabila nantinya pohon yang seharusnya sudah diberikan 3 tahun sesudah penanaman tersebut menjadi tidak terawat. Pada prosesnya memang seharusnya serah terima sudah dilakukan tetapi pada prakteknya tetap dari pihak swasta yang merawat. Hal ini juga membuat dari pihak pemerintah sendiri merasa terbantu dan bahkan pihak pemerintah berharap bahwa pohon trembesi secara bertahap terus di *backup* oleh pihak swasta. Tindakan demikian yang secara tidak langsung membuat pihak pemerintah menjadi perannya kurang terlihat dan perlu adanya peran yang lebih signifikan yang membuat peran dari pemerintah lebih terlihat.

Jika berbicara dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar menjadi pengawas dari program yang dilakukan. Melainkan juga tentang mengatur dalam hal perijinan yang menyangkut tentang program terkait, menjadi jembatan komunikasi maupun komunikasi antar *stakeholder* dan sebagainya. Dalam konteks ini, Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan menjelaskan tentang peran yang dilakukan pemerintah dalam program penanaman trembesi, yaitu :

“Untuk perjanjian dengan pemerintah, kami tidak mempunyai MOU secara tertulis yang menulis secara rinci tugas dimana penanaman trembesi itu dilaksanakan, tetapi pihak kami dan pihak pemerintah menganggap bahwa proses seremonial yang dibarengi dengan peresmian penanaman trembesi tersebut menjadi perjanjian kami. Karena seremonial tersebut sudah dianggap mewakili pemerintah daerah dengan kehadiran MUSPIDA dan MUSPIKA beserta seluruh dinas-dinas. Dan perlu dicatat kita melakukannya setelah penanaman karena ingin menunjukkan hasil yang sudah diberikan. Untuk ijin sendiri kita lebih kepada petinggi dari daerah yang kita tanami, setelah

penanaman selesai. Kita juga mengadakan seremonial sebagai tanda bahwa penanaman yang kita lakukan sudah selesai. (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Pada kesepakatan dari ketiga *stakeholders* tersebut, tidak ditulis dengan suatu nota kesepahaman. Proses seremonial dijadikan sebagai moment dimana ketiga *stakeholders* tersebut melakukan perjanjian dengan jalan kesepahaman. Seremonial tersebut digunakan untuk menyadarkan *awarness* kepada masyarakat bahwa kita sudah menanam trembesi dan harapannya adalah setiap *stakeholders* dapat berperan serta mereka dalam menjaga dari pertumbuhan pohon tersebut. Kelemahan dari perjanjian ini adalah tugas dari setiap *stakeholders* selain *stakeholders* utama yakni pihak PT Djarum Foundation menjadi kabur. Lebih lanjut PT Djarum Foundation juga melakukan ijin dengan pemerinrah yang dijelaskan oleh Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan yakni :

“Jika hubungan dengan pemerintah pusat, sebelum melakukan seremonial kita telah meminta ijin kepada B2PJN dimana mereka yang mengatur keteraturan lingkungan pada jalur pantura. Setelah seremonial, giliran kita secara rutin membuat laporan terhadap pihak kementerian Lingkungan Hidup tentang penambahan jumlah pohon yang ditanaman setiap tahunnya (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Peran dari swasta secara lebih luas ditunjukan oleh PT Djarum Foundation yang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan melakukan izin maupun membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh swasta dalam hal ini adalah program penanaman trembesi. Untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) sektor V, yang menjadi penanggung jawab jalan di daerah pantai utara bagian timur. Disini

pihak swasta melakukan ijin penghijauan turus jalan dari Semarang hingga Losari dan Demak hingga Losari. Perijinan dilakukan agar nantinya kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan yang menghinggapi program tersebut akan mudah untuk diatasi. Selain itu, penanaman trembesi dapat membantu pihak dari B2PJN untuk mengurangi analisis dampak lingkungan karena menanam trembesi di jalur dimana mereka ditugaskan. Selain itu, PT Djarum Foundation juga membantu untuk menutup lahan vegetasi yang sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga penanaman trembesi tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Demak untuk mencapai capaian yang diinginkan.

Langkah yang dilakukan PT Djarum Foundation tersebut salah satunya adalah sebagai langkah pengimplemtasian program *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam arahan Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 2 tahun 2017 pasal 5. Dimana dalam peraturan tersebut, pihak swasta menjalankan tugas pelaksanaan dan pelaporan program serta menjalankan perencanaan program bersama pihak pemerintah. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan serta lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama. Langkah perijinan terhadap B2PJN diatas merupakan langkah perencanaan dimana dalam mendapatkan ijin dari pihak B2PJN, PT Djarum Foundation harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan serta mendapatkan

bantuan perijinan dalam pengaplikasian program penanaman trembesi tersebut.

Fungsi yang kedua adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program tugas yang penting dalam program penanaman trembesi ini. PT Djarum Foundation secara konsisten diwajibkan untuk menjalankan program tersebut sesuai dengan arahan peraturan yang sudah dibahas dengan pihak pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Pelaksanaan program tersebut dijabarkan menjadi beberapa tahapan yakni :

- (1) Proses Pembibitan
 - a. Penyemaian
 - b. Skarifikasi/ pengelupasan biji
- (2) Proses Penanaman
 - a. Mencari lokasi tanam yang tepat
 - b. Menyediakan lubang dengan kedalaman dan lebar yang ditentukan
 - c. Pemupukan
 - d. Penanaman
 - e. Menutup lubang dengan campuran tanah dan pupuk kandang
- (3) Proses Perawatan (selama 3 tahun)
 - a. Pendangiran
 - b. Pemupukan
 - c. Pemangkasan
 - d. Penyiraman



Gambar 7. Proses Pelaksanaan Program Penanaman Trembesi

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Tugas yang terakhir adalah proses pelaporan. PT Djarum Foundation melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memberikan data jumlah pohon trembesi dalam program terkait yang sudah ditanam. Data tersebut akan masuk dalam hitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang target penanaman pohon yang ada di Indonesia. Berikut merupakan data pohon yang sudah diberikan oleh PT Djarum Foundation yang ditanam pada tahun ini :

Tabel 8. Data Jumlah Pohon Trembesi yang Tertanam

Penanaman Trembesi di Pantura Jawa		
Wilayah	Tahun	Jumlah Pohon Tertanam
Kudus-Merak	2010-2013	19.731
Kudus-Banyuwangi	2013-2015	29.250
TOTAL		48.981
Penanaman Trembesi selain Pantura Jawa		
Wilayah	Tahun	Jumlah Pohon Tertanam
Jembatan Suramadu-Pertigaan Bangkalan Madura	2013	1.650
BI-Lombok	2013	2.241
BI-Kualanamu Medan	2014	3.968
Tol Cipali	2015	12.979
Highway KNO Medan	2015	924
Keliling Medan	2016	15.446
Yogya-Semarang-Solo	2016	8.576
TOTAL		45.784

Sumber : PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Hasil tersebut diambil pada tahun 2018 dengan total penanaman mencapai 94.765 di seluruh Indonesia. Penanaman pohon terutama untuk program ini menjadi suatu nafas bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan ruang untuk udara yang lebih bersih. Dalam progra, Bakti Lingkungan penanaman trembesi, PT Djarum mengharapkan dukungan dari masing-masing *stakeholders* yakni masyarakat dan pemerintah untuk menambah peran yang signifikan agar program penanaman trembesi terus mendapatkan dampak yang positif bagi semua pihak. Lebih lanjut Pak FX. Supanji selaku *Vice President* dari PT Djarum Foundation menjelaskan bahwa :

“Kami mengharapkan bahwa masyarakat terus menjaga lingkungan disekitar kita, supaya nanti kalau pohon tersebut jadi maka akan membuat suasana di sekitar wilayah tersebut menjadi asri. Maka dari itu, kami mengadakan seremonial dengan mengajak para seniman dan artis pecinta lingkungan berserta para pejabat terkait supaya menyadarkan kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Kita juga mengajarkan agar jangan merusak tanaman yang sedang ditanam, seperti menggembala dan melakukan aktivitas yang membuat kebakaran (Hasil tanggal 5 Maret 2018 pukul 12.30 di Ruang Meeting Cora PT Djarum Foundation Kudus.)”

Lebih lanjut mengenai pembahasan mengenai masyarakat, Pak Abdurrachman Aldila selaku Field Staff Bakti Lingkungan menjelaskan tentang peran masyarakat lain yakni komunitas lingkungan yang melingkupi bina lingkungan penanaman trembesi tersebut. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk komunitas lingkungan kami melibatkan beberapa komunitas sebagai mitra sekaligus membantu pelaksanaan program. Namun kalau di wilayah Kudus sampai Semarang, komunitas tersebut sudah tidak berhubungan karena tidak adanya kesepakatan atau hal-hal yang mengikat karena dianggap program tersebut sudah dilaksanakan. Beda jika di daerah yang masih terdapat program penanaman trembesi, komunitas di sekitar lokasi penanamna ikut menjaga dan ikut mengembangkannya. (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus)”

Pernyataan yang diucapkan dari *Vice President* dari PT Djarum Foundation Kudus memperlihatkan bahwa usaha yang dibangun oleh berbagai pihak tidak ingin berakhir sia-sia. Program penanaman pohon

trembesi ini didukung oleh semua pihak, yang berguna juga untuk dapat mencegah rusaknya lingkungan akibat pemanasan global. Beliau menginginkan kesadaran dari masing-masing pihak untuk menjalankan fungsinya dengan baik tanpa ada rasa ingin menguasai.

c. Peran dari Masyarakat Madani

Pilar *stakeholders* yang terakhir dalam Teori *Governance* ini adalah masyarakat madani. Secara hierarki masyarakat dianggap sebagai aktor yang pasif dalam lingkaran kerjasama *stakeholders* yang terjalin karena masyarakat merupakan sasaran dari program yang dijalankan. Semua dapat dimengerti karena perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis yang direncanakan pada akhirnya akan berorinetasi dan kembali kepada masyarakat. Tetapi dalam konsep ini, masyarakat dianggap menjadi unsur penting yang mempengaruhi jalannya kegiatan. Masyarakat tidak hanya ikut dalam pelaksanaan kebijakan tetapi juga ikut dalam perumusan kebijakan yang dibuat.

Sinergitas dari ketiga *stakeholders* tersebut dituntut untuk selaras karena dengan harmonisnya hubungan ketiganya akan membuat kestabilan dari program tersebut terus berjalan semakin membaik. Konsep tersebut sekarang sudah mulai banyak diadaptasi oleh pihak-pihak terkait pemerintah, swasta maupun masyarakat demi memuluskan proses keberlangsungan program. PT Djarum Foundation sebagai *stakeholders* utama dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi, akan mengkondisikan program tersesut dengan menggelar kerjasama dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Lingkungan Hidup

akan menjadi koordinator dari beberapa dinas yang terkait dengan program penanaman trembesi dimana peran pemerintah tersebut perlu mempunyai proses penyelenggaraan pembangunan yang solid yang melibatkan beberapa *stakeholders* untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemerintah.

Jika peran dari masyarakat, PT Djarum Foundation akan menjadikan peran masyarakat menjadi unsur penting dengan memberikan ruang bagi mereka untuk dapat ikut dalam program tersebut terutama pada saat terjadinya pelaksanaan program. Diharapkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menggalakan program tersebut. Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan yang menjadi perwakilan dari PT Djarum Foundation menyebutkan bahwa pentingnya unsur masyarakat disini yaitu :

“Peran dari masyarakat tentulah penting terlepas dari seremonial. Di dalam seremonial kita hanya menyadarkan pada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tetapi seterusnya seperti saya bilang bahwa kami melatih mereka untuk dapat merawat pohon trembesi tersebut. Masyarakat juga dapat mengirimkan keluhan apabila mereka terganggu dengan program yang dilaksanakan (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Pernyataan senada juga dikatakan oleh Arso Budiayatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang merasa bahwa peran masyarakat dianggap penting dalam pelaksanaan maupun sebagai aktor yang dapat memberi *feedback* bagi pemerintah maupun swasta jikalau ada beberapa koreksi terkait program tersebut, pernyataan tersebut sebagai berikut :

“Untuk masyarakat dalam program ini akan kami bina dengan memberi penyuluhan tentang pentingnya lingkungan. Soalnya kan nanti yang mendapat dampak dari penanaman trembesi ini kan mereka sendiri.

Masyarakat juga dapat melaporkan jika tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan” (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Penelitian tentang program Bakti Lingkungan penanaman trembesi ini, akan lebih fokus terhadap penanaman pohon trembesi pada wilayah jalur pantura Kudus hingga Semarang. Pemilihan tempat untuk dapat mengambil contoh responden yang ingin diwawancarai oleh peneliti adalah pada wilayah Jogoloyo, Wonosalam Kabupaten Demak. PT Djarum Foundation menyarankan daerah Jogoloyo sebagai tempat peneliti mengambil responden untuk dapat diwawancarai karena wilayah tersebut merupakan wilayah dimana seremonial simbolis penanaman trembesi diadakan.

Peran masyarakat sesungguhnya telah diatur oleh peraturan daerah secara rinci, tetapi kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat menjadi tidak mengerahui tentang tugas mereka sebagai *stakeholders* yang berpengaruh dalam program yang berkaitan dengan pertanggung jawaban sosial. Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 2 tahun 2017 pasal 43 tentang peran masyarakat terhadap program *Corporate Social Responsibility* yaitu :

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota FTJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan

d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;

Penjabaran peraturan diatas dapat dikatakan bahwa peran dari masyarakat ternyata tidak sebatas sebagai aktor yang bertugas sebagai bagian dari pelaksana program maupun sebagai objek dari keberhasilan atau tidaknya program tersebut dilaksanakan. Peran-peran masyarakat seperti menyampaikan informasi tentang program tersebut maupun menjadi duta seakan hanya menjadi bagian dari peraturan. Sebagian masyarakat justru tidak mengetahui tentang tugas yang dipikul oleh masyarakat dan yang mereka ketahui adalah penanaman trembesi tersebut ditanam hanya untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik. M (Laki-laki) sebagai masyarakat sekitar yang mengetahui tentang program tersebut menyebutkan bahwa :

“Saya tahu tentang pohon trembesi itu yang ditanam di sepanjang jalan lingkar itu, ya saya fikir manfaatnya memang membuat suasana di sekitar jalan yang dahulu panas menjadi lebih teduh dan rindang. Untuk ikut serta dalam meninjau pohon trembesi tersebut saya rasa saya hanya sekedar menjaga pohon tersebut agar berkembang semestinya (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Pernyataan tersebut seakan peran dari masyarakat sangat minim dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut. Pernyataan senada juga diucapkan oleh A (Laki-Laki) yang mengatakan kurang lebih sama dengan masyarakat sebelumnya bahwa beliau hanya mengetahui tentang program tersebut saja tanpa mengetahui fungsi yang seharusnya diaplikasikan oleh masyarakat, berikut pernyataan beliau :

“Ya yang saya tahu memang penanaman pohon disana dibangun oleh PT Djarum, untuk yang kami lakukan untuk menjaga pohon tersebut sih enggak ada ya mas. Paling hanya sekedar memantau saja tanpa ada tindakan lebih lanjut jika ada yang terjadi terhadap pohon tersebut

(Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 13.02 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Pernyataan tersebut menambah kuat bahwa yang dialami oleh masyarakat saat ini hanya sebagai tujuan keberhasilan dari program tersebut. Beliau sebenarnya sudah menjalankan salah satu point dari yang diamanahkan oleh peraturan daerah yakni pemberian saran. Tetapi kurangnya informasi tentang kemana mereka mengadakan perihal yang menyangkut tentang pohon trembesi tersebut. Beralih tentang keberhasilan dari penanaman pohon trembesi tersebut, penanaman tersebut sudah dikatakan selesai karena pengerjaanya hanya bersifat 3 tahun setelah penanaman tetapi untuk wilayah Kudus hingga Semarang mendapatkan kelebihan waktu hingga sekarang untuk perawatan. Keberhasilan tersebut diakui oleh M (Laki-laki) bahwa :

“Iya mas membantu sekali karena dahulu terasa sangat panas apalagi di wilayah jalan lingkar situ. Terus juga buat pengendara yang lelah dalam perjalanan dapat meneduh di bawah pohon trembesi tersebut. Jadi pohon tersebut bukan hanya menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekitar saja tetapi juga untuk orang yang lewat di jalan itu (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Tujuan dari PT Djarum Foundation untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dengan kehadiran program penanaman trembesi tersebut sudah terpenuhi jika berpatokan dengan jawaban dari masyarakat sekitar. Dikatakan juga bahwa tujuan dari swasta sendiri untuk mewujudkan program tersebut memang untuk pengendara lewat akan merasa nyaman ketika melintasi kawasan yang bersangkutan. Dengan respon positif yang diberikan oleh masyarakat maka PT Djarum Foundation bertekad untuk lebih membuat program tersebut menjadi bersifat berkelanjutan, maka dari itu

sekarang telah dicanangkan program penanaman pohon buah Jambu Air di sekitar kawasan sungai di jalan pantura Kudus hingga Semarang sebagai respon dari hasil positif yang diberikan terhadap program Bakti Lingkungan penanaman trembesi.

Keikutsertaan masyarakat dalam penanaman trembesi adalah ketika seremonial pasca ditanamnya pohon trembesi tersebut dinyatakan selesai. Seremonial adalah saat dimana ketiga *stakeholders* dalam penggerak program ini yakni pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat menghadiri sekaligus sebagai tanda perjanjian kesepakatan sinergi ketiga *stakeholders* tersebut untuk menyatukan visi dan misi menjaga program agar bersifat keberlanjutan. Masyarakat dilibatkan selain menjadi bukti program tersebut sudah selesai ditanam, tetapi juga sebagai edukasi tentang fungsi dan manfaat mengenai tanaman trembesi.

Edukasi masyarakat dalam mengetahui lebih dalam tentang tanaman trembesi tersebut disertai dengan sosialisasi bagaimana penanaman tersebut dipilih dan bagaimana perawatan pohon dilakukan. Sosialisasi tersebut diharapkan akan terus diadakan agar masyarakat menjadi lebih memiliki tanggung jawab menjaga karena mengingat pentingnya manfaat pohon trembesi terhadap lingkungan. Sosialisasi akan dilakukan secara berkala sesuai dengan umur pohon trembesi. Tetapi menurut A (Laki-Laki) sosialisasi hanya dilakukan pada seremonial tersebut dan tidak bersifat berkelanjutan. Beliau mengatakan :

“Sosialisasi enggak pernah dilakukan mas, ya dulu pernah pas peresmian pertama saja oleh Djarum, tetapi untuk tindak lanjutnya tidak ada sosialisasi lanjutan. Walaupun gitu Djarum masih banyak kegiatan disini mas. Dari pemerintah juga tidak ada sosialisasi lanjutan seperti

yang mas katakan (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”



Gambar 8. Penanaman trembesi oleh Pemerintah Demak, pihak PT Djarum Foundation dan Masyarakat

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan



Gambar 9. Tabel Seremonial Peresmian Program Penanaman Trembesi Jalur Pantura dari Kudus Hingga Semarang

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Beberapa gambar diatas menunjukkan bahwa semua *stakeholders* ikut andil dalam seremonial penanaman trembesi jalur pantura Kudus hingga Semarang. Seluruh lapisan pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat sekitar

ikut berbaur bersama terlibat langsung dalam seremonial tersebut. Antusiasme dari seluruh pihak menjadi suatu sinyal baik untuk PT Djarum Foundation maupun pihak swasta lain untuk dapat menerapkan program *Corporate Social Responsibility* dengan konsep lingkungan.

Seremonial menjadi suatu acara yang penting bagi ketiga *stakeholders* tersebut, tetapi perlu diingat bahwa setiap *stakeholders* memiliki bagian tugas masing-masing sehingga setiap *stakeholders* tidak disarankan untuk mendominasi melainkan lebih bersifat mengayomi dan membantu secara wajar agar *stakeholders* terkait tidak ketergantungan maupun melemah perannya. Semua pihak menginginkan untuk adanya wadah dimana ketiga aktor ini memiliki tempat menyampaikan pendapat tentang usulan dan masukan yang berguna untuk menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak untuk berbenah. M (Laki-laki) menuturkan harapannya kepada pihak pemerintah maupun swasta terkait program penanaman trembesi maupun kegiatan terkait dengan penerapan *Corporate Social Responsibility* tersebut yaitu “Ya harapan saya ya kalo program yang berjalan untuk lebih ditingkatkan dan kalau bisa ditambah program lain yang dapat membantu masyarakat sekitar sini (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Komentar sama diucapkan oleh A (Laki-Laki) dimana menjelaskan tentang harapan untuk ditingkatkan lagi level dari program tersebut, penjelasan tersebut adalah :

“Hasil dari penanaman pohon ini saya kira sudah baik, tetapi kami tetap menginginkan program berjalan lebih baik, entah menanam pohon lagi maupun yang lain. Untuk pemerintah lebih digiatkan untuk menggelar program serupa untuk menyejahterakan masyarakat untuk

jadi lebih baik (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Harapan yang diucapkan dapat menjadi masukan tersendiri bagi pihak swasta dalam merefleksikan program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut agar menjadi acuan evaluasi untuk penerapan di wilayah lain. Bagi pemerintah dapat menjadi pelajaran dan masukan untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang diinginkan oleh masyarakat untuk dapat disampaikan kepada pihak swasta atau membuat forum dimana mereka dipertemukan untuk bertukar pikiran terkait program yang dilaksanakan.

2. Sinergitas dari setiap Unsur *Stakeholders* dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Lingkungan

a. Komunikasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation

Kita tahu bahwa komunikasi merupakan komponen yang penting dalam behubungan antar imdividu dan individu maupun kelompok dan kelompok. Komunikasi yang baik dalam suatu hubungan dalam organisasi dapat menciptakan sebuah keberhasilan jika diatur dengan bijaksana. Tetapi sebaliknya apabila komunikasi tersebut berjalan dengan tersendat maka akan berantakan. Dalam program Bakti Lingkungan, ketiga pilar tersebut dituntut untuk dapat bersinergi dengan keseimbangan dari semua pihak agar program atau visi dan misi yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar. Mengingat program lingkungan yang berkaitan yang dengan ketiga pilar *stakeholders* yang sesuai dengan teori *Governance* tersebut yakni pihak swasta yang diwakili PT Djarum Foundation, pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan masyarakat sekitar ini tidak hanya

terbatas dalam satu program saja. Maka diharapkan sinergitas yang menjadi kunci komunikasi antara mereka diharapkan terus bersifat berkelanjutan.

Sinergitas untuk menjalankan proses pertanggung jawaban sosial Bakti Lingkungan penanaman trembesi, dibutuhkan keselarasan dalam komunikasi maupun koordinasi secara intens diantara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terkait diwajibkan untuk berkomunikasi secara baik agar tidak terjadi kesalahan proses pelaksanaan program terkait. Dalam program penanaman trembesi Bakti Lingkungan ini, seharusnya komunikasi tidak menjadi masalah mengingat program penanaman trembesi jalur pantura Semarang hingga Kudus ini sudah dimulai pada tahun 2010. Tetapi pada kenyataannya, komunikasi ini digunakan hanya bersifat sesekali. Arso Budiyo selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Komunikasi hanya dilakukan jika ada momen-momen tertentu yang memang harus ditangani seperti penyulaman dan penebangan mereka datang kesini. Tetapi kalau komunikasi secara intens memang tidak dilakukan (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Momen-momen tertentu yang dimaksud dalam percakapan diatas adalah ketika ada masalah yang terjadi terhadap pohon trembesi yang ditanam maka secara otomatis akan langsung diproses oleh PT Djarum Foundation sebagai aktor pelaksana program. Sementara dari pihak PT Djarum Foundation sendiri mengakui bahwa pihaknya selalu bertindak cepat apabila terjadi kendala karena tidak ingin programnya tersebut berdampak negatif

terhadap masyarakat yang melintas maupun masyarakat sekitar. Menurut Pak FX. Supanji selaku *Vice President* dari PT Djarum Foundation, penanganan atas kendala penanaman trembesi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

“Untuk proses perawatan selama 3 tahun di daerah Kudus sampai Semarang memang sulit dilakukakan karena sampai sekarangpun masih dilakukan penangangan tersebut mengingat lokasi penanaman trembesi yang dekat dari Djarum. Karena penanganan dilakukan oleh Djarum sendiri, masukan atau laporan dari masyarakat maupun pemerintah yang masuk banyak sekali. Sehingga hal itu yang membuat perawatan tersebut menjadi lama (Hasil tanggal 5 Maret 2018 pukul 12.30 di Ruang Meeting Cora PT Djarum Foundation Kudus.)”



Gambar 10. Penyiraman dalam Rangka Perawatan Pohon Trembesi

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan



Gambar 11. Pemangkasan dalam Rangka Perawatan Pohon Trembesi

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Gambar diatas menjelaskan tentang penanganan pohon trembesi yang dilakukan dalam rangka inspeksi perawatan maupun hasil dari laporan dari masyarakat terkait kondisi pohon yang kurang baik. Penjelasan diatas juga membuktikan bahwa komunikasi berjalan penting bagi kelangsungan program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut. Komunikasi tersebut seakan membuat stimulus dari suatu proses dimana dapat dijadikan sebagai alat penghubung antar ketiga *stakeholders*. Keuntungan didapatkan oleh pihak swasta karena pekerjaannya terbantu oleh pihak lain sehingga *feedack* tersebut langsung diproses. Masyarakat juga terbantu karena potensi gagal dan potensi pohon tersbut membahayakan diri mereka menjadi berkurang.

Komunikasi dari pihak masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Jogoloyo Kabupaten Demak relatif sedikit dilakukan mengingat tidak adanya tempat mengadu yang diketahui sehingga membuat masukan tersebut tak tersampaikan. Jika ditarik dalam teori *Governance* dan dikomparasikan dengan program penanaman trembesi tersebut, maka seharusnya masyarakat sekitar menjadi titik utama dimana *feedback* dari mereka yang akan membantu pihak swasta maupun pemerintah. Tetapi pada prakteknya justru hanya masyarakat yang ada di sekitar atau di dalam pihak pemerintah atau swasta saja yang menjadi bahan laporan terkait terkendala pohon trembesi tersebut. Sementara komunikasi dari masyarakat yang melalui jalan tersebut dilakukan terbatas lewat media cetak. M (Laki-Laki) menjelaskan bahwa :

“Kalau mau ngomong terkait pohon trembesi ya saya bingung mau bilang kemana, tapi paling kalau ada karyawan Djarum yang sedang merawat itu bisa bilang tapi selama ini saya belum lakukan. Tetapi bagi saya ya selama masih membuat suasana jalan baik ya kami tidak ada

keluhan ke Djarum apapun pemerintah (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh masyarakat Jogoloyo tersebut, pihak PT Djarum Foundation juga mengatakan kurang aktifnya peran dari masyarakat karena masyarakat dianggap belum memiliki keberanian untuk mengatakannya dan masih menganggap bahwa penanaman trembesi tersebut dibangun untuk kepentingan swasta demi menghidupkan di daerah mereka. Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan mengatakan bahwa :

“Peran masyarakat harus berperan lebih aktif dalam membantu program karena kan program ini diciptakan untuk kenyamanan mereka, tetapi bisa saya katakan bahwa peran masyarakat memang kurang maksimal karena meskipun mereka tidak merawat ya tidak papa tetapi mereka masih banyak kerusakan yang dilakukan oleh mereka (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Hubungan kedua pihak *stakeholders* tersebut secara nyata menunjukkan adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Kabupaten Demak memiliki kapasitas untuk menjembatani kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi untuk menyelaraskan keluhan dari masyarakat untuk ditangani oleh pihak pelaksana. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak telah melakukannya tetapi tidak dilaksanakan secara maksimal. Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa :

“Selain memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait program itu, kami menyampaikan apa keluhan yang dirasakan sama masyarakat kepada Djarum sebagai pihak yang mempunyai program tersebut.

Terutama program lanjutan dari program penanaman trembesi yaitu penanaman tanaman buah di sekitar daerah aliran sungai di Kabupaten Demak. Tetapi untuk penanaman trembesi ya hanya dilakukan dulu beberapa kali pelaporan (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Secara tidak langsung pernyataan dari ketiga pihak tersebut menyebutkan bahwa tidak adanya komunikasi yang berkelanjutan. Tidak dipungkiri banya faktor yang mempengaruhi dari kegiatan sinergitas yang dijalin, tetapi jika terdapat suatu wadah dimana ketiga *stakeholders* tersebut bertemu maka akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan tanpa adanya gangguan.

b. Koordinasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation

Koordinasi selalu diidentikkan dengan menyatupadankan kegiatan dari masing-masing bidang yang ada untuk menjamin suksesnya pencapaian suatu tujuan. Karena untuk mewujudkan suatu hubungan organisasi yang baik diharuskan adanya sumbangan ide dan melaporkan apa yang terjadi di lapangan oleh organisasi lain yang terlibat. Apabila koordinasi dapat dicapai dengan lancar maka bagian dari unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan tersebut secara otomatis akan menimbulkan suatu unit kerja yang solid. Namun sebaliknya, apabila terjadi kekacauan seperti diabaikannya tanggung jawab, pertentangan di dalam suatu unit kerja atau lemahnya pengawasan maka akan memperlemah pula pola hubungan yang telah diciptakan. Maka sesuai dengan syarat terciptanya koordinasi efektif, koordinasi yang efektif selalu menjalin keterkaitan dengan komunikasi. Hal tersebut terjadi karena komunikasi menjadi alat penghubung untuk membuat kelancaran dalam koordinasi yang akan memberikan efek sinergitas yang baik bagi semua pihak

yang terlibat. Diperlukan pula orang-orang yang fasih dalam bidangnya untuk menunjang informasi yang diibicarakan dan disampaikan dalam koordinasi dapat tersampaikan.

Jika dikaitkan dengan unsur Teori *Governance* pada program lingkungan yang berkaitan dengan ketiga pilar *stakeholders* yang sesuai dengan teori *Governance* tersebut yakni pihak swasta yang diwakili PT Djarum Foundation, pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan masyarakat sekitar. Berjalan atau tidaknya koordinasi ditentukan oleh beberapa hal seperti komunikasi intens yang dilakukan oleh ketiga *stakeholders*, keseriusan dari masing-masing pihak untuk menangani program tersebut dan kesadaran dari pihak-pihak terkait dengan manfaat dari program tersebut diimplementasikan. Komunikasi menjadi penting dalam koordinasi adalah untuk menghindarkan tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan sinergitas dari masing-masing *stakeholders* dan memberikan informasi tambahan dari pihak lain untuk memberikan bantuan dalam menghadapi masalah dalam program penanaman trembesi.

Menindaklanjuti pernyataan terkait dengan komunikasi yang diutarakan pada sub bab sebelumnya, koordinasi menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan. Proses komunikasi antar *stakeholders* akan berdampak langsung oleh koordinasi yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait. Seperti masalah perbedaan orientasi dari para pemimpin dari ketiga *stakeholders* terkait yang memiliki tujuan yang seirama tetapi ingin mewujudkan sasaran-sasaran tersebut dengan pemikiran mereka. Dalam program bakti lingkungan

penanaman trembesi ini, masyarakat hampir tidak memiliki peran yang signifikan dalam peranan sinergitas dalam perspektif teori *Governance* ini, menurut A (Laki-Laki) menuturkan tentang ajakan untuk koordinasi terkait penanganan program penanaman trembesi yakni :

“Koordinasi ya enggak ada mas, komunikasi saja jarang dilakukan apalagi ikut koordinasi untuk membicarakan soal penanaman pohon. Semua mungkin sudah diurus sama pemerintah sama Djarum jadi kita tidak memiliki peran lebih dalam penanaman pohon trembesi (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Pernyataan tentang peran masyarakat yang diutarakan oleh salah satu warga tersebut mencerminkan bahwa dalam konsep sinergitas memang masyarakat tidak memiliki peran lebih dalam mengetahui atau ikut di dalam program *Corporate Social Responsibility* dimana pada konteks ini adalah program penanaman trembesi. Masyarakat hanya mengetahui bahwa program tersebut dilaksanakan untuk kebutuhan masyarakat tetapi tidak mengetahui peran mereka dalam proses pelaksanaan. Hal senada juga coba dijelaskan oleh M (Laki-Laki) yang menceritakan bahwa:

“Kita merasa dibantu saja sudah merasa bersyukur mas, karena jika ditanya koordinasi mungkin dilakukan oleh petinggi dari tingkatan lebih tinggi jadi masyarakat tidak ikut dalam koordinasi tentang program yang mas maksud (Hasil tanggal 8 Maret 2015 pukul 12.37 di tempat kerja masyarakat yang bersangkutan di wilayah Jogoloyo)”

Peran masyarakat dapat dikatakan masih dangkal jika dihubungkan dengan fungsi yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat peran untuk mereka dalam proses program penanaman trembesi sudah mencapai apa yang diinginkan dari sudut pandang masyarakat. Karena sudut pandang keberhasilan dari program tersebut hanya dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada mereka dan masyarakat lainnya.

Tugas untuk ikut tetap menjaga seolah diambil oleh pihak PT Djarum Foundation seutuhnya dan upaya pemberian saran dari masyarakat untuk pemerintah maupun swasta juga terbentur mengenai kepada siapa mereka akan melaporkan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program bakti lingkungan penanaman trembesi tersebut.

PT Djarum Foundation sebagai pihak swasta juga ikut menyetujui yang dikatakan oleh masyarakat. Masyarakat hanya dilibatkan diawal saja tetapi tidak memiliki kewajiban untuk merawat secara rutin karena mereka merasa itu bukan menjadi kewajiban mereka. Menurut Pak Sugiyanto mengatakan tentang koordinasi dengan masyarakat bahwa :

“Koordinasi sama masyarakat hanya terbatas saja, untuk hubungan koordinasi pas seremonial saja. Tetapi untuk keberlanjutan koordinasi mengenai trembesi ini memang bisa dikatakan kurang. Mungkin koordinasi hanya sebatas seperti yang kamu lihat. Disaat kita melakukan perawatan dan penebangan, di waktu bersamaan kita juga meminta ijin kepada masyarakat sekitar yang bersinggungan langsung kepada penebangan tersebut (Hasil tanggal 6 Februari 2018 pukul 07.45 di daerah penanaman trembesi Kudus-Semarang di ruas Jalan Raya Demak).”

Ditambahkan oleh Pak Sugiyanto tentang situasi komunikasi yang dijalankan agar mendapat *feedback* dalam rangka mendapatkan tanggapan dari masyarakat adalah “Ya komunikasi yang dilakukan dalam rangka koordinasi tersebut bisa dikatakan hanya bersifat satu arah saja dan tidak ada balasan dari masyarakat itu (Hasil tanggal 6 Februari 2018 pukul 07.45 di daerah penanaman trembesi Kudus-Semarang di ruas Jalan Raya Demak).”

Koordinasi yang dilakukan oleh PT Djarum Foundation menjadi kurang efektif karena keacuhan dari masyarakat sekitar. Masyarakat sudah bersifat kooperatif dengan mengijinkan proses pelaksanaan program maupun

perawatan pohon trembesi tersebut dilaksanakan. Meskipun begitu di beberapa kasus masalah koordinasi disebabkan oleh perbedaan perspektif masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan program penanaman trembesi. Perbedaan cara menanggapi sudut pandang terkadang menimbulkan ketidakcocokan dalam sinergitas masing-masing *stakeholders*. Hal tersebut tercermin ketika program penanaman trembesi tersebut mengalami kendala di saat pelaksanaan penanaman bibit sedang dilaksanakan. Kendala tersebut antara lain tiang penyangga yang diambil, bibit tanaman trembesi yang dimakan oleh hewan ternak, dan banyaknya volume sampah di titik tertentu yang membuat tanaman terkontaminasi.



Gambar 12. Tiang Penyangga yang diambil oleh Masyarakat

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan



Gambar 13. Bibit Trembesi yang Dimakan oleh Hewan Ternak

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Beberapa gambar diatas menunjukkan efek dari tidak berfungsinya koordinasi dengan baik antara ketiga pilar *stakeholders*. Pasalnya ketiga *stakeholders* tersebut saling memiliki fungsi untuk saling memberikan peringatan maupun menjaga agar pohon trembesi dapat terus tumbuh. Namun pada prakteknya kelalaian maupun ketidak waspadaan dari masyarakat membuat beberapa pohon trembesi mendapatkan kendala bahkan dapat dikatakan mati. Tabel di bawah akan menampilkan tentang kendala utama dari pelaksanaan program penanaman trembesi tersebut :

Tabel 9. Kendala Pelaksanaan Progam Penanaman Trembesi

Penanaman Trembesi di Pantura Jawa				
Wilayah	Tahun	Jumlah Pohon Tertanam	Penyebab Kematian/ Kerusakan	Ket.
Kudus-Demak	2010	3.403	- Angin kencang/hujan lebat - Pemangkasan oleh PLN - Kecelakaan lalu lintas	
Demak-Semarang	2010	711	- Parkir liar truk - Angin kencang	
Semarang-Pekalongan	2011	2.309	- Pencabutan/pematahan orang gila	
Pekalongan-Losari	2012	4.621	- Parkir liar truk - pencabutan/pematahan	

			orang gila - Penggalian kabel - Pelebaran jalan	
Losari-Jakarta	2013	6.922	- Pencabutan/pematahan orang gila - Terserempet kendaraan yang menerobos bahu jalan - Parkir liar truk	
Jakarta-Tangerang	2013	280	- Lahan tanam sempit - Terserempet kendaraan yang menerobos bahu jalan	
Tangerang-Merak	2013	1.485	- Penggalian kabel dan jaringan pipa gas - Pencabutan/pematahan orang gila	
Sub Total		19.731		

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation

Pemerintah juga memiliki masalah yang sama dengan pihak swasta dimana terjadinya koordinasi yang kurang terlaksana dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup merasa upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah terasa tidak memiliki dampak apapun. Pak Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya maksimal dalam koordinasi dengan masyarakat terlepas dari koordinasi yang dilakukan pada saat seremonial, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sudah koordinasi dengan *stakeholder* terkait agar tetap menjaga lingkungan yang telah diberikan, termasuk pohon trembesi. Namun memang pembinaan yang dilakukan kurang berdampak karena pasifnya kepedulian masyarakat sekitar dalam menyikapi hal tersebut. (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Pernyataan tersebut seolah memang mengatakan bahwa pihak PT Djarum Foundation maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya untuk terus mengambil peran dari masyarakat tetapi upaya mereka dirasa tak cukup untuk mengubah persepsi mereka tentang tujuan program penanaman trembesi tersebut. Upaya yang dilakukan hanya dianggap sebagai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah untuk menjalankan program penanaman trembesi. Lewat koordinasi ini pula terlihat bahwa peran mendominasi tetap di pegang oleh kedua *stakeholders* lain dimana mereka yang akan berkoordinasi secara intens dan masyarakat hanya sebagai objek keberhasilan dari program yang berjalan.

Berbicara tentang koordinasi yang dilakukan oleh pihak PT Djarum Foundation maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup, komunikasi yang terjalin diantara keduanya sudah dianggap baik meskipun intensitas komunikasi yang dijalin hanya disaat moment-moment tertentu. Komunikasi yang baik akan berdampak positif terhadap koordinasi yang dijalin diantara kedua *stakeholders*. Keharmonisan hubungan antara kedua *stakeholder* dapat tergambarkan dalam komunikasi yang dilakukan. Pak Abdurrachman Aldila selaku *Field Staff* Bakti Lingkungan menjelaskan bahwa hubungan koordinasi yang terjadi pada awal program berjalan dengan lancar sehingga pada tahap selanjutnya dianggap sudah berjalan dengan seharusnya, beliau mengatakan :

“Lewat seremonial tersebut kami dari pihak Djarum Foundation meminta seluruh pihak untuk berkoordinasi termasuk antara kita dan pemerintah. Koordinasi dilakukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Bagi kami tentunya mengharapkan koordinasi yang berkelanjutan agar program dapat berlanjut hingga tuntas (Hasil tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.34 di Ruang Staff Bakti Lingkungan PT Djarum Foundation Oasis Kudus).”

Koordinasi diantara kedua pilar *stakeholders* pelaksana program *Corporate Social Responsibility* tersebut dapat dikatakan sudah sesuai apa yang dikatakan. Namun seperti hal nya dengan masyarakat, ada beberapa masalah yang berkenaan dengan masalah koordinasi. Masalah koordinasi yang dimaksud adalah masalah-masalah yang bersingungan dengan *stakeholders* pemerintah maupun perusahaan negara. Koordinator dari pihak pemerintah Kabupaten Demak yang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup kurang dapat mengatur koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah maupun perusahaan negara yang ikut atau bersingungan dengan pohon trembesi yang sedang dalam program. Dari pihak swasta, Pak Eri Wahyudi selaku admin dalam Bakti Lingkungan menjelaskan bahwa kendala dari pihak PT Djarum Foundation di lapangan ialah banyaknya pihak diluar dari program bakti lingkungan penanaman trembesi yang mengganggu dan bahkan merusak tanaman trembesi yang sudah ditanam. Beliau mengatakan bahwa :

“Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kami dan pihak pemerintah pada awalnya berjalan dengan baik. Pohon trembesi dapat ditanam sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ijin penggunaan lahan pun sudah didapat. Tetapi lama kelamaan proyek-proyek atau program dari pihak pemerintah justru mengganggu ekosistem dari pohon trembesi yang pada saat itu belum tumbuh secara sempurna. Tentu saja kejadian tersebut membuat kita bekerja dua kali dengan memulai penanaman dari awal (Hasil tanggal 3 Februari 2018 pukul 10.34 di Tempat Pembibitan Tanaman Oasis PT Djarum Foundation Kudus).”

Lebih lanjut, Pak Eri juga menjelaskan lebih detail terkait permasalahan dari koordinasi yang terjalin antara PT Djarum Foundation dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagai pihak pemerintah. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah membuat dampak yang

signifikan bagi pohon trembesi yang ditanam. Pak Eri Wahyudi selaku admin dalam Bakti Lingkungan menyebutkan bahwa :

“Seperti yang bisa lihat, banyak proyek yang bersingungan langsung kepada pohon trembesi sehingga dampaknya akan jelek ke kita. Kaya yang di lingkaran Demak misalnya, dahulu waktu pertama pembangunan tidak ada tiang penyangga listrik yang berdiri tetapi sekarang tiang tersebut menghalangi pertumbuhan dari pohon. Terus juga mengenai penggalian kabel PLN maupun adanya normalisasi sungai yang membuat alat berat harus masuk ke sungai. Pasti kejadian itu membuat akar dari pohon trembesi itu menjadi patah dan lama kelamaan akan mati (Hasil tanggal 3 Februari 2018 pukul 10.34 di Tempat Pembibitan Tanaman Oasis PT Djarum Foundation Kudus).”



Gambar 14. Normalisasi Sungai dengan Alat Berat

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan



Gambar 15. Galian yang Mengganggu Akar Trembesi

Sumber : Arsip PT Djarum Foundation Bakti Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator dianggap lemah dalam memberikan ijin kepada setiap urusan atau program yang dilaksanakan dan bahkan pemberian ijin tersebut tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, tetapi pihak dari pemohon program mengabaikan lingkungan yang ada di sekitar. Sehingga program lain seperti pohon trembesi tersebut menjadi salah satu korban. Pak Arso Budiyatno selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa :

“Kalau PLN itu, seperti dibilang *independent* karena dianggap ketersediaan listrik dianggap penting, jadi hal itu yang membuat mereka koordinasi nya juga kurang kepada kami. Jadi kurang memperhatikan program yang sudah berjalan. Kami akui bahwa untuk koordinasi dengan mereka kami lemah. Memang untuk berkoordinasi dengan pihak vertikal BUMN seperti Telkom dan PLN memang sulit untuk diajak komunikasi dan koordinasi (Hasil tanggal 7 Maret 2015 pukul 08.12 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak)”

Pernyataan diatas seakan menjadi jawaban dari mengapa koordinasi yang berjalan untuk menjalin sinergitas antara pemerintah dan swasta disaat peogram penanaman trembesi tersebut dalam masa perawatan, kurang berjalan dengan baik. PT Djarum Foundation menginginkan koordinasi dengan berbagai pemerintah dalam usaha perbaikan lingkungan berjalan dengan lancar. Tetapi memang dari segi Dinas Lingkungan Hidup menyebut sulitnya berkoordinasi dengan pihak pemerintah yang vertikal sehingga program yang dijalankan oleh kedua belah pilar tersebut terjadi ketidaksesuaian.

C. Analisis Data

1. Wujud peran setiap *Stakeholders* dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Lingkungan

Peran dari masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi merupakan bagian terpenting. Keikutsertaan dari setiap *stakeholders* dalam mewujudkan lingkungan yang asri ikut mengurangi permasalahan yang terjadi di hampir setiap daerah terutama di daerah Kabupaten Demak. Ketiga pilar yang terlibat dituntut untuk lebih untuk lebih peka dan memperhitungkan tentang segala hal yang menyangkut tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Upaya yang sudah direncanakan secara sistematis dan teratur dapat berdampak banyak terhadap lingkungan hidup yang ada. Maka upaya yang dicanangkan haruslah menjadi pilot project dimana rencana tersebut diwujudkan dalam waktu jangka panjang agar tidak terjadi kesenjangan ditengah-tengah rencana tersebut dilaksanakan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan menjadi konsen dari penelitian ini adalah di jalur pantai utara bagian Kudus hingga Semarang, dengan spesifikasi mengambil

pada Kabupaten Demak. Kabupaten Demak menjadi sasaran dari penelitian karena belum stabilnya tingkat penghijauan dari apa yang di wacanakan dengan realita di lapangan.

Permasalahan lingkungan tidaklah pernah habis jika dijabarkan. Salah satu permasalahan lingkungan yang ada adalah peningkatan yang sangat ekstrem dari proses laju pembangunan. Pembangunan yang berkembang pesat dan lebih berorientasi ekonomi tidak diimbangi dengan penjagaan kelestarian lingkungan. Sehingga terlalu banyak lingkungan biotik maupun abiotik di sekitar yang lama kelamaan akan menghilang akibat keserakahan dari pihak tertentu. Jalan pantai utara menjadi jalur yang sangat sibuk dan dapat menyumbang polusi yang dapat merusak lingkungan hidup sekitar. Dengan polusi yang di dominasi oleh karbondioksida yang tidak baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka hal tersebut menjadi permasalahan lingkungan yang harus diselesaikan dengan segera.

Kabupaten Demak adalah kabupaten yang memiliki hamparan lahan hijau di daerahnya. Disaat bersamaan, Kabupaten Demak juga memiliki permasalahan lingkungan yang beragam seperti dampak lingkungan dan penghijauan dan kepedulian *stakeholders*. Penghijauan menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian untuk diselesaikan. Usaha yang dilakukan untuk melakukan penghijauan tersandung dengan berbagai masalah yang menghinggapinya. Penutupan lahan vegetasi yang diatur dalam Undang-Undang tahun nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 huruf ayat 2 menjelaskan bahwa bagian untuk ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Jumlah tersebut terbagi

menjadi dua bagian dimana 20% ruang terbuka hijau publik yang didelegasikan pertanggung jawabkannya menjadi milik pemerintah dan sisanya yakni 10% adalah ruang terbuka hijau bersifat privat dimana pertanggung jawabkannya diambil oleh swasta yang termasuk dalam unsur masyarakat. Penjabaran pada undang-undang diatas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup bukan menjadi tugas utama dari pemerintah, melainkan ada peran lain yang berasal dari masyarakat dimana di dalamnya terdapat unsur swasta. Artinya seluruh lapisan *stakeholder* mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu lingkungan hidup yang ramah dan sejuk bagi penghuninya.

Permasalahan kepedulian dari masing-masing *stakeholder* yakni pihak pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum dapat menempatkan lingkungan hidup sebagai suatu makhluk hidup yang hidup bersama mereka. Sehingga jika mempunyai pikiran seperti itu, masing-masing *stakeholder* dapat mengetahui seberapa besar peran dari diri mereka dalam andil menjaga lingkungan hidup menjadi lebih asri. Pola pikir bahwa kewajiban untuk pelaksanaan pertanggung jawaban akan ditanggung oleh satu pihak, dapat memunculkan sebuah stigma negatif bahwa peran *stakeholder* lain hanya menjadi pelengkap atau menjadi objek dari program pertanggung jawaban tersebut.

Munculnya program *Corporate Social Responsibility* yang diatur pada Undang-Undang nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab akan memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan bukan menjadi tugas yang mutlak milik pemerintah. Swasta dituntut untuk dapat mensiasati peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari dampak negatif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat maupun sebagai wujud kepedulian yang muncul dari diri perusahaan. PT Djarum Foundation sebagai salah satu perusahaan penghasil rokok terbesar di Indonesia mewujudkannya dengan menerapkan program Bakti Lingkungan, yang lebih spesifiknya mengarah kepada penanaman pohon trembesi. Program penanaman trembesi tersebut sebelum di aplikasikan terlebih dahulu disampaikan tentang konsep dan gambaran dari program tersebut kepada pemerintah terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Setelah kedua belah pihak memiliki keselarasan dalam program dan keinginan untuk mewujudkan tujuan dari program tersebut, maka mulai tahun 2010 Bakti Lingkungan penanaman pohon trembesi dari Kudus hingga Semarang.

Pelaksanaan dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut, menempatkan tiga pilar *stakeholders* sebagai pemeraksa pelaksanaan program tersebut dengan harapan dapat menjalin sinergitas yang baik karena ketiganya memiliki keterkaitan. Ketiga pilar tersebut akan disajikan dalam analisis domain sebagai berikut :

Tabel 10. Kerangka Konseptual *Corporate Social Responsibility* melalui Analisis Domain

<i>Included Term</i>	Hubungan Semantik	<i>Cover Term</i>
Pemerintah	Adalah Peran Dari	Sinergitas <i>Stakeholder</i> Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Berbasis Lingkungan
Swasta		
Masyarakat Madani		

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Melalui kerangka konseptual di atas melalui analisis domain, maka dapat menjelaskan tentang langkah awal yang dipakai oleh peneliti dalam menentukan (*place, actor, activity*). Ketiga pilar diatas dapat diklasifikasikan menjadi PT Djarum Foundation menjadi pihak swasta, Dinas Lingkungan Hidup menjadi pihak pemerintah dan masyarakat Jogoloyo sebagai perwakilan masyarakat madani. Pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi suatu komitmen dari perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya secara moral untuk ikut melaksanakan upaya pembangunan berkelanjutan sebagai kepedulian terhadap dampak yang sudah diberikan terhadap masyarakat. PT Djarum Foundation tidak dapat berdiri sendiri karena dalam pelaksanaan program ini tentu memerlukan berbagai macam urusan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri, maka dari itu dibutuhkannya sinergitas dari masing-masing *stakeholder* guna membuat program ini bukan hanya menghasilkan *output* saja melainkan juga dapat menghasilkan *outcome* yang berkelanjutan. Karena sangat pentingnya konsep sinergitas yang dipakai dalam penelitian terkait. Menurut Podungge (2009) sinergi diartikan kegiatan secara bersama-sama yang memerlukan koordinasi yang baik, perasaan saling memberi, saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang telah disepakati bersama. Maka penelitian memutuskan

untuk memakai Model Teori *Governance* untuk memudahkan dalam menentukan batas-batas dari tugas maupun wewenang dari masing-masing *stakeholders*.

Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi selain menjadi inisiatif dari pihak PT Djarum Foundation, juga menjadi bentuk dari pertanggung jawaban sosial yang diwajibkan bagi pelaku perusahaan perseroan terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menjalin hubungan yang bermanfaat dan sesuai dengan lingkungan, norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Di dalam undang-undang juga mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pernyataan tersebut juga teraplikasikan terhadap program penanaman tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyatakan bahwa komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dalam undang-undang maupun peraturan daerah yang disebutkan menyatakan bahwa dalam konsen dari perusahaan

melakukan pertanggung jawaban sosial ialah ingin menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat maupun komunitas sekitar untuk dapat meningkatkan kualitas dan taraf dari diri mereka maupun untuk meningkatkan kualitas dari lingkungan sekitar. Lingkungan hidup menjadi fokus dari tanggung jawab sosial karena lingkungan menjadi penerima dampak yang paling signifikan sehingga membutuhkan pembaharuan dari sisi pembangunan agar lingkungan hidup terus dapat menjadi bekal bagi generasi penerus.

Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi akan dijadikan sebagai landasan kerjasama oleh pemerintah dan swasta dengan melibatkan masyarakat. Program tersebut dijadikan awal dari kerjasama antara ketiga *stakeholders* tersebut dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik di sekitar Kabupaten Demak. Penanaman trembesi ini sebenarnya bukanlah menjadi program khusus untuk jalan pantura dari Kudus hingga Semarang melainkan bagian dari program penanaman trembesi dari Merak hingga Banyuwangi. Peran *stakeholders* tentunya menjadi peran penting dan memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi dalam kelangsungan lingkungan hidup selanjutnya. Peran dari ketiga *stakeholders* dapat dipetakan sesuai dengan USAHID, dimana ketiga pilar dikelompokkan sesuai dengan kepentingan, keahlian dan kekuatan dalam menanggapi program Bakti Lingkungan penanaman trembesi tersebut. Peran tersebut dibagi sebagai berikut :

- a. *Stakeholder* kunci dilaksanakan oleh PT Djarum Foundation. PT Djarum Foundation adalah pengagas dan memiliki kepentingan secara

langsung terkait program Bakti Lingkungan dalam fokus penanaman trembesi. Selain sebagai pemimpin, berperan juga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.

- b. *Stakeholder* pendukung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut adalah sebagai jembatan dari masyarakat dan swasta serta menjadi koordinator bagi dinas terkait yang berkenaan dengan program tersebut.
- c. *Stakeholder* utama dilaksanakan oleh masyarakat Jogoloyo Kabupaten Demak. Peran masyarakat lebih terhadap mendukung program yang sudah dirumuskan dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan, menjaga keutuhan dari pohon dan pemberi umpan balik.

Peran yang sudah dibagi menjadi tiga bagian tersebut akan menjelaskan terhadap kinerja maupun tugas yang ditujukan oleh setiap *stakeholder* sehingga lebih jelas dan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Diharapkan dengan spesifikasi tugas ini maka dapat berdampak positif terhadap kebaikan lingkungan hidup di kawasan jalur pantai utara terutama jalur Kudus hingga Semarang agar lebih terbebas dari karbon dioksida. Dalam mewujudkan upaya tersebut maka dibutuhkan suatu kesinergitasan yang efektif dan efisien dari ketiga *stakeholders* terkait. Persamaan persepsi dari masing-masing *stakeholders* menjadi suatu langkah penting dalam pembuatan program. Dalam tahap perencanaan menjadi momen dimana konsep dan keinginan dari masing-masing *stakeholders* dibicarakan agar nantinya tidak menjadi penghambat ketika sudah memasuki tahap selanjutnya.

Jika dilihat dari proposisi *governance*, perbedaan persepsi antara masing-masing *stakeholders* memaksa mereka untuk dapat menyadari bahwa aktor yang terlibat tidak hanya dari satu pihak saja seperti pemerintah, melainkan memiliki masing-masing tugas. Disepakatinya peran dan tujuan yang diinginkan oleh ketiga pilar juga dapat mengidentifikasi kaburnya batas-batas yang tidak jelas sehingga dapat diselesaikan serta dapat memperjelas tanggung jawab atau tugas dalam mengatasi isu yang berkembang tentang penanaman pohon trembesi.

Sinergi dalam konsep *Governance* juga dapat mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara *stakeholders* yang terlibat dalam program yang dijalankan. Hal tersebut dibuktikan dengan membagi setiap *stakeholders* dengan bagian mereka sesuai dengan spesialisasi yang dikuasai oleh masing-masing pilar. Jika tugas tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang digunakan atau tugas yang diberikan justru dilaksanakan oleh *stakeholders* lain maka ada terjadi ketergantungan dari satu pihak. Dalam konteks ini yang menjadi tujuan dari program bakti lingkungan penanaman trembesi ialah masyarakat yang sekitar maupun masyarakat yang melintasi jalur yang ditanami pohon trembesi tersebut. Harapannya adalah ketiga aktor tersebut mendapatkan apa yang diinginkan.

Konsep sinergitas membutuhkan komitmen dari ketiga *stakeholders* baik pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat. Komitmen tersebut diaplikasikan terhadap peran dari masing-masing *stakeholders*. Peran yang dilakukan oleh PT Djarum Foundation, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Demak dan masyarakat diharapkan dapat memenuhi ekspektasi dari mereka pribadi dalam menciptakan Kabupaten Demak yang sejuk dan asri.

a. Peran dari Pemerintah

Program Bakti Lingkungan dengan penanaman trembesinya membutuhkan komitmen dengan peran yang diambil dari masing-masing *stakeholders* untuk dapat digabungkan agar dapat menjadi apa yang diinginkan dalam ide dari program ini. Program Bakti Lingkungan juga menjadi parameter perwujudan dari keinginan dari Bupati Demak dalam misinya tentang lingkungan yakni mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan segala yang ada di Kabupaten Demak maupun sekitarnya untuk dapat digunakan untuk melestarikan daerah mereka. Pemerintah memiliki peran diantara tiga *stakeholders* yang terlibat aktif dalam membangun program penanaman trembesi tersebut. Pemerintah menjadi aktor penting karena perannya dalam mengatur laju program dalam perijinan, koordinasi maupun komunikasi. Peran pemerintah pada penelitian ini, lebih dicondongkan untuk diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup karena mereka yang mengatur jalannya kepentingan tentang pelestarian lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi koordinator bagi *stakeholders* pemerintah terkait untuk berkomunikasi dengan swasta maupun masyarakat. Banyaknya *stakeholders* dari pihak pemerintah yang terlibat dengan program bakti lingkungan penanaman trembesi membuat harus adanya satu pihak yang menjadi koordinator sekaligus membawa hasil dari koordinasi tersebut

kepada pihak swasta untuk dirundingkan menemukan jalan keluarnya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi perantara dari pemikiran dan argumen yang diberikan kepada masyarakat dan swasta sebagai dua pilar lain dalam program ini. Pasifnya dari masyarakat sekitar membuat fungsi dari dinas menjadi tidak terlalu terlihat. Dibutuhkan keseimbangan dalam peran masing-masing agar program penanaman trembesi ini tidak terlihat timpang.

Ketimpangan dari teori dan kenyataan di lapangan ialah adanya perbedaan peran jika berkaca kepada teori yang digunakan. Masalah *missing link* yang terjadi ketika pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memaksimalkan tugasnya sebagai penengah antara masyarakat dan swasta. Tugas tersebut dapat dikatakan tugas yang vital bagi pemerintah tetapi pemerintah justru berpangku tangan dan melaksanakan tugasnya tersebut jika ada instruksi yang jelas dan apabila terjadi hal-hal yang mendesak.

Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugasnya dalam pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan keadaan pohon trembesi yang ada di sepanjang jalan pantai utara di daerahnya dan sekaligus memeriksa ketahanan pohon serta mendokumentasikan yang terjadi lapangan agar dapat ditunjukkan kepada pihak swasta jika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai. Pembinaan lebih dilakukan kepada sisi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan fungsinya ini dengan melakukan sosialisasi tentang perawatan pohon dan menjelaskan betapa pentingnya fungsi trembesi untuk masyarakat di lingkungan tersebut. Pengawasan dan pembinaan berjalan sesuai dengan tugas yang mereka jalankan.

Salah satu dari lima proposisi mengenai *governance* mengatakan bahwa pemerintah mengantisipasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab atas tugas dalam mengatasi isu yang timbul. Dalam mengantisipasi kaburnya tugas yang diberikan dengan fokus terhadap tugas yang terbagi kepada swasta maupun masyarakat. Pemerintah mencoba melaksanakan fungsinya secara tuntas terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup juga membahas tentang *self-governing* yang otonom dari masing-masing aktor. Pembahasan ini bukan menjadi ajang sebagai ikut campur urusan dari *stakeholders* lain, melainkan hanya untuk pemberian saran atas kerangka dari kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing *stakeholders*.

Dinas Lingkungan Hidup perlu mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi. Ketergantungan terjadi apabila suatu pihak merasa nyaman ketika *stakeholders* lain telah mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi milik mereka. Perlu adanya komitmen dalam diri masing-masing *stakeholders* demi menjaga stabilitas tugas yang sudah ada. Dalam program penanaman trembesi ini terlihat adanya ketergantungan yang dialami dimana PT Djarum Foundation lebih sering melakukan pengawasan dalam program tersebut. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan, tetapi intensitasnya tidak sebanyak yang dilakukan oleh PT Djarum Foundation.

b. Peran dari Swasta

Pilar selanjutnya yang ikut berperan dalam pengaplikasian program Bakti Lingkungan penanaman trembesi adalah pihak swasta. Dalam hal ini, pihak

swasta yang berpartisipasi adalah PT Djarum Foundation. PT Djarum Foundation merupakan anak perusahaan dari PT. Djarum yang dibuat untuk pelaksanaan prinsip yang sudah dibuat oleh pendiri dan sekaligus sebagai pelaksana pertanggung jawaban sosial. PT Djarum menjadi perusahaan tunggal yang menjadi wakil dari sektor swasta. Dimana mereka juga menjadi pengagas ide dari Bakti Lingkungan dengan konsen penanaman trembesi.

Stakeholders yang terlibat dalam program penanaman trembesi ini saling bersinergi untuk dapat membuat program yang menjadi proyek awal penanaman trembesi Merak hingga Banyuwangi. Program ini juga memiliki kepentingan sendiri bagi setiap *stakeholders* yang terlibat. Bagi PT Djarum Foundation sendiri, program ini merupakan rangkaian dari program bakti lingkungan yang menjadi program PT Djarum Foundation. Selain itu PT Djarum sebagai pimpinan dari program ini menjadi kepedulian atas lingkungan yang ada di sekitar mereka sehingga mewujudkan program tersebut sekaligus menggunakan *Corporate Social Responsibility* sebagai pertanggung jawaban mereka sebagai suatu perusahaan profit.

Pada awalnya, PT Djarum Foundation memulai rangkaian penanaman trembesi dari Merak hingga Banyuwangi dengan mengambil dari jalur penanaman pertama yakni jalur Kudus hingga Banyuwangi. Maka dari itu, PT Djarum Foundation langsung berkoordinasi dan meminta izin kepada *stakeholders* sekitar terkait program yang akan dilaksanakan. Awal dari perencanaan dari program, dibahas tentang apa yang akan menjadi tujuan pokok dan tugas dari masing-masing *stakeholders*. Hal tersebut yang

membuat PT Djarum Foundation merealisasikan program tersebut dengan memulainya pada tahun 2010

PT Djarum Foundation sendiri mendapatkan tugas sebagai pelaksana lapangan dari program bakti lingkungan penanaman trembesi tersebut. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh PT Djarum Foundation karena mereka yang mempunyai ide dan sudah mempunyai gambaran maupun langkah jangka menengah maupun jangka panjang mengenai program tersebut. Pelaksanaan tersebut juga dapat meliputi pembibitan, penanaman dan perawatan. Sehingga memang butuh waktu bagi mereka untuk dapat mewujudkan pohon trembesi tersebut sesuai dengan ekspektasi mereka. Program tersebut juga wajib untuk dilakukan pelaporan kepada pihak pemerintah maupun atasan dari pihak swasta sendiri. Pelaporan sendiri dilakukan oleh pihak PT Djarum Foundation sebagai langkah pertanggung jawaban atas dana yang digunakan maupun untuk mengetahui sejauh mana *progress* dari program tersebut berjalan.

c. Peran dari Masyarakat Madani

Tujuan diluncurkannya program Bakti Lingkungan dengan konsen penanaman trembesi ialah merawat lingkungan untuk tetap terjaga menjadi bekal untuk mewujudkan negeri yang nyaman dan tentram. Kiat itu muncul ketika melihat masalah lingkungan yang muncul karena adanya faktor-faktor yang merusaknya dan salah satu unsur yang merusaknya adalah perilaku yang kurang bersahabat dari masyarakat. Oleh karena itu, PT Djarum Foundation sebagai inisiator dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi, melibatkan masyarakat dalam membangun dan merawat lingkungan hidup

yang ada di sekitar mereka agar menciptakan suatu keadaan lingkungan yang nyaman dan asri.

Peran dari masyarakat dalam program penanaman trembesi dituntut untuk terlibat langsung dalam membantu kegiatan pelaksanaan lapangan dalam menjaga pohon trembesi tersebut tetap tumbuh sesuai *standart* yang sudah ada. Untuk membekali masyarakat agar mendapatkan ilmu bagaimana merawat dan membuat pohon trembesi tersebut tumbuh dengan maksimal, maka pada momen seremonial diajarkan beberapa tahapan merawat bibit yang sedang tumbuh hingga pohon trembesi yang sudah dianggap baik. Lebih dari itu, masyarakat juga dilakukan edukasi agar masyarakat sadar bahwa fungsi dari pohon trembesi ini mempunyai kandungan yang dapat menyerap karbondioksida dengan skala yang besar. Harapannya ialah dapat mengurangi dampak polusi yang ada di jalur pantura. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga mengajarkan bahwa masyarakat sekitar juga harus berperan aktif dalam kampanye bahwa menjaga lingkungan hidup di sekitar kita bersifat penting.

Peran lain masyarakat adalah memberikan tanggapan atau umpan balik dari kejadian yang terjadi pada pohon trembesi untuk menjadi bahan evaluasi bagi pihak swasta maupun pemerintah. Peran tersebut dirasa menjadi peran penting bagi masyarakat mengingat masyarakat sekitar yang selalu memantau dan bersentuhan langsung setiap hari terhadap pohon trembesi tersebut. Peran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan swasta karena mereka tidaklah terfokus kepada program tersebut. Namun, upaya tersebut dirasa kurang efektif karena masyarakat terlihat pasif dan bahkan merasa bahwa mereka hanya dilibatkan sebagai objek berhasil atau tidaknya program

penanaman trembesi berjalan. Upaya komunikasi *stakeholders* lain untuk melakukan komunikasi juga dirasa tidak mendapat tanggapan yang sesuai dengan ekspektasi.

Jika melihat proposisi mengenai *governance*, masyarakat dikatakan memiliki ketergantungan dalam hubungan antara *stakeholders* yang terlibat dalam program penanaman trembesi. Ketergantungan tersebut tercermin dari peran yang kurang efektif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap program tersebut seperti kurangnya bantuan dalam pengawasan dan perawatan yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Pasifnya masyarakat membuat peran dari masyarakat terlihat hilang, padahal peran masyarakat yang membuat kestabilan pohon trembesi untuk tumbuh.

Kelurahan Jogoloyo Wonosalam Kabupaten Demak, menjadi salah satu kelurahan yang ditanami pohon. Kelurahan tersebut menjadi salah satu kelurahan yang menyumbangkan lahan untuk ditanami pohon trembesi terbanyak. Lingkungan yang kurang dalam penghijauan menjadi rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menjadi tempat dalam penanaman trembesi tersebut. Masyarakat menyambut baik niat dari pembuatan program bakti lingkungan penanaman trembesi tersebut. Dalam menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman tidak akan tercapai apabila tidak adanya sinergitas yang terbangun antara ketiga pilar *stakeholders* yang ada. Pihak swasta yang mengadakan kegiatan seremonial bahwa telah ditanamnya pohon trembesi di daerah Jogoloyo ditambah dengan pemberian edukasi tentang pohon trembesi menjadi langkah sinergitas yang dilakukan oleh swasta. Pihak pemerintah juga melakukan sinergitasnya dengan memberikan pembinaan

secara berkala kepada masyarakat dan menyampaikan masukan kepada swasta terkait program penanaman trembesi.

Pada penjabaran diatas, disebutkan bahwa masing-masing memiliki peran dan kepetingan yang menyangkut dengan sinergitas program Bakti Lingkungan penanaman trembesi. Pada tabel dibawah ini dijelaskan diagram kotak analisis taksonomi tentang peran dari masing-masing *stakeholders* dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi yaitu :

Tabel 11. Analisis Taksonomi Peran *Stakeholders* dalam Sinergitas Program

Penanaman Trembesi

<i>Stakeholders</i>	Peran
Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup)	a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait program penanaman trembesi b. Pengawasan secara langsung dalam program penanaman trembesi c. Menjadi koordinator <i>stakeholders</i> di tingkat pemerintah d. Menjadi perantara dari swasta dan masyarakat dalam komunikasi dan koordinasi
Swasta (PT Djarum Foundation)	a. Pemerkasa ide dan pimpinan program b. Pelaksana lapangan dalam program penanaman trembesi c. Sumber dana melalui dana CSR untuk program penanaman trembesi d. Laporan secara berjangka kepada pemerintah
Masyarakat Madani	a. Sebagai pembantu pelaksana lapangan dalam menjaga kestabilan program di lapangan b. Pemberi <i>feedback</i> kejadian yang terjadi pada pohon trembesi di lapangan

Sumber: Data Hasil Penelitian

Pada tabel diatas terlihat bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut yang menunjukkan fungsi dari sinergitas yang dijalin. Sinergitas dapat memberikan

peran kepada *stakeholder* yang mempunyai spesialisasi kepada peran yang diambil. Dalam pola *governance*, ketiga *stakeholders* tersebut saling berpengaruh agar dapat memunculkan keselarasan dalam menjalankan program. Untuk menyesuaikan dengan proposisi *governance* dari Stoker dalam Kurniawan (2007) menjelaskan terdapat lima proposisi mengenai *governance* yang sudah ditemukan jawabannya yaitu :

- a. *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya dari pemerintah. *Stakeholders* yang terkait di program Bakti Lingkungan penanaman trembesi bukanlah menjadi milik pemerintah saja melainkan ada peran dari swasta dan pemerintah. Ketiga *stakeholders* tersebut memiliki kedudukan masing-masing di dalam lingkaran sinergitas program Bakti Lingkungan penanaman trembesi, jadi setiap *stakeholders* tidak dapat berpedoman kepada ketentuan dan aturan sendiri maupun hanya bergantung kepada *stakeholders* lain. Sikap saling menghargai dan mematuhi aturan dan kepentingan dari setiap *stakeholders* dalam program tersebut harus digabungkan menjadi suatu visi yang sama sehingga perwujudannya dalam tujuan program ini dapat terwujud.
- b. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab atas tugas dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi. Tugas yang ditujukan kepada masing-masing *stakeholders* menjadi sebuah tanggung jawab yang semestinya dikerjakan sesuai dengan yang diamanatkan. Tanggung jawab tersebut juga termasuk jika *stakeholders* memiliki tugas dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di lapangan maupun kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program Bakti Lingkungan penanaman

trembesi. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan masalah dalam program yang berjalan, maka diharuskan komitmen dari setiap *stakeholders* untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik agar tidak menjadi penghambat dari stabilitas program Bakti Lingkungan penanaman trembesi. Tetapi pada prakteknya tugas yang diberikan kurang mendapatkan eksekusi yang baik dari masing-masing *stakeholders*. Sehingga membuat program tersebut berjalan dengan kurang efektif dalam hal sinergitas.

c. *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi yang kolektif. Ketergantungan menjadi suatu masalah klasik dalam sinergitas *stakeholders* dalam menangani suatu program atau masalah. Kurangnya pemahaman dari tugas pokok fungsinya menjadi dasar kesalahan yang menjadi akar permasalahan. Hubungan dari setiap *stakeholders* menjadi suatu sistem yang semestinya berjalan dengan baik untuk membantu arah program tersebut menjadi berkelanjutan. Tetapi berangkat dari ketidakpahaman fungsi dari masing-masing *stakeholders* terutama dari masyarakat membuat adanya ketergantungan. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari tugas yang seharusnya dikerjakan oleh *stakeholders* terkait justru dikerjakan oleh *stakeholders* lain.

d. *Governance* adalah membahas tentang *self-governing* yang otonom dari masing-masing aktor. Setiap *stakeholders* memiliki kepentingan dan upaya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Spesialisasi tugas dalam menjalankan sinergitas menjadi salah satu hal

yang kompleks mengingat tidak semua tugas dapat ditangani oleh satu *stakeholders*. Tetapi dalam sinergitas, *stakeholders* lain berhak untuk dapat memberi saran berdasarkan sudut pandang lain untuk membuat *stakeholders* terkait menjadi ada gambaran yang lebih luas.

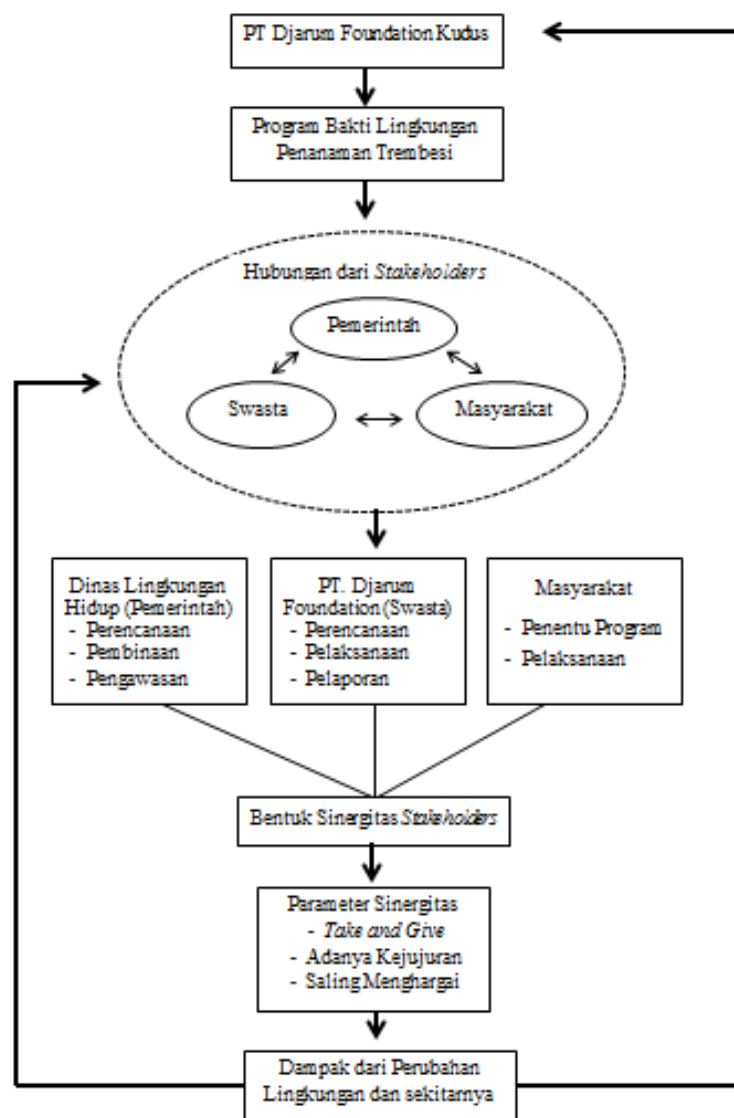
- e. *Governance* menyadari untuk memperbaiki keadaan dan tidak perlu bergantung terhadap kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya. Pemerintah selalu diidentikan dengan unsur penggerak dari program yang berkaitan dengan kemajuan suatu daerah. Tetapi stigma tersebut tidak tepat jika diterapkan pada setiap program atau tugas yang dijalankan oleh pemerintah. Karena pada konsep *Governance*, selain pemerintah ada peran swasta dan masyarakat yang juga memiliki kewenangan dalam membantu pemerintah dalam menjalankan program yang terjadi. Pada program Bakti Lingkungan penanaman trembesi, *leading sector* dipergang oleh PT Djarum Foundation selaku pihak swasta. Selain ide memang datang dari pihak swasta, hal tersebut mencerminkan bahwa setiap urusan tidak selalu dilimpahkan terhadap pemerintah tetapi masih banyak sektor seperti swasta yang dapat mengambil alih program yang dijalankan.

Berdasarkan penjabaran tentang proposisi dari peran setiap *stakeholders*, program Bakti Lingkungan dalam kontek penanaman trembesi memiliki peran masing-masing sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki oleh setiap *stakeholders*. Sinergitas digunakan sebagai mengakomodir seluruh peran dari *stakeholders* yang terkait dengan program terkait agar berjalan secara selaras untuk mewujudkan tujuan

yang sudah disepakati. Proposisi dari *governance* memiliki fungsi untuk mengukur tingkat ketergantungan dari sinergitas dari ketiga pilar *stakeholders*. Karena setelah peneliti melakukan observasi, masalah utama dalam sinergitas adalah ketidak sesuaian tugas yang dilaksanakan oleh setiap *stakeholders* dan adanya ketergantungan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi membuat peran dari masing-masing *stakeholders* terasa berjalan sendiri.

2. Sinergitas dari setiap Unsur *Stakeholders* dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Lingkungan

Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi sudah berhasil dilaksanakan dan sudah melewati beberapa tahapan sebagai proses menjadi pohon trembesi yang sempurna. Dalam melewati proses pelaksanaan, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dari *stakeholders* maupun lingkungan sekitar. Jika diambil dari lingkungan sekitar maka faktor cuaca dan iklim yang terus berganti menjadi salah satu penghambat dalam menghasilkan pohon trembesi dengan kualitas bagus. Faktor lainnya adalah faktor-faktor manusia yang terdapat di sekitar maupun yang mengurus program penanaman trembesi tersebut yakni ketiga pilar *stakeholders* dalam lingkaran teori *governance*. Sinergitas dari ketiga pilar dalam mengembangkan tugas dari masing-masing *stakeholders* ikut menentukan sampai mana program tersebut akan terus berjalan. Berikut merupakan kerangka berpikir terkait sinergitas dalam program Bakti Lingkungan penanamna trembesi :



Gambar 16. Analisis Pikiran Peneliti

Peran dari setiap *stakeholders* ikut memiliki andil dalam kesuksesan dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi. Sinergitas murni dibutuhkan untuk mengatur dan menyeimbangkan antara tujuan dan peran dalam menjalin sebuah kerjasama. Untuk mendukung ketiga *stakeholders* tersebut, unsur akademis ikut andil dalam memberikan saran dalam perencanaan program penanaman trembesi tersebut. Hal ini dirasa penting mengingat unsur akademis dibutuhkan agar program yang dilaksanakan telah

teruji secara ilmiah. Setelah mendapatkan rekomendasi dari akademis maka dari pihak PT Djarum Foundation kemudian mengatur hubungan pengimplementasian untuk mewujudkan program penanaman trembesi tersebut dengan *stakeholders* lain.

Dalam mengidentifikasi perihal tersebut, Susanto dalam Hamsa (2015:36) menyebutkan bahwa terdapat beberapa parameter dan syarat-syarat kerjasama dapat dikatakan sinergi dan hal tersebut sudah terjawab :

a. *Take and give*

Syarat *take and give* (memberi dan menerima) dalam Bakti Lingkungan penanaman trembesi terlihat terlaksana dari setiap *stakeholders* yang terlibat, peran tersebut adalah :

- 1) PT Djarum Foundation memberikan dan mengupayakan program tersebut sebagai upaya pelestarian lingkungan sekitar dan membantu pemerintah dalam membuat penutupan lahan terbuka hijau. Selain itu, program dilaksanakan untuk mengurangi polusi dan memberikan udara yang lebih sehat kepada masyarakat. Kontribusi tersebut akan menghasilkan branding yang dirasakan secara tidak langsung sehingga membuat program tersebut diidentikkan dengan PT Djarum Foundation.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemerintah akan mendapatkan bantuan dalam hal penutupan lahan vegetasi sehingga dapat memperingan pencapaian target dari pemerintah pusat. Dinas Lingkungan Hidup juga akan menerima pohon trembesi tersebut apabila pohon tersebut sudah siap untuk diserahkan terimakan. Hal yang

dapat diberikan pemerintah adalah peran dinas dalam menjadi perantara komunikasi dari swasta dan masyarakat serta mengatur tentang regulasi yang terkait dengan pemerintah pusat maupun dinas lain yang terkait program.

- 3) Masyarakat sebagai objek dari keberhasilan dari program penanaman trembesi secara oromatis akan mendapatkan lingkungan yang lebih sejuk dan asri dengan adanya program tersebut. Tetapi pihak swasta dan pemerintah juga menghimbau untuk masyarakat sekitar dapat membantu pelaksanaan program tersebut dengan ikut merawat dan menjaga kualitas pohon yang ditanam.

b. Adanya kejujuran

Syarat bahwa adanya kejujuran yang tumbuh dari dalam setiap *stakeholders* tercermin dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi. Kejujuran menjadi dasar dari parameter sinergi yang berasaskan kepercayaan dan keyakinan yang akan ditunjukkan dalam kerjasama aktualisasi program. PT Djarum Foundation sebagai pemerkasa ide sekaligus pimpinan dari program akan mempercayakan *stakeholders* lain menjalankan tugas sesuai keahliannya untuk membantu kelangsungan program. Dinas Lingkungan Hidup memberi kepercayaan kepada swasta untuk dapat melaksanakan program penanaman di daerah mereka dengan baik sesuai dengan ketentuan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait *feedback* yang diberikan kepada mereka. Untuk masyarakat yang dijadikan sebagai objek dari keberhasilan program juga

memberi kepercayaan kepada *stakeholders* lain untuk dapat memberikan dampak lebih kepada mereka.

c. Adanya sikap saling menghargai

Syarat adanya saling menghargai dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi dapat dimunculkan dalam sikap yang dimiliki dari setiap *stakeholders* agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan menyatukan pikiran dari setiap *stakeholders*. Namun, sikap dari setiap *stakeholders* setelah proses penanaman selesai menjadi acuh kepada *stakeholders* lain. Pihak swasta sebagai pimpinan menyayangkan hal tersebut karena program ini masih akan berlanjut hingga proses perawatan selesai. Dari pihak masyarakat kurang menghargai kerjasama ini karena beberapa penyebab kegagalan terjadi karena kelalaian dari masyarakat.

Pada penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa parameter sinergi dalam program Bakti Lingkungan penanaman trembesi berlangsung tidak sesuai dengan konsep yang disajikan. Pada konsep *take and give* dan adanya kejujuran, sudah berjalan dengan seharusnya tetapi belum terlaksana dengan sempurna. Tetapi untuk syarat adanya sikap saling menghargai dari setiap *stakeholders*, unsur dari masyarakat yang belum berperan dengan seharusnya.

Berdasarkan parameter sinergi yang telah disimpulkan, maka peneliti akan mengidentifikasi dari sinergitas dari masing-masing *stakeholders* dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang akan dipakai adalah mengidentifikasi sinergitas program dalam tugas dan fungsi yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 2 tahun 2017 pasal 5

tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dimana sinergitas tersebut sudah terjawab yaitu :

a. Perencanaan

Perencanaan menjadi tahap awal dimulainya program penanaman trembesi dimana pada tahap ini akan melibatkan pihak swasta dan pihak pemerintah. Program yang dicetuskan oleh PT Djarum Foundation ini akan didiskusikan tentang kerangka program dan persamaan persepsi serta tujuan dari kedua belah *stakeholders*. Program ini akan dibahas secara matang sebelum menentukan tugas yang dilaksanakan dan pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup maupun dinas lainnya terkait pelaksanaan program penanaman trembesi. Perencanaan tersebut akan berorientasi kepada menjaga kualitas lingkungan sekitar dan menjaga masyarakat sekitar untuk dapat merasakan dampak dari program tersebut.

b. Pelaksanaan

Pada peraturan yang diatur, pelaksanaan program dilakukan hanya oleh swasta karena di sisi lain pihak PT Djarum Foundation adalah pemerkasa ide dari program penanaman trembesi. Tetapi dari pihak swasta maupun pemerintah mengharapkan peran dari masyarakat sekitar penanaman untuk dapat membantu melakukan pelaksanaan program seperti melakukan penyiraman ketika pohon masih bibit dan sebagainya. PT Djarum juga telah memberikan pedoman dari cara mengelola pohon trembesi pada saat seremonial. Sinergitas yang terjadi dimaksudkan untuk menambah intensitas dari pelaksanaan program.

c. Pembinaan

Proses pembinaan menjadi tugas dari pemerintah. Tetapi dalam Bakti Lingkungan penanaman trembesi terdapat dua, dimana proses pertama dilakukan oleh PT Djarum Foundation untuk mengenalkan program penanaman trembesi kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan menjelaskan pentingnya pohon trembesi untuk dapat mengurangi jumlah polusi yang beredar terutama jalur pantai utara. Kedua terjadi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang datang ke masyarakat sekitar dari penanaman trembesi untuk melakukan pembinaan sesuai dengan arahan PT Djarum Foundation dan masyarakat dapat dipantau secara berjangka terkait kinerjanya. Tetapi pada tahap ini dikatakan lemah karena masih berfungsi dengan baik karena menganggap program tersebut sudah selesai.

d. Pengawasan

Pengawasan jelas menjadi tugas dari pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan selalu memantau kinerja dari PT Djarum Foundation dari proses penanaman hingga proses perawatan. Dinas Lingkungan memastikan bahwa target capaian yang dibahas di dalam perencanaan dapat tereksekusi dengan baik. Apabila terjadi ketidakcocokan maupun adanya laporan dari masyarakat terkait kinerja dari PT Djarum Foundation maka pemerintah akan melaporkan kembali kepada pihak swasta. Pengawasan pada tahap perawatan diakui oleh pemerintah tidak intens jika dibandingkan dengan proses awal program dilaksanakan.

e. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh PT Djarum Foundation untuk memperbarui informasi terkait perkembangan pohon trembesi yang telah ditanaman.

Proses pelaporan pertama dilakukan oleh tim pelaksana lapangan kepada pimpinan dari PT Djarum Foundation terkait keberhasilan program tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan yang dikeluarkan dengan yang diperoleh serta mendapatkan masukan terkait periode selanjutnya. Kedua pelaporan dilakukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Dimana untuk pemerintah pusat diwajibkan setiap tahun untuk mengetahui jumlah pohon yang ditanam. Sementara untuk pemerintah daerah memperoleh laporan terkait jumlah penutupan vegetasi dan kendala yang terjadi di lapangan.

Setelah program tersebut telah terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur. Masyarakat yang dijadikan sebagai penentu program memiliki peran untuk memberikan umpan balik terkait dampak positif atau negatif yang dirasakan. Umpan balik tersebut yang nantinya akan menjadi bahan koreksi bagi kedua *stakeholders* lain. Pada program Bakti Lingkungan penanaman trembesi setiap *stakeholders* telah melakukan tugasnya jika disesuaikan dengan peraturan daerah terkait. Pada konsepnya sinergitas yang telah disebutkan sudah memiliki skema yang seharusnya. Tetapi sinergitas yang dilakukan lama kelamaan mengalami penurunan intensitas karena masing-masing *stakeholders* sudah menganggap program tersebut selesai setelah pohon berhasil ditanam. Tidak adanya kesepakatan secara tertulis dari masing-masing terkait program tersebut sehingga masing-masing *stakeholders* merasa tidak adanya kewajiban untuk dilaksanakan. Komunikasi dan koordinasi dari masing-masing *stakeholders* menjadi masalah tersendiri karena masalah tersebut menjadi

masalah utama sinergitas tersebut tidak berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disepakati.

Konsep sinergi menjelaskan bahwa masing-masing aktor tidak dapat memaksakan kehendak ataupun bertindak yang tak sesuai dengan kesepakatan tersebut karena dapat mengganggu kestabilan dari aktor-aktor yang lain. Perlu adanya cara untuk membuat sinergi tersebut menjadi lebih terbangun dengan baik yaitu komunikasi dan koordinasi.

a. Komunikasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation

Muhammad (2014:4) berpendapat bahwa komunikasi adalah pertukaran verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Proses komunikasi tersebut berlangsung melalui tahap-tahap yang digunakan secara terus menerus sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan bagi pengirim dan penerima pesan. Sedangkan komunikasi jika dikaitkan dengan program Bakti Lingkungan penanaman trembesi yaitu adanya proses dimana antara ketiga *stakeholders* yang terlibat untuk menciptakan suatu hubungan dimana hubungan tersebut digunakan untuk mengirimkan dan mengkoordinasikan informasi serta perkembangannya untuk kemajuan program yang ditangani. Komunikasi yang terjalin dari ketiga *stakeholders* terkait diharapkan dapat memihak kepada semua pihak dan diharapkan dapat menambahkan pengaruh positif.

PT Djarum Foundation selaku pihak swasta yang berperan dalam inisiator dan pemimpin dari ide program Bakti Lingkungan penanaman trembesi. Sinergitas dari program yang dilaksanakan akan membantu pihak swasta karena mereka membutuhkan berbagai *stakeholders* sebagai

pendukung dan membantu berbagai kepentingan yang menyangkut program. Sebagai pemimpin dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi maka PT Djarum Foundation dituntut untuk dapat menyalurkan informasi maupun instruksi yang baik sehingga dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. PT Djarum Foundation telah melakukan tugasnya dengan berkomunikasi dengan kedua pilar *stakeholders* lain dan hal tersebut terbukti dengan tanggapnya pihak swasta dalam menanggapi keluhan tentang pohon trembesi yang tidak sesuai dengan kriteria atau pohon trembesi terkait telah dalam tahap membahayakan masyarakat sekitar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak selaku perwakilan dari pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan dari lingkungan hidup dari Kabupaten Demak untuk tetap asri dan nyaman. Selain kepentingan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki tugas untuk menjadi koordinator untuk *stakeholders* dari pemerintah yang bersentuhan dengan program Bakti Lingkungan penanaman trembesi untuk nantinya dapat dikoordinasikan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga bahwa informasi yang diberikan benar tingkat keakuratannya. Karena dapat dibilang bahwa tugas dari masing-masing komponen berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa antara satu komponen dengan komponen lain saling berkaitan. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengakomodir *stakeholders* kurang dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik karena masih belum dapat menyampaikan keinginan dari pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan.

Selanjutnya merupakan peran dari masyarakat. Masyarakat menjadi sasaran dari Bakti Lingkungan penanaman trembesi karena PT Djarum Foundation ingin membuat masyarakat yang melintasi jalan pantura maupun masyarakat sekitar dari ditanamnya pohon trembesi memiliki dampak udara yang lebih baik dari polusi yang memiliki volume yang tinggi. Volume polusi yang tinggi akan mengganggu lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Demak. Selain menjadi sasaran dari penanaman program, masyarakat juga berperan sebagai unsur pembantu untuk merawat pohon trembesi maupun menjadi *feedback* dari keadaan pohon trembesi. Untuk melakukan tugas tersebut komunikasi digunakan sebagai alat untuk berkoordinasi dengan *stakeholders* lain tentang perkembangan program tersebut. Tapi dalam berkomunikasi, masyarakat terlihat pasif sehingga membuat peran dari masyarakat terlihat kurang.

Komunikasi dalam Bakti Lingkungan penanaman trembesi telah mendapat jawaban bahwa komunikasi yang terjadi diantara ketiga pilar *stakeholders* tidak berjalan dengan baik. Di suatu saat komunikasi antara pihak pemerintah dan swasta berjalan lancar tetapi komunikasi tersebut tidak bersifat berkelanjutan. Komunikasi hanya berlangsung baik ketika perencanaan program hingga proses seremonial, namun selanjutnya seperti contohnya pada proses perawatan menjadi kurang komunikasi karena merasa pohon trembesi tersebut sudah dilakukan. Peran masyarakat untuk berkomunikasi dengan kedua pilar *stakeholders* lain menjadi kurang efektif

karena tidak adanya tempat untuk menyalurkan informasi. Sedangkan persepsi dan tanggapan dari masyarakat memiliki keanekaragaman dalam sudut pandang yang berbeda dan seharusnya hal tersebut menjadi *feedback* yang tepat untuk ditindak oleh pihak swasta.

b. Koordinasi dalam Program Bakti Lingkungan Djarum Foundation

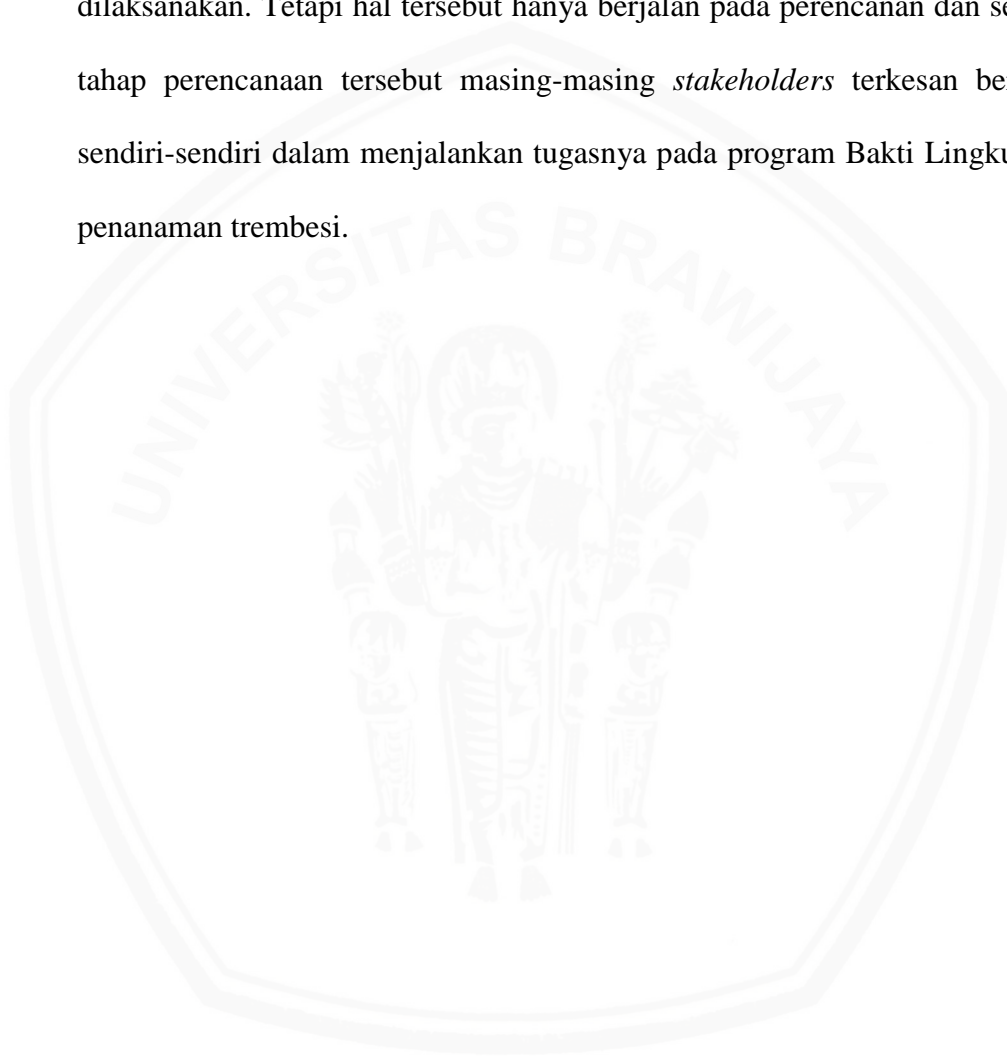
Menurut Moekijat (1994:2) koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara koordinasi jika dikaitkan dengan program Bakti Lingkungan penanaman trembesi adalah proses menyatupadankan kegiatan atau tujuan dari masing-masing *stakeholders* untuk mencapai sasaran-sasaran yang dikomunikasikan secara bersama. Sesuai dengan syarat agar dapat tercipta suatu koordinasi yang efektif dimana di dalamnya salah satunya ada komunikasi yang efektif maka koordinasi dan komunikasi selalu menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan. Maka dari itu, pembahasan akan koordinasi dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi akan melanjutkan bahasan tentang komunikasi .

PT Djarum Foundation selaku pemimpin dari program Bakti Lingkungan penanaman trembesi melakukan koordinasi sebagai upaya untuk mengkomunikasikan perihal tindak lanjut dari pohon trembesi yang sudah tertanam guna untuk membicarakan kelanjutan jangka panjang dari program. Koordinasi menjadi penting bagi pihak swasta karena keterjangkauan untuk memantau pohon trembesi dan keterjangkauan urusan yang bukan menjadi spesialisasinya menjadi alasan mengapa perlu koordinasi dalam sinergitas

antara *stakeholders*. Koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku perwakilan pemerintah berjalan dengan baik pada saat awal perencanaan hingga seremonial. Tetapi tindak lanjut koordinasi untuk perawatan menjadi kurang baik. Banyak proyek yang bersandingan dengan pohon trembesi membuat pohon trembesi menjadi tidak berkembang secara maksimal. Di kasus lain, proyek dari pemerintah tentang normalisasi membuat akar dari pohon trembesi membuat rusak akibat terkena alat berat yang digunakan mengangkat tanah dari sungai. Semua terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup dengan *stakeholders* pemerintah yang lain sehingga semua program yang ada bersinggungan tanpa ada ketentuan yang tepat.

Koordinasi lain terjadi antara masyarakat dengan dua pilar *stakeholders* lain yakni pemerintah dan swasta. Konsep *governance* yang dipakai, membuat masyarakat dituntut untuk lebih mempunyai peran signifikan. Masyarakat dapat membantu swasta dalam membantu merawat pohon trembesi di lapangan dan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi kinerja dari pihak swasta. Masyarakat juga dapat memberikan saran maupun *feedback* yang membangun agar menjadi bahan evaluasi dari lanjutan program Bakti Lingkungan penanaman trembesi di daerah lain. Namun pada prakteknya berawal dari komunikasi yang terjalin dengan baik maka akan mempengaruhi koordinasi yang dibangun oleh setiap *stakeholders*. Masyarakat yang kurang aktif untuk melaporkan kejadian di lapangan membuat swasta menjadi kurang masukan dan hanya menerima masukan pemerintah dari sisi perijinan, pengawasan dan pembinaan.

Koordinasi pada program Bakti Lingkungan penanaman trembesi telah mendapatkan jawaban melalui penelitian yang dilakukan. Koordinasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Setiap *stakeholders* menginginkan koordinasi yang intens dimana setiap *stakeholders* secara berkala melaporkan perkembangan dari tugas yang dilaksanakan. Tetapi hal tersebut hanya berjalan pada perencanaan dan setelah tahap perencanaan tersebut masing-masing *stakeholders* terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya pada program Bakti Lingkungan penanaman trembesi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi berjalan dengan menggunakan unsur sinergitas dimana di dalamnya terdapat tiga unsur yang mewakili masing-masing *stakeholders* yakni PT Djarum Foundation selaku pihak swasta, Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi merupakan program dari PT Djarum Foundation yang memiliki tujuan untuk merawat lingkungan untuk tetap terjaga menjadi bekal untuk mewujudkan negeri yang nyaman dan tentram. Program ini mempunyai penanaman titik awal pada jalan pantura dari Kudus hingga Semarang yang pusatnya berada pada Kabupaten Demak. Program penanaman trembesi sejalan dengan keinginan dari pemerintah Demak yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan. Kesamaan tujuan dari kedua *stakeholders* membawa program Bakti Lingkungan penanaman trembesi terlaksana dan masih dalam masa perawatan sampai sekarang. Dalam menangani sinergitas program tersebut, terdapat lima proposisi *governance* yang dapat mempengaruhi sinergitas yakni institusi dan aktor yang buka merupakan bagian dari pemerintah, mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab, mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat, membahas tentang *self-governing* dari masing-masing stakeholder dan menyadari untuk memperbaiki

keadaan dan tidak perlu bergantung terhadap kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya. Lima proposisi mengatakan bahwa peran dari masing-masing *stakeholders* kurang maksimal karena setiap *stakeholders* tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Masyarakat menjadi *stakeholders* yang kurang berkontribusi karena bersikap pasif dan kurang memiliki tempat dalam sinergitas *stakeholders* program tersebut.

2. Sinergitas *stakeholders* tidak berjalan dengan baik karena beberapa fungsi dan tugas tidak secara konsisten dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhinya terdapat dua yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam program Program Bakti Lingkungan penanaman trembesi baik pihak PT Djarum Foundation, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat membutuhkan komunikasi untuk mengkoordinasikan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* sekaligus menyatukan pikiran dan tujuan menjadi satu pikiran terkait suatu visi dan misi. Komunikasi dan koordinasi memiliki keterkaitan dimana lancar atau tidaknya komunikasi akan mempengaruhi kelancaran dari koordinasi. PT Djarum Foundation selaku *stakeholders* utama dalam sinergitas ini, berupaya untuk komunikasi menjadi lancar sampai program Bakti Lingkungan penanaman trembesi pada tahap pertama berhasil. Pada tahap perencanaan hingga seremonial, komunikasi berjalan lancar. Tetapi pada tahap perawatan komunikasi mulai kabur karena masing-masing *stakeholders* menganggap bahwa pohon trembesi sudah ditanam dan artinya program tersebut sudah selesai. Begitu juga dengan koordinasi yang dijalin oleh ketiga

stakeholders yang kurang lebih juga sama dengan komunikasi. Tetapi pada tahap koordinasi terlihat dampak dari kurangnya koordinasi yakni pohon trembesi banyak mengalami masalah karena bersinggungan dengan program lain dari pemerintah dan perkembangan dari pohon trembesi menjadi tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul sinergitas *stakeholders* melalui program *Corporate Social Responsibility* berbasis lingkungan, maka peneliti akan memberikan saran yaitu :

1. Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar perjanjian setiap *stakeholders* dimana merka terikat ke dalam suatu perjanjian tertulis dimana akan ada rasa pertanggung jawaban dari diri setiap *stakeholders* untuk melaksanakan program. Perjanjian tersebut berupa dokumen tertulis yang mengatur tentang teknis tugas dari masing-masing *stakeholders*.
2. Pengaktifan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2017 pasal 31 yang berbicara tentang forum yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pertanggung jawaban sosial dari perusahaan. Forum ini akan dilaksanakan rutin dan menjadi tempat bagi setiap *stakeholders* untuk bertukar pikiran dengan pengawasan langsung dari Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, forum memiliki tujuan menyelesaikan hambatan dari program terkait masalah komunikasi dan koordinasi yaitu

tidak adanya tempat untuk membahas terkait pelaksanaan program dan *feedback* yang diberikan dari ketiga *stakeholders*.

3. Peningkatan kapasitas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat dalam upaya terkait dengan edukasi tentang penanganan yang dilakukan apabila terjadi masalah pada pohon trembesi dan penjelasan dari fungsi pohon trembesi yang akan dijelaskan sehingga pemerintah maupun masyarakat mengerti. Peningkatan kapasitas dapat menjadi pengetahuan bagi Dinas Lingkungan Hidup mengingat usia perawatan dari PT Djarum Foundation akan segera selesai dan apabila terjadi serah terima pohon trembesi tersebut maka pengetahuan tersebut akan membantu untuk proses perawatan. Bagi masyarakat peningkatan kapasitas dapat membuat pengetahuan dan mengajarkan penanganan yang dilakukan apabila terjadi masalah pada pohon trembesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Luas Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Demak*. Diakses melalui <https://demakkab.bps.go.id/statictable/2016/10/28/65/luas-daerah-kabupaten-demak-dirinci-per-kecamatan-tahun-2015.html>
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Demak*. Diakses melalui <https://demakkab.bps.go.id/statictable/2016/10/28/63/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-per-kecamatan-di-kabupaten-demak-tahun-2015-.html>
- Dahlan, Endes, 2010. Trembesi Dahulunya Asing tetapi Sekarang Tidak. Diakses melalui <http://endesdahlan.staff.ipb.ac.id/files/2011/01/Trembesi-Dahulunya-Asing-Namun-Sekarang-Tidak-Lagi.pdf>
- Darmadi, D., & Sukidin, 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Djamarah, Syaiful Bahri, 2010. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Nor, 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamsa, Mohammad Jamhar, 2015. “Sinergitas Stakeholders dalam Proram Malang Green, Clean and Save dalam Perspektif Good Governance”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Henry, Nicholas, 1998. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Hetifah, Sumarto, Sj, 2009. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Pakarsa Inovatif dan Partisipasi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hmp_Humas_USAHAID, 2008. *Mengenal Stakeholder*. Diakses pada tanggal 25 November dari <http://hmp-humas-usahaid.blogspot.com/2008/09/mengenalstakeholder.html>
- Keban, Yeremiar, T., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keraf, A. Sonny, 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Kurniawan, Teguh, 2007. “Pergeseran Paradigma Adminitrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 52-70.
- Moesa, Soekarman, 2002. *Ilmu Lingkungan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muhammad, Arni, 1995. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat, 1994. *Koordinasi*. Jakarta: Penerbit Bandar Maju.
- Moleong, L.J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyanto, H.R., 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munir, Misbach dan M. Aniar Hari Swasono, 2013. "Potensi Pupuk Hijau Organik (Daun Trembesi, Daun Paitan, Daun Lantoro) Sebagai Unsur Kestabilan Kesuburan Tanah". *Jurnal Studi Agrobisnis*, 4-5.
- Nawawi, H. Hadari, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuryana, Ria Devi, 2016. "Etika Ekologi Mantra Cocok Tanam Masyarakat Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang". *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang*.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Jawa Tengah, 2017. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. Semarang.
- Podugge, Robiyati, 2009. *Sinergi DPRD dan Walikota dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Purnaweni, Hartuti, 2014. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Dalam Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 12 (1) : 53-65, 2014.
- Rusdianto, Ujang, 2013. *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia No.26 tentang Penataan Ruang*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia No.47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang, 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Steiner, George, and John F. Steiner. 2000. *Business, Government, And Society a Managerial Perspective*. Ninth edition USA: McGraw-Hill Inc..
- Sugandhy, A. dan Hakim R., 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dann R&B*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

- Tony Bovaird, 2005. *Public Management and Governance*. London: New Fetter Lane.
- Wahyudi, Isa, dan Busyra Azheri, 2008. *Corporate Social Responsibility*. Malang: Setara Press.
- Walhi, 2012. *Perusahaan dan Pemerintah, Aktor Utama Perusak Lingkungan*. Diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/2013/01/17/walhi-perusahaan-dan-pemerintah-aktor-utama-perusak-lingkungan-2012/> [13/01/17].
- World Wide Fund for Nature, 2007. *Kehutanan*. Diakses pada 26 November 2017 melalui https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_species/tentang_forest_species/kehutanan/



LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Gilang Adyarezky
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 9 Mei 1996
Agama : Islam
Alamat : Desa Nganguk Wali 254A RT 05 RW 03 Kramat
Kec. Kota, Kudus
Telepon : 08562712910
Email : gilangadyarezky48@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SD 3 Demaan Kudus
2008-2011 : SMP 1 Jati Kudus
2011-2014 : SMA 1 Bae Kudus
2014-2018 : Universitas Brawijaya Malang





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 234/UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
Jln. Bhayangkara Baru No. 1, Demak

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Gilang Adyarezky
Alamat : Nganguk Wali 254A rt5/rw3 Kudus
NIM : 145030101111096
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : *Sinergitas Stakeholders Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Lingkungan (Studi pada Program Penanaman Trembesi PT. Djarum Foundation Kudus)*
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Januari 2018
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Lely Indah Mindarti, Dr., M.Si
NIP. 196905242002122002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 234 /UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Bapak Fx Supanji
General Manager Corporate Affair PT Djarum
Jln. Jend Ahmad Yani No 28
Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59317

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Gilang Adyarezky
Alamat : Nganguk Wali 254A rt5/rw3 Kudus
NIM : 145030101111096
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Sinergitas Stakeholders Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Lingkungan (Studi pada Program Penanaman Trembesi PT. Djarum Foundation Kudus)
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Peserta : 1 (satu) orang
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Januari 2018

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Lelly Indah Mindarti, Dr., M.Si
NIP. 196905242002122002

*Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





PT. DJARUM
Jalan Jend. A. Yani 28 Kudus, Indonesia
Phone. +62.291 431 901, 431 691
Fax. +62.291 431 809
www.djarum.com

SURAT-KETERANGAN
101 / SKKP / CORA / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :


Nama	: Gilang Adyarezky
Nomor Induk	: 145030101111096
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Universitas	: Universitas Brawijaya

Telah selesai melakukan penelitian di perusahaan kami mulai dari Tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 di perusahaan kami dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini, harap dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 19 Maret 2018
Hormat kami,

PT DJARUM
JL. JEN. A. YANI 28
KUDUS, INDONESIA


Purwono Nugroho
Senior Public Affairs Manager

Interview Guide

No	Fokus	Pertanyaan	Informan	Data Sekunder
1.	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup ? 2. Apakah tujuan Dinas Lingkungan Hidup menyetujui kerjasama program penanaman trembesi dari PT Djarum Foundation? 3. Apakah tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut? 4. Apakah hasil yang dihasilkan oleh samapai saat ini sudah sesuai dengan harapan? 5. Apakah peran dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemerintah dalam program penanaman trembesi? 6. Menurut anda, apakah hubungan sinergitas dari masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki masalah? 7. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan <i>stakeholders</i> lain dalam pembahasan program terkait? 8. Apakah Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi 	Dinas Lingkungan Hidup (Arso Budiyatno)	Data Jumlah Pohon Trembesi yang Tertanam, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, RPJMD Kabupaten Demak

		<p>dengan <i>stakeholder</i> pemerintah lain terkait program penanaman trembesi?</p> <p>9. Apakah faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil peran pemerintah dalam program berbasis lingkungan?</p>		
2.	Swasta	<p>1. Apakah program dari PT Djarum Foundation yang memiliki basis lingkungan?</p> <p>2. Apakah latar belakang, tujuan dan rencana dari perwujudan program penanaman trembesi?</p> <p>3. Apakah tolak ukur keberhasilan program tersebut?</p> <p>4. Apakah sampai saat ini tujuan dari program penanaman trembesi sudah tercapai?</p> <p>5. Ada berapa titik penyebaran penanaman trembesi dilakukan?</p> <p>6. Apakah pertimbangan awal memilih jalur Kudus-Semarang menjadi titik awal penanaman trembesi?</p>	PT Djarum Foundation	Surat Ijin Penghijauan dari B2PJN, Laporan Jumlah Pohon Trembesi Tertanam kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Terperinci terkait masalah dan jumlah pohon tertanam

		<p>7. Dalam proses penanaman tersebut, adakah peran <i>stakeholder</i> lain dalam pengaplikasian program tersebut?</p> <p>8. Apakah peran PT Djarum Foundation dalam sinergitas ini?</p> <p>9. Dari segi swasta, apakah peran dari masing-masing <i>stakeholder</i> termasuk PT Djarum Foundation sudah maksimal?</p> <p>10. Apakah faktor pendukung dan penghambat bagi PT Djarum Foundarion untuk mengambil peran swasta dalam program berbasis lingkungan?</p>		
3	Masyarakat	<p>1. Apakah anda mengetahui tentang program bakti lingkungan penanaman trembesi?</p> <p>2. Apakah yang anda ketahui tentang acara tersebut?</p> <p>3. Apakah manfaat yang didapat oleh masyarakat dari program penanaman trembesi?</p> <p>4. Menurut anda, apakah acara tentang sosialisasi dan kampanye mengenai lingkungan perlu</p>	Masyarakat	<p>Luas Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Demak , Tabel Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Demak</p>

		<p>dilakukan?</p> <p>5. Sebagai masyarakat, apakah dengan sosialisasi seperti kegiatan ini, anda sudah dilibatkan dalam upaya pelestarian lingkungan?</p> <p>6. Apa yang anda inginkan sebagai masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan lewat penanaman trembesi?</p> <p>7. Apakah program tentang perealisasiian program seperti penanaman trembesi sudah menunjukkan pertanggung jawaban sosial bagi swasta?</p> <p>8. Apakah faktor pendukung dan penghambat bagi masyarakat dalam mengambil peran untuk program berbasis lingkungan?</p>		
--	--	---	--	--

Jumlah Trembesi yang Tertanam dan Masalah yang Dialami

Penanaman TREMBESI di PANTURA JAWA				
KUDUS - MERAK	Tahun	Jumlah Pohon Tertanam	Penyebab Kematian/kerusakan a.l.	
			Keterangan	
Kudus - Demak	2010	3.403	- angin kencang / hujan lebat - pemangkasan oleh PLN - kecelakaan lalu lintas	
Demak - Semarang	2010	711	- parkir liar truk/kendaraan besar nyangkut - angin kencang / hujan lebat	
Semarang - Pekalongan	2011	2.309	- pencabutan atau pematahan oleh orang gila	
Pekalongan - Losari	2012	4.621	- parkir liar truk/kendaraan besar nyangkut - pencabutan / pematahan oleh orang gila (wil. Losari) - penggalian kabel - pelebaran jalan (wil. Tegal-brebes)	
Losari - Jakarta	2013	6.922	- pencabutan / pematahan oleh orang gila (wil. Losarang & Kadanghaur) - terserempet kendaraan yang menerobos bahu jalan (wil. Jatibarang - Pamunakan) - parkir liar truk/kendaraan besar nyangkut	
Jakarta - Tangerang	2013	280	- lahan tanam sempit - terserempet kendaraan yang menerobos bahu jalan	
Tangerang - Merak	2013	1.485	- penggalian kabel dan jaringan pipa gas - pencabutan atau pematahan oleh orang gila	
Sub Total		19.731		

KDS - BANYUWANGI				
KDS - BANYUWANGI	Tahun	Jumlah Pohon Tertanam	Penyebab Kematian/kerusakan a.l.	
			Keterangan	
Kudus - Pati (Lingsar Kudus)	2014	4.830	- Roboh terkena angin kencang saat hujan - Banjir - Pencabutan pohon baru - Pelebaran jalan - Pemangkasan semabnarangan oleh PLN di Lingkar Pati	
Pati - Rembang	2014	3.568	- pencabutan atau pematahan oleh orang gila (wil. Rembang) - normalisasi sungai	
Rembang - Tuban (Laren)	2014	2.800	- Pertumbuhan bibit lambat - Batang dipatahkan / diacabut oleh orang - terkena air laut - pelebaran jalan	
Tuban - Lamongan (Tuban, Babat)	2014	3.968	- Pertumbuhan bibit lambat - Bibit pohon terkena imbas perbaikan dan pelebaran jalan	
Lamongan - Surabaya (Lamongan, Gresik)	2014	3.204	- pencabutan / pematahan oleh orang gila - Pohon terkena proyek galian kabel - banjir	
Surabaya - Probolinggo	2015	2.904	- pencabutan / pematahan oleh orang gila - pelebaran jalan dan terkena imbas pelebaran sungai	
Probolinggo - Paiton	2013	2.914	- pelebaran jalan - pencabutan / pematahan oleh orang gila - pembangunan toko dan bangunan	
Paiton - Situbondo (Situbondo Timur, Situbondo Barat)	2013	4.262	- pencabutan / pematahan oleh orang gila - pengrusakan oleh petani / penjual rumput gajah - rubuh terkena angin kencang	
Situbondo - Banyuwangi	2015	1.600		
Sub Total		29.250		
TOTAL		48.981		

LAIN-LAIN				
Penanaman TREMBESI selain PANTURA JAWA				
Jemb. Suramadu - Pertigaan Bangkalan MADURA	2013	1.650	- terkena asap dari lahan yang terbakar - pencabutan atau pematahan oleh orang gila	
BIL Lombok	2013	2.241	- pelebaran jalan oleh PU pusat dan mengenai pohon, tanpa koordinasi - ditebang, dibakar, dan dikuliti oleh warga, tertabrak, cuaca panas	
Kualanamu Medan	2014	3.968		- perawatan: Angkasa Pura II & Paguyuban Budkasi
TOL CIPALI	2015	12.979	- angin kencang dan hujan badai - hama ulat	
Highway KNO - MEDAN	2015	924		
Kelling Madura	2016	15.446	- Pencabutan oleh warga dan orang gila - Terkena angin dan banjir di area Sumenep - Kondisi pohon baru kering karena terkena angin kering dari laut	
Smg-Solo-Yogya-Smg	2016	8.576	- Pencabutan oleh warga - Pengcoran median jalan - robok dan patih terkena angin kencang - terkena hama ulat di area Lingkar Ambarawa	
TOTAL		45.784		

Surat Balasan atas Ijin Penanaman Trembesi dari B2PJN

**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V**
Jl. Raya Waru No.20 Sidoarjo 61256 Telp. 031 -8540196 Fax 031- 8534864

Sidoarjo, 27 Oktober 2010

Nomor : PR.03.02-BBPNV-271010/31
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth
Public Affairs Manager
PT. Djarum
Jl. A. Yani 28 – Kudus.

Perihal : Surat Ijin Turus Jalan Ruas Semarang – Losari.

Menunjuk surat Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : PR.03.02-Db/736 perihal Rekomendasi Teknis untuk Permohonan Ijin Penanaman Pohon Konservasi (Turus Jalan) pada ruas jalan Semarang – Losari, dengan ini disampaikan bahwa Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan ijin kerja kepada PT. Djarum untuk melaksanakan Penghijauan Turus jalan ruas Semarang – Losari dan U-turn di ruas jalan Demak – Losari (surat terlampir).

Selanjutnya PT. Djarum dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Jenderal Bina Marga tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional – V

Dr. A.G. Ismail, MSc
NIP. 19530304 198202 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Bina Pelaksana Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah
4. Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Jembatan Jawa Tengah
5. Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Tengah
6. Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Tengah
7. Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Metropolitan Semarang
8. Kepala SNVT Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan Metropolitan Semarang
9. Peringgal



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V**

Jalan Raya Waru No. 20, Sidoarjo 61256 Telp. 031-8540198 Fax. 031-8534884; email: b2pjn5@yahoo.co.id / b2pjn_5@yahoo.com

Nomor : 31.07.02 - 88/PM-3 / 301208/3
Lampiran :

Sidoarjo, 30 Desember 2009

Kepada Yth.

PT. DIJARUM
Jl. Jend. A. Yani 28
Kudus.

K 1862 PK

Perihal: Surat Ijin Penghijauan Turus Jalan.

Menunjuk surat kami nomor: UM.D1.03 - BBRUN - V/201009/6 perihal serta Berita Acara Hasil Survei Turus Jalan Pada Rues Semarang - Kudus tanggal 28 Desember 2009 dengan ini kami memberi ijin kerja kepada PT. Djarum untuk melaksanakan Penghijauan Turus Jalan Semarang - Kudus dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum penghijauan dimulai agar berkoordinasi dengan para Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jateng, SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Jateng, Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Semarang serta para PPK terkait.
2. Pelaksanaan penanaman pohon harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam PP no 34 tahun 2006 tentang Jalan.
3. Penanaman pohon diijinkan hanya pada lokasi yang berada dibawah wewenang Ditjen Bina Marga.
4. Bila lokasi penanaman ternyata diklaim oleh Pihak Ketiga maka kondisi tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Djarum. Untuk itu selainya dihindari penanaman pada lahan milik warga.
5. Pohon yang ditanam disarankan yang tidak getas dan tidak berbuah sehingga tidak membahayakan pengguna jalan.
6. PT. Djarum bertanggungjawab terhadap pemeliharaan pohon pasca tanam selama 3 tahun.
7. Pelaksanaan penghijauan turus jalan agar melibatkan personil Bina Marga sebagai Pengawas, agar aman terhadap pengguna jalan dan konstruksi.
8. Pada akhir pekerjaan penanaman harus dilakukan pemeriksaan bersama dan dibuat Berita Acara dengan melibatkan unsur SNVT/PPK terkait serta staf dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah
2. Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Jawa Tengah
3. Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Tengah
4. Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Tengah
5. Kepala SNVT Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan Metropolitan Semarang
6. Para PPK Rues Jalan Semarang - Kudus
7. Peninggal

Artikel “Trembesi dulunya asing sekarang tidak lagi” oleh Prof. Endes

Trembesi atau kihujan (Albizia saman--dahulu Samanea saman) yang kita kenal saat ini memang bukan spesies asli Indonesia. Namun tumbuhan berkayu yang kekar, kokoh, serta rindang dengan bentuk kanopi yang memayung ini tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia di desa maupun kota sebagai peneduh jalan.



Menelusuri jalan-jalan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga ruas-ruas jalan di beberapa tempat diluar pulau Jawa banyak kita temui Trembesi. Ketika mengunjungi Singapura pun di sepanjang jalan dari bandara Changi sampai ke pusat kota Singapura, hampir di semua bagian kota mudah dijumpai pohon ini.

Menurut *Trees of Our Garden City: A Guide of the Common Trees of Singapore* (h.160), dikatakan tanaman ini masuk ke Singapura pada tahun 1876. Dijelaskan juga bahwa Trembesi tahan terhadap serangan jamur dan rayap. Polong buahnya dapat dimakan oleh hewan ternak yang biasa terdapat di areal padang penggembalaan, berupa : kuda, kambing dan domba. Semut dan lebah juga sering terlihat menghisap buahnya yang memang rasanya manis.

Pada tahun 1971, Perdana Menteri Lee Kuan Yew mencanangkan penanaman Trembesi secara massal

di Singapura. Pada buku tersebut dijelaskan juga bahwa Trembesi merupakan jenis tanaman cepat tumbuh (*fast growing species*) yang tumbuh sangat baik pada tanah dengan drainase yang baik. Banyak orang yang mengkhawatirkan jika tanaman ini dapat mendesak jenis tempatan dikarenakan kemampuan adaptasi tanaman ini sangat tinggi. Namun berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperoleh, sampai saat ini belum ada laporan kasus tanaman ini telah mendesak tanaman lokal. *List of species invasive trees* (daftar jenis pohon yang invasif) juga tidak memasukkan Trembesi sebagai jenis invasif yang dapat mengalahkan jenis tempatan. Hal ini dikatakan oleh George W. Staples dan Craig R. Elevitch pada artikelnya di www.traditionaltree.org yang berjudul : *Specific Profiles for Agroforestry dalam sub judul Invasive potential: Considered invasive in Fiji and Vanuatu, elsewhere*

in the Pacific it is naturalized but rarely considered to be problematic.

Tidak Merusak Ekosistem Lokal

Rasa khawatir terhadap kemungkinan invasi jenis baru dari luar Indonesia memang perlu diwaspadai, namun janganlah terlalu berlebihan terutama terhadap jenis-jenis yang telah lama kita kenal. Sesungguhnya banyak jenis tanaman yang kita kenal sekarang ini bukanlah asli Indonesia. Padi, konon berasal dari lembah Sungai Gangga di India dan ada yang mengatakan berasal dari lembah Sungai Yangtze di Cina. Jagung yang kini tersebar ke seluruh penjuru dunia, menurut catatan sejarah berasal dari Meksiko. Kemudian kedelai dari Asia Timur dan kacang tanah dari Peru.

Trembesi mampu mencapai ketinggian 20-25 meter dengan diameter tajuk 25-30 meter. Melihat sosok tanaman ini di Kebun Raya Singapura (*Singapore Botanical*



Garden) rentangan tajuknya lebih dari 27 meter. Ini berarti diameter tajuknya sekitar 50 - 55 meter. Trembesi--yang dipasang plakat *HERITAGE TREE*--menyambut kedatangan pengunjung sebelum memasuki areal Kebun Raya Singapura ini hidup tegak dengan kokohnya walaupun telah berumur ratusan tahun. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah di bawah tegakan pohon tersebut tumbuh subur berbagai herba berbunga dan rumput. Jadi kekhawatiran yang dinyatakan oleh segelintir ahli botani di *Harian Kompas* (16 Februari 2010, h.13) menjadi sangat lemah. Kekhawatiran bahwa trembesi sebagai jenis bukan asli Indonesia yang dapat mendesak tanaman dan merusak ekosistem lokal kurang kuat karena pada salah satu areal di Kebun Raya Singapura berupa "hutan alami" tidak mengalami perubahan suksesi walaupun jaraknya hanya belasan meter dari pohon tersebut.

Tentang adanya ancaman

terhadap mikroorganisme tanah juga tidak ada karena daun trembesi serta buah polongnya yang mengandung gula akan lapuk menjadi humus yang merupakan media yang sangat baik untuk mikroorganisme tanah. Adanya mikroorganisme yang berada pada permukaan tanah merupakan penyerap gas CO (karbon monoksida) yang sangat beracun bagi manusia terutama manusia di perkotaan. Hal ini disebabkan karena daya afinitas Hb-CO sebesar 300 kali lebih kuat daripada afinitas Hb-O₂.

Penanaman Beringin (*Ficus benjamina*) dan jenis lainnya seperti Sengon atau Bambu dapat saja diterima karena memang semua makhluk ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa beringin hanya memiliki daya serap CO₂ yang tinggi saja, lebih rendah dibandingkan dengan Trembesi (tergolong sangat tinggi), maka Beringin bukan pilihan utama sebagai tanaman yang berfungsi sebagai tanaman penyerap karbon dioksida.

Kihujan atau Trembesi bisa menjadi terobosan "kreatif" Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya mengatasi pemanasan global. Bayangkan, satu pohon dengan bentangan tajuk 15-20 meter (tajuk pohon tidak persis membentuk lingkaran) dapat menyerap gas CO₂ sebesar 28,5 ton per tahun. Jadi akan sangat besar manfaatnya jika kita menanam Trembesi di banyak tempat dalam jumlah banyak di Indonesia.

"Die Hard." demikian celetuk seorang peserta pembekalan di Markas Besar TNI menyebut Trembesi, ketika Endes--alumnus Fakultas Pertanian UNPAD dan menamatkan pendidikan

pascasarjana dan doktorainya di IPB--menjelaskan spektrum pertumbuhan Trembesi yang maha luas karena dapat tumbuh di mana saja. Mengapa demikian? Pohon yang tumbuh dengan silara (tajuk) terbuka yang diameternya dapat mencapai 50 meter dan tinggi lebih dari 20 meter, mampu tumbuh pada tanah asam (pH 4,6) hingga netral, daerah kering hingga yang tinggi curah hujannya, bahkan lahan yang kurang subur. Hal ini dikarenakan Trembesi dapat bersimbiosis dengan *Rhizobium*. Bakteri *Rhizobium* yang hidup pada bintil akar membantu mengikat nitrogen yang konsentrasinya sebanyak 78% di udara sehingga pohon ini ketika dewasa dijamin tidak akan menderita kekurangan nitrogen, asal tanahnya gembur.

Menyadari pentingnya manfaat menanam pohon Trembesi sebagai pohon yang berdaya serap CO₂ paling tinggi, PT Djarum sejak bulan Februari-Mei 2010 telah menanam pohon trembesi tahap 1 sepanjang 58 km di turus jalan Semarang-Kudus sehingga mampu menyerap CO₂ sebanyak 78,8 juta kg/tahun. Program *Djarum Trees For Life* ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat mulai dari pejabat pemerintah setempat, TNI dan Kepolisian, musisi, pencinta lingkungan, atlet bulutangkis, blogger dan selebritis. Program ini akan terus berlangsung ke tahap berikutnya hingga meliputi sepanjang daerah Pantura Jateng dan sebagian daerah di Jawa Barat.

Dr. Ir. H. ENDES N. DAHLAN
Kepala Bagian Hutan Kota dan Jasa Lingkungan
Fakultas Kehutanan IPB

Sumber : Artikel Institut Pertanian Bogor